

Nyoman Sunarta
Nyoman Sukma Arida



PARIWISATA BERKELANJUTAN



Fakultas Pariwisata
Universitas Udayana

PARIWISATA BERKELANJUTAN

**Nyoman Sunarta
Nyoman Sukma Arida**

CAKRA PRESS
2017

Pariwisata Berkelanjutan

Penulis

Nyoman Sunarta
Nyoman Sukma Arida

Pracetak

Slamat Trisila

Penerbit

CAKRA PRESS
Anggota IKAPI Bali
Jalan Diponegoro No. 256
Denpasar, Bali
E-mail: cakrapress@yahoo.com

Bekerja sama dengan

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana

Cetakan Pertama: 2017

ISBN 978-602-9320-76-3

KATA PENGANTAR

Buku Pariwisata yang digunakan sebagai bahan perkuliahan, baik di Perguruan Tinggi di Bali maupun di perguruan tinggi di Indonesia tidak banyak kita jumpai. Kelangkaan ini karena memang ilmu pariwisata yang tergolong masih “muda” juga tidak banyak perguruan tinggi yang membuka program studi atau fakultas pariwisata. Pada titik terbatasnya ketersediaan buku pariwisata tersebut, maka buku ajar yang berjudul *Pariwisata Berkelanjutan* ini merupakan sebuah bentuk upaya penulis guna ikut memberikan sumbangan kecil terhadap khazanah ilmu kepariwisataan di tanah air.

Materi buku ini dihimpun dari sejumlah riset mandiri dan studi dokumentasi dimodifikasi sesuai peruntukan sebagai bahan ajar untuk perkuliahan. Oleh karena itu, modul ini dimaksudkan sebagai penunjang mata kuliah Pariwisata Berkelanjutan dan Dampak Pariwisata pada program studi Destinasi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.

Dalam proses penulisan, penulis banyak mendapat mendapatkan bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam segala aspek dalam proses penulisan modul ini. Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Kaprodi DPW dan Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala masukan, saran, dan kritik diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya semoga buku sederhana ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah terkait.

Denpasar, 10 Oktober 2017

Nyoman Sunarta
Nyoman Sukma Arida

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ v

BAB I Definisi, Konsep, dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan ~ 1

1.1 Pendahuluan ~ 1

1.2 Definisi, Konsep, Dan Prinsip ~ 1

1.3 Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan ~ 6

1.4. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan
~ 8

1.5 Mass Tourism Vs Sustainable Tourism ~ 16

BAB II Paradigma Perencanaan dan Kebijakan Pariwisata Indonesia ~ 27

2.1 Pendahuluan ~ 27

2.2 Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan ~ 28

2.3 Pengertian Paradigma dan Perencanaan ~ 29

2.4 Dinamika Perencanaan dan Kebijakan Pariwisata
Indonesia ~ 31

2.5 Analisis Implementasi Paradigma ~ 45

2.6 Kesimpulan ~ 46

BAB III Ekowisata ~ 49

3.1 Pendahuluan ~ 49

3.2 Pergeseran Selera Wisatawan ~ 51

3.3 Definisi dan Konsep Ekowisata ~ 56

3.4 Prinsip-Prinsip Ekowisata ~

3.5 Strategi dan Tujuan Pengembangan Ekowisata
Indonesia ~ 59

BAB IV Problematika Pariwisata Pantai ~ 59

- 4.1 Kearifan Lokal Bali dalam Memandang Laut ~ 63
- 4.2 Problematika Pariwisata di Daerah Pesisir ~ 64
- 4.3 *Community Based Tourism* ~ 68
- 4.4 Strategi ke Depan ~ 73

BAB V Kriteria Desa Wisata sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata ~ 71

- 5.1 Pendekatan Pengembangan ~ 72
- 5.2 Konsep dan Prinsip Dasar Desa Wisata ~ 74
- 5.3 Kriteria-Kriteria Desa Wisata ~ 77
- 5.4 Contoh Kasus: Verifikasi Desa Wisata Gianyar ~ 83
- 5.5 Kesimpulan ~ 85

BAB VI Konflik dalam Pengembangan Pariwisata ~ 87

- 6.1 Pendahuluan ~ 87
- 6.2 Bali Dalam Pusaran Konflik Pariwisata ~ 87
- 6.3 Konflik Pariwisata ~ 89
- 6.4 Kasus-Kasus Relasi Desa Dengan Investor ~ 91
- 6.5 Akar Persoalan Relasi Desa dengan Investor ~ 107
- 6.6 Tipologi Relasi Desa dengan Investor ~ 114
- 6.7 Super Power Masyarakat Lokal ~ 120

BAB VII Dampak Lingkungan Pembangunan Pariwisata ~ 123

- 7.1 Pendahuluan ~ 123
- 7.2 Kasus-Kasus Abrasi di Pesisir Gianyar, Bali ~ 125
- 7.3 Penanganan Masalah Abrasi Pantai ~ 130

BAB VIII Indikator Keberhasilan Pembangunan Ke-pariwisataan Nasional ~ 137

- 8.1 Pendahuluan ~ 137
- 8.2 Dampak dari Pengembangan Pariwisata ~ 137
- 8.3 Dasar Pemikiran ~ 140

**BAB IX PENGELOLAAN WISATA ALAM BERBASIS
DANAU ~ 147**

- 9.1 Pendahuluan ~ 147
- 9.2 Identifikasi *Stakeholders* Pariwisata di Kawasan ~ 149
- 9.3 Pola Relasi antara Aktor dengan Ketiga Danau Berbasis
Tiga Jenis Penafsiran ~ 153
- 9.4 Implikasi atas Pola Relasi Aktor-Danau ~ 155
- 9.5 Simpulan dan Saran ~ 157

Daftar Pustaka ~ 149

Indeks ~ 163

Tentang Penulis ~ 166

BAB I

KONSEP DAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1.1 Pendahuluan

Bab pertama dari buku ini menjelaskan definisi, konsep, dan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah kode etik yang telah berlaku universal. Pembangunan berkelanjutan merupakan dasar munculnya paradigma dan gerakan pariwisata berkelanjutan, sebagaimana yang juga melanda sektor-sektor pembangunan lainnya di banyak negara di belahan dunia. Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan dapat memahami konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Demikian juga, diharapkan pembaca bisa memahami mengapa prinsip dan konsep pariwisata berkelanjutan akhirnya muncul akibat berbagai praktik pengembangan pariwisata massal.

1.2 Definisi, Konsep, dan Prinsip

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Praktik pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan yaitu bagaimana menemukan cara meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga sumber daya alam dapat dilindungi dan kebutuhan generasi mendatang tetap bisa terpenuhi.

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul ketika terjadi 'kegagalan' pembangunan, dimana proses yang terjadi bersifat *top-down* (arus informasi yang terjadi hanya satu arah

dari atas ke bawah) dan jika ditinjau dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi proses pembangunan yang terjadi ternyata tidak berkelanjutan. Pelaksanaan konsep ini diperkuat lagi dengan kesepakatan para pemimpin bangsa yang dinyatakan dalam hasil-hasil negosiasi internasional, antara lain Deklarasi Rio pada KTT Bumi di Brazil pada tahun 1992, Deklarasi Milenium PBB tahun 2000, dan Deklarasi Johannesburg pada KTT Bumi tahun 2002.

Ada dua hal lain yang digunakan untuk melihat apakah sebuah bentuk pembangunan tergolong pembangunan yang berkelanjutan, yaitu analisis dampak lingkungan atau amdal dan partisipasi publik. **Pembangunan berkelanjutan** adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (Brundtland Report PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep “pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Menurut Sharpley (2000:2), konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan kolaborasi dari kata Inggris, “*development*” (pembangunan) dan,

“*sustainability*” (berkelanjutan). Salah satu pihak yang memberikan rumusan konseptual tentang hal itu adalah *World Commissions for Environmental and Development (WCED)*. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan adalah: pembangunan yang menjamin pemenuhan kebutuhan setiap generasi dengan tanpa mengorbankan generasi selanjutnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan antar generasi itu, terdapat empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: (a) Kemampuan daya dukung ekosistem terhadap upaya pemenuhan kebutuhan; (b) Kemampuan melindungi dan melanjutkan kualitas kehidupan; (c) Jaminan dukungan sumber daya (manusia dan alam) di masa mendatang, dan (d) Sinergitas kebutuhan antar generasi secara berkelanjutan, (Baiquni, 2002:35). Secara teoritik, sinergisitas dan integrasi dari semua elemen ini harus terjadi sejak masa perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, sampai penerapan kebijakan. Disinilah letak aspek terpenting dari nilai pembangunan berkelanjutan tersebut.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan implementasi dari semua komponen di atas pada objek dan subjek pariwisata. Menurut *Federation of Nature and National Parks*, (1993) penyatuan komponen tersebut, atau dikatakannya sebagai pembangunan pariwisata berkelanjutan, didefinisikan sebagai: bentuk aktivitas integrative dari pembangunan, pengelolaan, dan aktivitas pariwisata. Integratif ini dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya sumber daya alam dan budaya, kemudian integritas lingkungan, sosial, dan ekonomi secara konsisten, untuk tujuan kesejahteraan dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan.

Definisi seperti ini dipertegas lagi dalam Piagam Agenda 21 yang mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai :

... meets the needs of present tourist and host regions while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading

to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support system (Insula, 1995).

Secara substansi definisi ini juga selaras dengan isi piagam pariwisata berkelanjutan yang menekankan, bahwa: pariwisata harus didasarkan pada kriteria yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata harus didukung daya dukung ekologis yang berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip ekonomi, azas keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Mandat serupa juga terungkap dan ditekankan dalam pertemuan-pertemuan tingkat dunia seperti: WTO (*World Tourism Organisation*) dan Agenda 21 tersebut.

Berdasarkan mandat dan konsensus-konsensus mereka, pada akhirnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, ditetapkan berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Syarat dan kriteria tersebut diantaranya

1. Secara ekologi berkelanjutan, yaitu: pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata.
2. Secara sosial dapat diterima, yaitu: mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial.
3. Secara kultural bersifat adaptif, artinya: masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (*tourist culture*).

4. Secara ekonomis menguntungkan, artinya: keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan sejarah pembangunan pariwisata mencatat, bahwa sangat sulit mewujudkan persyaratan tersebut. Pada kenyataannya, banyak pembangunan pariwisata yang jauh dari mandat dan syarat berkelanjutan tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah pembangunan pariwisata Bali. Menurut kajian Manuaba (2006), pembangunan pariwisata Bali justru menghasilkan efek yang kontraproduktif dengan syarat *sustainability* tersebut. Menurutnya pembangunan pariwisata Bali telah menghasilkan enam ciri pokok yang mengancam terwujudnya pariwisata yang *sustainability* tersebut. Keenam ciri pokok tersebut adalah: dalam pembangunan pariwisata Bali; (1) Telah terjadi persaingan penggunaan sumberdaya yang terbatas; (2) Penekanan terhadap lingkungan secara eksploitatif; (3) Kesenjangan ekonomi antar wilayah yang membesar; (4) Dislokasi kultural; (5) Rendahnya koordinasi manajemen; dan (6) Terbatasnya permodalan lokal yang dibarengi dengan semakin tergantungnya pada investasi asing. Kondisi ini, selain menjadi permasalahan bagi Bali, juga menjadi permasalahan bagi terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di atas.

Berkembangnya wacana spirit pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam perkembangan berikutnya diikuti oleh bermunculannya bentuk-bentuk pengembangan pariwisata alternatif yang dicirikan oleh sekurang-kurangnya tiga hal; (1) memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat setempat, (2) berbasis alam serta budaya, dan (3) berskala kecil dalam pengembangannya. Hal ini menjadi antithesa terhadap bentuk pengembangan pariwisata konvensional (*mass tourism*) yang cenderung rakus sumber daya alam dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

Sementara, dari kaca mata ahli pemasaran (Ali Hasan, 2015) menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah model pariwisata yang menciptakan dampak negatif paling minim terhadap lingkungan dan budaya lokal, serta mampu menghasilkan pekerjaan bagi masyarakat setempat di masa depan. Pilar-pilarnya terdiri dari integritas lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi

1.3 Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan

“Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai ‘resep’ pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Model perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dirancang untuk menjawab tantangan perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dengan mendasarkan dan mempertimbangkan kedua kekuatan yang ada, baik lembaga tradisional maupun pemerintah. Apabila model perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di tingkat desa berhasil diwujudkan dengan baik, maka dapat

diharapkan bahwa proses pemberdayaan kelembagaan akan menjalar kearah unit kelembagaan perencanaan lainnya yang lebih tinggi, misalnya Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi maupun Nasional.

Model perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan ini akan dapat membantu, dan manajemen pemenuhan kebutuhan dasar yang didahulukan, bagi anggota masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dan model ini juga menjamin partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan rencana, pelaksanaan serta memonitoring hasilnya. Model ini juga berarti memperhitungkan kelompok mayoritas penduduk pedesaan, seperti petani, wanita serta tenaga kasar/tukang, sebagai kelompok yang terabaikan. Lebih dari itu, model ini juga memasyarakatkan bahwa filosofi dan pemikiran tradisional seperti mensucikan sumber-sumber air, Tri Hita Karana dan Desa Kala Patra harus dapat dijadikan pegangan dan dapat memainkan peran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menerapkan teori / konsep perencanaan khususnya di Bali. Penerapan teori perencanaan harus juga mempertimbangkan keunikan masing-masing masyarakat dan kebudayaanya.

Disadari bahwa, proses perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan pelaksanaannya memerlukan komitmen dari kemauan politis pemerintah serta upaya yang dititik beratkan pada niat untuk saling melengkapi antara lembaga tradisional dengan pemerintah. Keberhasilan membuat sumber daya air menjadi berkelanjutan akan ditentukan oleh kesungguhan dari masing-masing partisipan. Para partisipan perlu mewujudkan kerjasama dan interkasi diantara yang terlibat. Masing-masing pihak yang terlibat perlu belajar dan menghargai kebiasaan dan praktik kerja sehari-hari baik lembaga tradisional maupun pemerintah. Dengan demikian, air sebagai sumber kehidupan dapat lestari dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

1.4. Prinsip-prinsip Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan

Prinsip-prinsip ini merupakan prasyarat dan berperan sebagai pedoman dasar yang berfokus pada etika Pariwisata Berkelanjutan dan Pariwisata Bertanggung jawab yang perlu ditaati oleh setiap destinasi maupun organisasi Pariwisata lainnya. Dalam hal ini masyarakat dipersyaratkan untuk: Mampu mengendalikan, mengontrol pembangunan pariwisata melalui keterlibatannya secara langsung dalam penyusunan visi pembangunan pariwisata; Menemukenali sumber daya untuk dipelihara dan dilestarikan; Menetapkan sasaran dan strategi baik untuk pembangunan maupun management pariwisata; dan berperan serta dalam pelaksanaan/implementasi dari strategi yang telah ditetapkan, demikian juga dalam pengurusan operasional sarana Infrastruktur, pelayanan dan fasilitas pariwisata.

Pembangunan Pariwisata harus mampu menciptakan lapangan kerja yang bermutu. Adapun pemenuhan terciptanya lapangan kerja bermutu sebagaimana dimaksud merupakan bagian integral dari pembangunan Pariwisata. Bagian dari proses keberhasilan mencapai lapangan kerja bermutu tersebut adalah upaya untuk menjamin bahwasanya sebanyak mungkin sarana Pariwisata seperti hotel, restoran, toko dll, mampu dikembangkan dan dikelola oleh penduduk lokal (setempat). Pengalaman selama ini secara nyata membuktikan betapa pentingnya penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat, untuk memperlancar timbulnya akses menuju kemandirian membiayai usaha lokal.

Distribusi secara meluas dari manfaat Pariwisata terjadi pada tingkat destinasi Pariwisata. Hubungan antar usaha lokal dan peran serta penduduk setempat dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasian sumber daya dan pelayanan Pariwisata sangat membantu bahkan menjamin bahwasanya distribusi manfaat Pariwisata yang lebih adil dan berimbang akan mampu dilaksanakan antara penduduk setempat,

pengunjung (wisatawan) dan penyedia pelayanan.

Wawasan melihat jauh kedepan merupakan persyaratan bagi organisasi pengelolaan destinasi Pariwisata untuk menjamin bahwasanya pembangunan destinasi tidak dimanfaatkan untuk meraih keuntungan jangka pendek. Hal ini akan berakibat pada ditinggalkannya destinasi hanya karena selera wisatawan maupun kepentingan business telah berubah sehingga secara leluasa menentukan pilihan pada destinasi lain. Wawasan melihat jauh kedepan mendorong diterapkannya strategi proaktif yang pada gilirannya menjamin terwujudnya pembangunan destinasi secara berkelanjutan, demikian juga pengukuhan hubungan antara pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lokal sepanjang masa.

Dipersyaratkan adanya keserasian antara kebutuhan wisatawan, tempat dan masyarakat, yang dimudahkan oleh dukungan para pemangku kepentingan secara meluas yang mengarah pada keseimbangan yang layak dan sesuai antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan. Lebih dari itu adanya pengakuan terhadap pentingnya kerjasama antar pemerintah, masyarakat sebagai tuan rumah, demikian pula industri Pariwisata, lembaga - lembaga komersil yang terlibat dalam pembinaan masyarakat dan perlindungan/ pelestarian lingkungan hidup.

Koordinasi yang lebih erat pada tingkat kebijaksanaan dan pelaksanaan antara berbagai perwakilan Pariwisata yang terlibat dan antara pemerintah pada tingkat-tingkat yang berbeda. Penyediaan sarana seperti Transportasi, parkir dan kapasitas air dan limbah (*water and sewer capacities*) perlu dipertimbangkan dalam kaitan dengan perencanaan dan pembangunan pariwisata.

Dirasakan sangat perlu adanya penilaian terhadap dampak untuk setiap pembangunan Pariwisata. Kapasitas lokasi perlu dipertimbangkan termasuk ambang batas fisik, alam, sosial dan kebudayaan dan bahwasanya pembangunan

Pariwisata harus harmonis dengan ambang batas sumber daya lokal dan lingkungan. Rencana dan operasi (pelaksanaan) perlu dievaluasi secara reguler dengan penyesuaian-penyesuaian dimana perlu sebagaimana dipersyaratkan.

Pedoman-pedoman perlu ditetapkan untuk operasi dibidang Pariwisata termasuk persyaratan tentang penilaian dampak (*impact assessment*). Juga dipersyaratkan penetapan *Code of Practice* yang berlaku bagi Pariwisata pada semua tingkat, nasional, regional, dan lokal. Selain daripada itu juga dirasakan perlu untuk menetapkan indikator - indikator dan ambang batas untuk mengukur dampak maupun keberhasilan untuk usaha pariwisata lokal.

Dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan skala maupun ragam fasilitas pariwisata harus mampu mencerminkan toleransi ambang batas yang dapat diterima sumber daya pariwisata. Fasilitas berskala kecil dan berdampak ringan/rendah (*small scale low impact*) harus dipicu pembangunannya melalui pemberian insentif dan cara pembayaran yang sesuai. Proses Pariwisata harus juga menjamin bahwasannya warisan budaya dan lingkungan harus dipelihara kelestariannya dan ditingkatkan sesuai dengan Criteria dan Standard Internasional.

Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Dalam pengungkapan yang lebih sederhana, dijelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan ialah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, ia mestinya mengandung upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sumber daya secara berkelanjutan.

Gunn (1988), mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang harus dilihat dari dua sisi yakni sisi permintaan (*demand side*) dan sisi pasokan (*supply side*). Dalam konteks pengertian tersebut, Gunn menyadari bahwa keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat tergantung kepada kemampuan perencana dalam mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan pariwisata. Dari sisi permintaan isalnya, harus dapat diidentifikasi segmen-segmen pasar yang potensial bagi daerah yang bersangkutan dan faktor-faktor yang menjadi daya tarik bagi daerah tujuan wisata yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan penelitian pasar dengan memanfaatkan alat-alat statistik multivariate tingkat lanjut, sehingga untuk masing-masing segmen pasar yang sudah teridentifikasi dapat dirancang strategi produk dan layanan yang sesuai.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Beeho dan Prentice (1996) khususnya untuk pengembangan produk wisata (*tourim product development*). Pada hakekatnya dinamika pada kedua sisi pariwisata dimaksud dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal di masing-masing negara atau daerah asal wisatawan maupun di negara-negara atau daerah yang menjadi tujuan kunjungannya. Gejala ini selanjutnya membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja daerah tujuan wisata yang menjadi tuan rumah. Untuk menghindari timbulnya dampak yang merugikan dari dinamika dimaksud, masing-masing negara atau daerah tujuan wisata perlu secepatnya mengambil langkah-langkah penyesuaian terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis yang dihadapi, baik pada tingkat nasional maupun daerah, bahkan sampai ke tingkat fungsional di bidang perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata bersangkutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai 'resep' pembangunan terbaik, termasuk dalam pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan Para Pelaku (*Stakeholder Involvement*)

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan Sumber daya yang berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/ perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang

pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Mekanisme pembangunan secara keseluruhan yang berlangsung pada suatu kawasan dalam suatu wilayah tertentu selalu akan memiliki pengaruh terhadap wilayah yang melingkupinya baik yang berupa efek langsung (*direct effect*), efek tak langsung (*indirect effect*) dan efek ikutan (*induced effect*). Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan serta arahan dan program-program implementasi yang direkomendasikan akan bertumpu pada tatanan:

- a. Layak secara ekonomi (*economically viable*)
- b. Berwawasan lingkungan (*environmentally viable*)
- c. Diterima secara sosial (*socially acceptable*)
- d. Dapat diterapkan secara teknologis (*tecnologically appropriate*).

Pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan menghendaki ketaatan pada *azas-azas perencanaan*, antara lain:

- a. Prinsip pengembangan pariwisata yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi ke depan (jangka panjang).
- b. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal.
- c. Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang tidak

- merusak tapi lestari.
- d. Kesesuaian antara kegiatan pengembangan pariwisata dengan skala, kondisi dan karakter suatu kawasan yang akan dikembangkan.
 - e. Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan *audience* pariwisata, lingkungan hidup dan masyarakat lokal dengan bermuara pada pengembangan apresiasi yang lebih peka pada warisan budaya, lingkungan hidup dan jati diri bangsa dan agama.
 - f. Antisipasi yang tepat dan monitoring terhadap proses perubahan yang terjadi akibat program seni budaya dan berorientasi pada memperkuat potensi lokal dan kemampuan masyarakat sekitar.

1.5 Mass Tourism Vs Sustainable Tourism

Tantangan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata yang tengah berkembang di dunia secara umum bisa dijelaskan seperti dua kotak besar. Kotak besar pertama yaitu pariwisata massal yang selama ini dilihat dan berkembang. Wisatawan didatangkan sebanyak-banyaknya ke suatu daerah. Sebagian besar sumber daya alam yang ada (air, tanah, view, ruang, atmosfer) dan budaya dikomersialisasikan besar-besaran tanpa memperhatikan aspek kelestariannya. Nilai edukasi tidak diperhatikan baik bagi wisatawan sebagai tamu (*guest*) maupun penyedia sebagai tuan rumah (*host*). Corak pariwisata massal ini dalam perkembangannya terbukti membawa banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya baik bagi masyarakat lokal, kelestarian alam dan budaya, hingga bagi ekonomi masyarakat lokal.

Kotak besar kedua yang beberapa tahun terakhir ini baru berkembang cukup pesat adalah pariwisata alternatif. Berkembangnya pariwisata alternatif ini merupakan reaksi dari munculnya dampak negatif pariwisata massal. Sehingga

keberadaan pariwisata alternatif ini cenderung lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal baik dari segi budaya, ekonomi dan edukasi, hingga meminimalisir dampak negatif perkembangan pariwisata. Selain itu pariwisata alternatif juga memberikan nilai edukasi bagi wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata.

Kemudian, hasil-hasil studi yang berkembang menunjukkan bahwa pariwisata harus memiliki konsep keberlanjutan. Maksudnya pariwisata tidak hanya berhenti pada satu titik, tapi terus menerus berputar seperti sebuah siklus, meregenerasikan dirinya, dan semakin berkembang lebih baik. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mementingkan kepentingan generasi saat ini tanpa melupakan kepentingan generasi masa depan. Maksudnya generasi masa kini dan generasi masa depan kebutuhannya harus sama-sama terpenuhi. Kondisi alam harus sama-sama lestari, eksistensi budaya lokal harus sama lestari, serta edukasi bagi masyarakat lokal dalam interaksinya dengan tamu juga harus sama pentingnya untuk dilestarikan.

Pariwisata berkelanjutan melibatkan masyarakat sebagai salah satu pelaku utamanya dan mengutamakan kelestarian sumber daya. Hal ini kemudian dikenal dengan konsep *sustainable tourism* (Indonesia: pariwisata berkelanjutan). Payung besar pariwisata berkelanjutan ini kemudian berelasi dan membawahi kotak besar pariwisata alternatif yang kemudian terwujud dalam beberapa konsep. Konsep-konsep pengembangan pariwisata alternatif dalam wujud ekowisata (*ecotourism*) yang menitikberatkan pada kelestarian ekosistem dan berbasis masyarakat lokal sebagai aktor utama, dimana kegiatan pariwisatanya merupakan kegiatan yang bertanggung jawab (*responsible tourism*).

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan pandangan atas dampak pengembangan kepariwisataan bagi negara yang dikunjungi. Pariwisata massal dipandang sebagai

memiliki peluang menimbulkan degradasi bahkan destruksi atas lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan budaya dan sosial, di samping dampak positif pada kehidupan ekonomi negara dan bangsa yang dikunjungnya.

Sebagai upaya meredam dampak negatif itu, berbagai negara berupaya mengembangkan pariwisata berkualitas, dalam arti menyelenggarakan kepariwisataannya dengan menawarkan perjalanan wisata eksklusif, alternatif dan sebangsanya yang tidak bersifat massal. Berbagai negara di dunia kemudian berupaya mengubah arah pengembangan kepariwisataannya dari *mass tourism* ke arah "Pariwisata Berkualitas" (*quality tourism*), di mana *quality tourism* diyakini bisa lebih bermanfaat tidak saja bagi kehidupan ekonomi negara dan bangsa, namun juga bermanfaat dalam hal kemajuan masyarakat secara utuh dan sinambung, berkelanjutan untuk masa yang sangat panjang (*sustainable*), atau bahkan tak terbatas waktu, baik dalam hal kesejahteraan ekonomi, maupun kehidupan sosial budayanya. Keterlambatan mengubah arah dari *mass tourism* ke *quality tourism* akan semakin sukar dilakukan, mengingat kondisi dan situasinya yang dihadapkan pada persaingan yang datang dari destinasi wisata murah dan asri di satu sisi dengan destinasi di sisi lain yang merupakan peninggalan pengembangan berlebihan selama puluhan tahun sebelumnya.

Kekeliruan pola pikir dan prinsip pengelolaan pariwisata yang masih perlu dibenahi saat ini adalah: Berapa banyak wisatawan yang bisa ditarik ke suatu daerah tujuan wisata (destinasi)? serta pelayanan dan fasilitas berstandar seperti apa yang wisatawan inginkan? Membicarakan kedua hal penting ini tentu akan berkaitan dengan banyak hal. Saat membicarakan berapa banyak wisatawan yang bisa ditarik untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata, tentu kita juga turut membicarakan sisi perekonomian daerah. Pariwisata yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar atas

pemasukan daerah tentu dalam pengelolaan daerah tujuan wisata yang diutamakan adalah menarik jumlah wisatawan sebanyak mungkin. Banyak wisatawan yang datang, maka pemasukan semakin tinggi.

Namun kesalahan fatal yang sering kali terabaikan atau sengaja tidak diperhatikan adalah kapasitas penerimaan wisatawan di suatu daerah. Berapa maksimal daerah tujuan wisata tersebut bisa menampung kunjungan wisatawan dalam periode tertentu. Sebab hal ini akan berdampak pada kelestarian sumber daya di daerah yang dijadikan daya tarik wisata.

Kemudian hal yang sering terabaikan adalah bagaimana target pasar yang tepat untuk daerah tujuan wisata tersebut? Tidak semua wisatawan yang dapat berkunjung ke suatu destinasi wisata dapat dikatakan wisatawan yang potensial dan berkualitas. Dalam hal ini wisatawan berkualitas maksudnya adalah wisatawan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat lokal yang mampu dan mau mengeluarkan uangnya di destinasi wisata.

Apabila kedua hal tersebut sudah dirancang dengan tepat baik dari jumlah kapasitas kunjungan wisatawan terkait daya tampung daerah dalam periode tertentu serta target pasar terkait wisatawan yang berkualitas dan potensial, maka hal lain yang harus diperbaiki adalah terkait penyediaan pelayanan dan fasilitas wisata. Pariwisata sebagai salah satu industri jasa besar atau yang dikenal dengan industri jasa keramahtamahan (*hospitality industry*) terkait erat dengan pelayanan dan penyediaan fasilitas. Keramahtamahan yang diutamakan sebagai jasa yang dijual harus mengutamakan servis atau pelayanan yang profesional. Baik dalam taraf sederhana maupun pemberian layanan jasa harus tetap profesional dan sesuai etika yang baik. Bukan pelayanan yang seadanya tanpa memperhatikan etika pelayanan jasa. Karena wisatawan yang berkunjung menginginkan pengalaman

yang berbeda dari tempat asalnya, misalnya; bagaimana cara memberikan salam yang baik dan menggambarkan citra warga lokal yang berbudaya positif.

Pariwisata Alternatif: Pariwisata Skala Kecil

Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk kegiatan kepariwisataan yang tidak merusak lingkungan, berpihak pada ekologis dan menghindari dampak negatif dari pembangunan pariwisata berskala besar yang dijalankan pada suatu area yang tidak terlalu cepat pembangunannya. (Koslowskidan Travis: 1985). Merujuk dari pengertian menurut ahli tersebut, maka pariwisata alternatif adalah pariwisata yang muncul guna meminimalisir dampak negatif dari perkembangan pariwisata masal yang terjadi hingga saat ini. Dampak negatif dari pariwisata masal atau pariwisata berskala besar adalah ancaman terhadap kelestarian budaya dimana budaya lebih dikomersialisasikan dibandingkan dijaga keaslian dan kelestariannya. Selain itu dampak negatif yang dapat berbahaya adalah perusakan sumber daya alam dimana sumber daya alam habis dieksploitasi besar-besaran.

Selain itu pariwisata alternatif adalah kegiatan kepariwisataan yang memiliki gagasan yang mengandung arti sebagai suatu pembangunan yang berskala kecil atau juga sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang disuguhkan kepada wisatawan, dimana segala aktivitasnya turut melibatkan masyarakat. (Saglio: 1979 dan Gonsalves: 1984). Jadi, bisa disimpulkan pembangunan pariwisata yang baik dan mendukung kelestarian sumber daya baik alam, budaya dan manusia adalah pariwisata alternatif.

KASUS:**Taman Nasional Ujung Kulon**

MISI utama penetapan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai warisan alam dunia (the natural world heritage site) antara lain untuk menghindarkan badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dari kepunahan. Oleh karena itu, seluruh pengelolaan kawasan TNUK harus mengacu pada misi tersebut. Potensi berupa kekayaan flora dan fauna di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada dasarnya tidak haram untuk dimanfaatkan. Namun, langkah-langkah eksploitasi itu harus selaras dengan misi di atas, yakni konservasi alam dan lingkungan. Satu model eksploitasi yang kini tengah dirancang Balai TNUK adalah ekowisata.

Sebuah model pemanfaatan alam untuk kegiatan wisata berbasis lingkungan. Hasilnya, jika pengembangan ekowisata berjalan, seperti bunyi pepatah, “sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui”. Di satu sisi misi konservasi terpenuhi, di sisi lain manfaat ekonomis bisa diperoleh.

Dalam hal ini, kawasan TNUK sangat potensial untuk pengembangan ekowisata. Ada sekitar 33 tempat potensial yang bisa dimanfaatkan untuk obyek ekowisata. Sebanyak 10-15 tempat di antaranya kini sudah menjadi obyek wisata. Sebutlah, misalnya, Pulau Peucang, padang penggembalaan (*grazing ground*) di Cidaun, Cibom, Tanjung Layar, Pulau Panaitan, Sungai Cigenter, jalur selatan Karang Ranjang-Cibandawoh-Cibunar-Cidaun untuk trekking, wisata ziarah di Sanghiang Sirah, Pulau Handeuleum, dan air panas Cibiuk.

Potensi alam tersebut menawarkan berbagai alternatif jenis wisata. Seperti yang selama ini ditawarkan Balai TNUK, bentuk wisata di darat meliputi penjelajahan (trekking), fotografi (photo hunting), menikmati burung (bird watching), dan pengamatan kehidupan satwa liar.

Untuk wisata bahari, bentuk yang difasilitasi seperti menyelam (diving), snorkeling, berselancar (surfing),

mendayung (canoing), memancing, dan rekreasi pantai. Dalam hal potensi selancar, perairan Pulau Panaitan disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga tempat terbaik di dunia untuk hobi itu. Semua potensi tersebut jika dikembangkan dengan tepat akan menghasilkan pundi-pundi uang tanpa merusak alam.

Kepala Balai TNUK M Awriya Ibrahim memaparkan, pengembangan ekowisata di Ujung Kulon tidak terlepas dari cita-cita untuk mendapatkan dana yang berkesinambungan (*sustainable funding*). Selama ini pengelolaan kawasan TNUK masih mengandalkan dana dari pemerintah dan bantuan dari luar negeri. Pengelolaan yang selama ini dilakukan Balai TNUK adalah pengelolaan badak jawa, pengelolaan primata, pengelolaan perairan laut, pengelolaan daerah penyangga, dan pengelolaan wisata.

“Dengan *sustainable funding* dari ekowisata, kita bisa melakukan pengelolaan taman nasional,” paparnya. Berbagai program pengelolaan tersebut hingga kini belum berjalan optimal akibat keterbatasan dana. Pengelolaan badak jawa melalui sensus, misalnya, hanya bisa digelar setahun sekali. Idealnya, sensus badak itu dilakukan tiga kali dalam setahun. Menurut peneliti di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Moh Ali Fadillah, pemanfaatan alam di kawasan TNUK hanya tepat jika dilakukan melalui ekowisata. “Hanya dengan ekowisata itu pemanfaatan alam tidak meninggalkan dampak lingkungan dan bisa diperbaharui terus-menerus,” ujarnya.

Pengelolaan wisata pun belum maksimal. Awriya mengakui, banyak dari tempat-tempat potensial itu belum tergarap karena keterbatasan dana. Ia mencontohkan Pulau Panaitan yang sampai sekarang belum dilengkapi dermaga. Kurang maksimalnya pengelolaan juga membuat banyaknya potensi wisatawan yang hilang. Diperkirakan, hilangnya potensi wisatawan itu mencapai empat kali lipat dari angka kunjungan riil. Awriya menyebutkan, kunjungan wisatawan ke TNUK setahun terakhir mencapai 4.500 orang. Hilangnya potensi wisatawan itu terjadi akibat banyaknya pintu masuk

ke TNUK sehingga banyak pula pengunjung yang lolos tanpa bisa dikontrol. Akses perjalanan ke kawasan TNUK nyaris tersebar di sepanjang pantai barat wilayah Banten. “Bahkan, dari Ancol (Jakarta-Red) pun bisa masuk ke Panaitan,” kata Awriya.

Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi penyebab lain dari rendahnya kunjungan wisatawan. Kepala Resor Wisata Pulau Peucang Suhaeli mengungkapkan, sebelum krisis ekonomi, angka kunjungan wisata ke Pulau Peucang rata-rata 600 orang per bulan. “Tetapi, setelah krisis cukup berat, hanya antara 10-20 orang per bulan,” ungkapnya.

Dari sisi kepentingan konservasi, semakin sedikit kunjungan boleh jadi akan semakin baik sebab akan semakin kecil pula dampak terhadap alam yang mungkin timbul akibat kunjungan wisata. Akan tetapi, ketika pengelolaan TNUK membutuhkan dana yang terus mengucur, tidak ada jalan lain kecuali mengoptimalkan ekowisata. *Project Officer World Wide Fund for Nature (WWF) Ujung Kulon*, Aji Santoso optimistis, hasil pengelolaan ekowisata yang tepat akan mampu menutup biaya pengelolaan TNUK secara keseluruhan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan masyarakat sekitar kawasan TNUK dalam pengembangan ekowisata merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Pelibatan masyarakat dalam ekowisata di Ujung Kulon merupakan bagian dari langkah konservasi badak terpadu (*an integrated rhyno conservation*). Strategi itu akan melengkapi pemberdayaan masyarakat yang sudah berlangsung, baik oleh Balai TNUK maupun LSM seperti WWF.

Konkretnya, masyarakat dilibatkan sebagai tenaga pemandu (*tour guide*), operator wisata, atau juga penyedia makanan. Menurut Aji, cukup realistis untuk mengandalkan biaya pengelolaan TNUK dari ekowisata. “Cuma belum terlihat adanya studi tentang berapa kapasitas yang bisa ditampung, kemampuan daya dukung, cashflow-nya, serta *break event*-nya,” ujarnya.

Pengembangan ekowisata sebaiknya mempertimbangkan fleksibilitas dalam akses. Alih-alih membatasi akses masuk ke kawasan TNUK dengan melalui satu pintu di kantor Balai TNUK Labuan, wisatawan mungkin lebih pas jika diberi keleluasaan memilih pintu masuk. Namun, langkah ini menuntut kesiapan administrasi di tiap-tiap pos jaga sebagai kepanjangan kantor Balai TNUK. "Terkecuali jika kunjungan itu untuk keperluan dokumentasi atau pengambilan gambar, hal itu tetap harus lewat satu pintu di Labuan," ujar Aji.

Satu hal lainnya yang penting dalam pengembangan ekowisata di TNUK adalah peran pemerintah daerah dan pihak swasta, seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (PHI), dan Asosiasi Perusahaan Biro Wisata (Asita). Menurut pemerhati wisata Banten, M Iwan Nitnet, peran birokrasi dan swasta dalam urusan pariwisata beberapa tahun terakhir nyaris tak terdengar. Kalaupun ada, peran itu sering tumpang tindih atau tidak ada koordinasi. Ia mencontohkan, buruknya sarana jalan ke Taman Jaya, Ujung Kulon, hingga kini belum ada upaya perbaikan.

"Dana-dana untuk promosi yang menjadi wewenang pemerintah provinsi akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki sarana jalan dulu. Hasilnya akan membuat pengunjung kecewa jika setelah promosi ternyata prasarana fisik itu tidak memadai," ungkap Iwan.

Pelibatan masyarakat sekitar kawasan TNUK sebagai bagian dari pengelolaan ekowisata seharusnya difasilitasi HPI atau Asita dengan memberikan pelatihan-pelatihan di bidang pariwisata. Pendek kata, upaya pengelolaan ekowisata sebagai alternatif pemanfaatan potensi alam TNUK memerlukan keterpaduan semua pihak. (SAM)

Sumber: www._____

BAB II

PARADIGMA PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA

2.1 Pendahuluan

Bab ini membahas isu-isu dinamika perencanaan dan kebijakan pariwisata di Indonesia, yang pada akhirnya memberikan warna terhadap pembangunan kepariwisataan nasional yang hadir dewasa ini. Isue perencanaan penting dibahas dalam konteks pembahasan pariwisata berkelanjutan karena jenis perencanaan yang dianut dalam mengawali pengembangan pariwisata di suatu kawasan akan sangat menentukan corak pembangunan pariwisata yang akan berkembang selanjutnya.

Secara garis besar, setelah mempelajari bab ini mahasiswa mengetahui dinamika perencanaan dan kebijakan pariwisata di Indonesia, yang pada akhirnya memberikan warna terhadap pembangunan kepariwisataan nasional. Tujuan ini dicapai dengan memahami perjalanan paradigma perencanaan dalam mengembangkan kepariwisataan dari masa ke masa, khususnya sejak awal jaman Orde Baru.

Perjalanan panjang perencanaan dan kebijakan pembangunan pariwisata Nasional sejak masa Orde Baru memperlihatkan kondisi pasang surut. Paradigma pembangunan pariwisata yang pada awalnya lebih mementingkan aspek ekonomi, secara bertahap berevolusi ke arah pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan lingkungan dan aspek kebudayaan. Dinamika ini dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata global yang tengah dilanda oleh isu lingkungan melalui jargon *sustainable tourism development*. Tak pelak perkembangan kebijakan pariwisata

Indonesia pun sedikit tidaknya mengarah kepada isu yang sama.

2.2 Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk di dalamnya di sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata.

Pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor non-migas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Negara. Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan UU No 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.

Namun pada implementasinya di lapangan, sisi perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan

kepariwisataan seringkali masih diabaikan. Tahapan perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang kurang bermanfaat karena hanya berkutat pada rumusan-rumusan teoritis dan tidak menyentuh masalah-masalah riil dalam pengelolaan kepariwisataan sehari-hari. Kebijakan pariwisata yang dirumuskan dalam segala level pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke kabupaten, seringkali hanya dilihat sebagai dokumen-dokumen yang tidak memiliki kekuatan apapun. Di tengah kondisi demikian, amat penting pemahaman tentang dinamika perencanaan dan kebijakan pariwisata Indonesia agar bisa menyusun perencanaan dan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

2.3 Pengertian Paradigma dan Perencanaan

Istilah paradigma dapat didefinisikan sebagai: “ *A set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principles...a world view that defines, for its holder, the nature of the ‘world’...* (Guba, dalam Denzin & Lincoln, 1994:107). Paradigma merupakan orientasi dasar untuk teori dan riset. Pada umumnya suatu paradigma keilmuan merupakan sistem keseluruhan dari tata urutan berpikir seorang ilmuwan. Paradigma terdiri dari asumsi dasar, teknik riset yang digunakan, dan contoh seperti apa seharusnya teknik riset yang baik (Newman, 1997:62-63). Filosofis dari proses riset termasuk asumsi, nilai, standard atau kriteria yang dipakai penelitian untuk menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Paradigma mencerminkan sistem keyakinan dasar atau sudut pandang yang menuntun peneliti selama proses penelitian. Ia menjadi sebuah frame yang dipergunakan peneliti untuk memandang permasalahan penelitian.

Sedangkan perencanaan adalah keseluruhan kegiatan dalam memecahkan masalah untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan bersama. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya melewati seleksi

optimasi alternative (Lewis Keeble ; 1978). Perencanaan dapat juga dikatakan sebagai sebuah disiplin untuk mengatur ruang dalam daerah perencanaan secara optimal agar interaksi antar setiap organ didalamnya berlangsung dengan harmonis, sehingga daerah perencanaan menjadi tempat kehidupan yang diinginkan. Adapun proses perencanaan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu : (1) pernyataan tujuan – tujuan / sasaran, (2) analisa struktur sistem dari permasalahan yang dihadapi, (3) evaluasi dan pemilihan penyesuaian atau pemecahan permasalahan, dan (4) rancangan dari pada prosedur tindakan.

Dengan demikian perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan tentang hari depan yang dikehendaki. Agar dapat mengambil keputusan yang tepat diperlukan informasi yang relevan, akurat dan kontekstual. Ketersediaan informasi menjadi semakin penting artinya di era informasi seperti sekarang ini, dimana segala sesuatunya berlangsung semakin cepat dan menjadi semakin kompleks. Dalam hubungannya dengan perencanaan pariwisata (*tourism planning*), ketersediaan informasi dari berbagai dimensi sangat diperlukan sebagai landasan pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar rencana-rencana yang dibuat dapat diimplementasikan dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Perencanaan merupakan suatu usaha pemikiran secara rasional, untuk mencapai kebutuhan baru di masa mendatang. Tiga faktor penting dalam perencanaan : (1) faktor waktu - masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, (2) faktor ruang yaitu masa pencapaian, dan (3) sumber – alat, modal, dan cara pencapaian. Terkait dengan ketiga faktor tersebut, perencanaan dilihat dalam dua dimensi, yaitu :

Pertama, perencanaan sebagai suatu rangkaian proses untuk mencapai sesuatu yang baik dimasa mendatang dengan mempertimbangkan kejadian – kejadian di masa lampau dan

kenyataan di masa kini. Disini, untuk mencapai saran dan tujuan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masa lalu serta kebutuhan permasalahan dan tuntutan pada masa kini kemudian dibuat proyeksi untuk kebutuhan dan tuntutan di masa mendatang yang ideal. Kecenderungan yang terjadi pada saat ini akan menjadi faktor pertimbangan untuk menentukan arah dan tujuan perkembangan di masa mendatang.

Kedua, perencanaan yang ditekankan semata - mata kepada sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang. Target di dasarkan pada keadaan masa kini serta proyeksi untuk meningkatkan keadaan sekarang kepada keadaan yang lebih baik di masa mendatang tanpa mempertimbangkan keuntungan apa yang telah diperoleh.

2.4 Dinamika Perencanaan dan Kebijakan Pariwisata Indonesia

2.4.1 Zaman Orde Baru (1969-1998)

Kebijakan pemerintahan Orba menetapkan Industri pariwisata (internasional) menjadi faktor penting dalam paradigma pembangunan (ekonomi) nasional dimulai sejak Repelita I (1969-1974), ditengah situasi stabilitas politik (1965), ekonomi dan keamanan nasional yang sedang mengalami krisis (kacau balau). Atas dukungan tenaga ahli dan terutama sekali bantuan dana dari Bank Dunia (pada 1968), IGGI (sejak 1966), dan IMF, maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bentukan pemerintah ORBA kala itu (1969) merancang strategi pembangunan Nasional lima tahunan dengan memasukkan pariwisata sebagai salah satu faktor dalam upaya memulihkan neraca pembayaran negara yang sedang mengalami defisit yang membahayakan (krisis ekonomi akut).

Selanjutnya Bappenas menyusun dasar-dasar kebijakan pariwisata Indonesia, secara lintas sektoral dan

departemen, dengan penanggungjawab langsung di bawah koordinasi Presiden, yang dibantu oleh Dewan Pertimbangan Kepariwisata Nasional (Depparnas). Dewan ini berada di bawah pimpinan Menteri Ekonomi dan Perindustrian, sedangkan Dirjen Pariwisata waktu itu berada di bawah pimpinan menteri Perhubungan yang kinerjanya dibantu oleh Badan Pengembangan Kepariwisata Nasional (Bapparnas), (Picard, 2006). Satu hal yang penting kala itu, adalah pilihan model paradigma pembangunan pariwisata Indonesia yang semuanya dirancang dan dirumuskan dari pemerintah pusat (*centralistic developmental approach*), atas masukan dan dukungan para konsultan ahli dari beberapa lembaga keuangan Dunia di atas. Persoalan pemerataan dan model pengembangan pariwisata Daerah di seluruh Nusantara, ditentukan berdasarkan model perencanaan dari model pembangunan pariwisata Bali, sebagaimana saran dan masukan dari para konsultan Indonesia (1968) dan asing kala itu (Checchi Reepport, 1958).

Setelah itu, paradigma perencanaan pembangunan pariwisata Indonesia ditancapkan dan menemukan jangkar kekokohnya pada paruh pertama (era 80-an) dan ke dua (era 90-an), bersamaan dengan keberhasilannya menggenjot sektor ini dalam menyumbangkan devisa negara terbesar (10% dari total nilai ekspor) setelah migas (19%) dan bahan-bahan kayu. Seperti disebutkan di atas, paradigma pembangunan pariwisata pada era ini (90-an) juga tidak jauh beda dengan awal mula pembentukannya bahkan semakin tegas buktinya, bahwa bentuk pendekatan paradigma pembangunan pariwisata nasional adalah *pembangunan pariwisata sentralistik (centralistic developmental approach of tourism)*, sebuah perencanaan pembangunan pariwisata yang prosesnya diinstruksikan dari atas (*top down*) dan tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat lokal (pemda, *stakeholders*) baik dalam menentukan pilihan, membuat perencanaan, maupun pengelolaan.

Sebaliknya mereka justru diberikan kewajiban untuk selalu mendukung, mendorong dan tidak jarang berkorban/dikorbankan demi kepentingan pariwisata, (Picard, 2006, Kementerian lingkungan Hidup dan UNDP, 2000).

Model pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan paradigma itu dikenal dengan *advocacy*, yaitu: pemerintah (pusat dan daerah) secara gencar meyakinkan dan mempromosikan pariwisata Indonesia ke pasar Internasional, dengan maksud memperoleh investor sebesar-besarnya, yang dengan begitu dampak keuntungan ekonomi yang tinggi, juga akan dapat diraih. Pada tingkat lokal dan nasional pemerintah mendorong dan meyakinkan kepada para pelaku industri ini, bila pariwisata akan mampu memberikan pendapatan negara dan daerah yang besar, lapangan kerja yang luas, serta efek-efek positif lain yang cukup tinggi. Pendek kata, implementasi paradigma kala itu, hanya dipertimbangkan dari keuntungan ekonomi, sedangkan persoalan lain seperti: kelestarian lingkungan, maupun sosial budaya sebagai penyokong penting industri ini, sama sekali, belum menjadi fokus perhatian.

Peringatan yang muncul kemudian adalah lahirnya beberapa persoalan seperti: persoalan lingkungan, kebocoran ekonomi, distorsi nilai-nilai budaya, dan semakin tersisihnya masyarakat lokal. Sederetan dampak nyata yang kemudian menyertai diantaranya dapat disebutkan di situ, seperti (1) terjadi kesenjangan (ketidaksetaraan) antara tuan rumah dengan tamunya, (2) ketidakseimbangan dalam perolehan manfaat, (3) terlampauinya ambang batas daya dukung lingkungan, (4) terdistorsinya nilai-nilai kebudayaan lokal, (5) tergesernya masyarakat lokal (secara sumber daya dan sumber produksi), dan (6) dalam konteks yang lebih besar, terjadinya ketergantungan kita (sebagai bagian dari ekonomi dunia ketiga) dengan kekuatan ekonomi pariwisata dunia pertama, (Picard, 2006). Lebih spesifik lagi, pada tingkat kultural, sebagaimana

yang dicatat oleh Michael Picard (2006:155) tentang problematik dampak sosial budaya pariwisata Bali, dikemukakan terdapat empat hal yang muncul akibat pertumbuhan pariwisata selama ini, yaitu: (1) terjadi pertentangan antara kepentingan nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai ekonomi; (2) terjadinya pertentangan antara masyarakat setempat dengan kepentingan ekonomi pariwisata internasional, (3) semakin terabaikannya komunitas dan kebudayaan lokal di daerah tujuan pariwisata; (3) kurang dilibatkannya partisipasi pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata (lokal dan nasional), dan (4) upaya-upaya penyelesaian terhadap semua persengketaan dan pertentangan tersebut pada akhirnya selalu diperhitungkan dari aspek untung rugi (ekonomi).

Kendati demikian, sederetan dampak dari adanya pertumbuhan penancapan paradigma pembangunan pariwisata di atas tidaklah sesporadis itu. Seperti dicatat oleh para penulis dan peneliti pariwisata Internasional, (Krapf, 1961, Sessa, 1970, Mc Kean, 1973, Picard, 2006) paradigma pariwisata seperti itu dalam perkembangannya tetap mampu membuktikan sebagai pemberi surplus ekonomi yang paling cepat, dan paling besar ke dalam negara-negara penerima wisatawan, dengan tetap memberi peluang besar bagi seluruh warisan kekayaan alam dan budaya yang bernilai wisata, menjadi aset yang mampu tumbuh dan memberi jasa keuntungan kepuasan maupun ekonomi bagi wisatawan maupun masyarakat penerimanya. Kekhawatiran tentang pariwisata dapat mengahcurkan pariwisata (dirinya sendiri) melalui peletakan paradigma seperti di atas, sejauh ini harus dikatakan sebagai kekhawatiran berlebih yang belum sepenuhnya menemukan realitas empirisnya. Sebaliknya, ketika paradigma itu (bersama komitmen pariwisata internasional di Indonesia) memasukkan warisan budaya dalam agenda ekspansi ekonominya, terlihat disitu (contoh pariwisata Bali) telah terjadi proses-proses pelestarian dan pengkayaan

warisan budaya lokal, karena budaya yang tumbuh dan bekerja dalam kepariwisataan tersebut, telah mampu memberikan kontribusi dana (uang) kepada pemerintah (negara), yang oleh pemerintah uang tersebut juga dikembalikan pemanfaatannya untuk mengelola dan melestarikan warisan budaya tersebut.

Di lain pihak, paradigma di atas juga telah mampu mendorong terjadinya proses pertukaran keuntungan, yaitu: keuntungan ekonomi bagi negara dan masyarakat penerima, dan keuntungan jasa (berupa kepuasan batin) beserta unsur-unsur budaya, bagi wisatawan. Pendek kata, paradigma di atas, sejauh ini telah mampu menumbuhkan keduanya, walaupun ditengah-tengah perjalanan mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, terdapat berbagai bentuk pujian dan gugatan. Oleh karena itulah jauh-jauh hari Sessa (1970: 117 dalam Picard, 2006:155) telah menulis, bahwa :

“Budaya dan ekonomi pariwisata, bukannya saling bertentangan, tetapi justru saling menyokong satu sama lain”.

Begitu juga dalam hal lingkungan, meskipun hasil yang dicapai tidak terlalu membawa keberlanjutan dampak yang maksimal. Lingkungan yang kini telah menjadi isu global dalam sektor pariwisata, pada era paradigma ini (*pembangunan sentralistik yang top down*) dalam perkembangannya memang belum menjadi lokus penting dalam paradigma kebijakan pembangunan pariwisata nasional. Sebaliknya, lingkungan cenderung lebih terabaikan karena desakan kebutuhan infrastruktur industri ini (akomodasi sarana-prasarana pariwisata) yang banyak memakan ruang ekologi dan lingkungan alam di sekitar objek-objek wisata. Akibatnya, multiplayer efek, seperti pencemaran lingkungan oleh limbah-limbah industri pariwisata, semakin terdesaknya lahan pertanian produktif, terpelanting dan termarginalisasinya kaum petani beserta sektor produksinya, semakin tahun

semakin melampaui limit ambang batasnya. Namun, sejalan dengan pencapaian industri ini dalam menyokong ekonomi daerah dan nasional, kekacauan lingkungan alam tersebut mulai diperhatikan dari keteracuhannya dalam kebijakan-kebijakan kepariwisataan. Hanya saja, dalam era paradigma ini, porsi penanganannya tidak sepadan dengan besaran nilai dollar yang bisa disumbangkan sektor ini dalam perbaikan ekonomi.

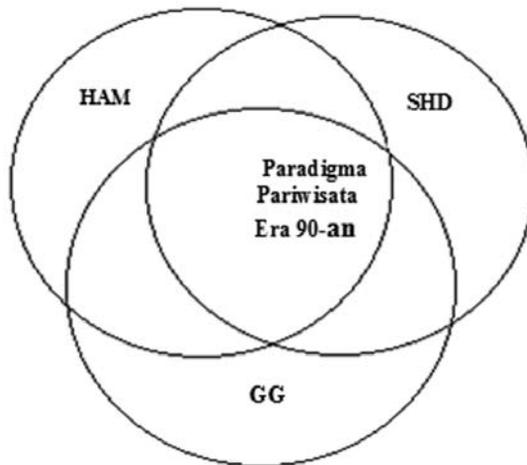
Meskipun begitu, sekiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa persoalan kerusakan lingkungan alam akibat pariwisata, sama sekali tidak diacuhkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan kepariwisataan di era ini. Walaupun dalam kenyataannya harus diakui pula, jika keuntungan ekonomi dalam industri ini jauh lebih dibesar-besarkan, sedangkan kerugian dalam bidang sosial budaya serta lingkungan alam cenderung dikecil-kecilkan. Meskipun kenyataan seperti ini sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh para ahli dan peneliti dibidang pariwisata sejak era 80-an, bersamaan dengan kritiknya terhadap daya serap sektor ini terhadap tenaga kerja yang cenderung eksklusif dan ekspansif. Dalam konteks seperti ini, penulis sepaham dengan kesimpulan para peneliti yang menyatakan bahwa :

“Secara garis besar dampak ekonomi pariwisata memang menguntungkan, sementara itu dampak sosial budaya sebagian besar tidak menguntungkan, sedangkan dampak terhadap lingkungan merupakan campuran keduanya”
(Mathison and Well, 1992 dalam Picard, 2006:157).

Jika sudah demikian, maka persoalan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan alam, perlu menjadi satu hal yang patut diperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Dan ini semua sudah mulai terlihat dalam perjalanan perkembangan kebijakan pariwisata (internasional) di Indonesia khususnya pada paruh kedua (era 90-an). Terlihat disitu prinsip

keberlanjutan (*sustainable*), telah menggeser paradigma lama yang *top down* sentralistik ke pola pendekatan yang lebih mengedepankan prinsip *developmental (bottom up)*, dengan memperhatikan faktor partisipasi, koordinasi, kerjasama dan sinergitas, baik antar departemen, daerah, lintas sektoral, maupun dengan para stakeholder. Begitu juga dalam persoalan sosial budaya, lingkungan alam, dan hak asasi manusia, juga telah diintegrasikan didalamnya bersamaan dengan kebijakan utamanya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pendeknya, paradigma pendekatan pembangunan pariwisata nasional pada paruh ini, jauh lebih adaptif dan terkontrol dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*), berpihak pada masyarakat setempat (*local people*), dan memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan (*eco-tourism*).

Komponen paradigma yang dikedepankan pada periode ini adalah (a) hak azasi manusia (*HAM*), (2) pengembangan manusia yang berkelanjutan (*Sustainable Human Development-SHD*), dan (3) Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



Gambar 1. Elemen paradigma pariwisata paruh ke dua (era 90-an), diadopsi dari model Kementerian Lingkungan Hidup dan UNDP, 2000

Paradigma pembangunan pariwisata seperti ini, pada dasarnya merupakan jawaban dan penyempurnaan dari paradigma sebelumnya yang dinilai banyak membawa dampak penurunan kualitas terhadap sumber-sumber daya yang bernilai wisata. Oleh karena itu, pariwisata pada era ini lebih menekankan pada pentingnya pemulihan kualitas itu, dengan grand konseptualnya, *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), *baik sustainable* dalam pariwisata (*tourism*), sumber daya manusia (*Human development*), lingkungan (*enviroment*), adat dan budaya (*custum and culture*), maupun sektor-sektor lain yang bernilai pariwisata. Satu lagi, prinsip *sustainable development* tersebut, dalam implementasinya juga harus berada dalam satu kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governence*), dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM), sebagaimana kehendak demokratisasi dan reformasi mem-*blue print*-kan seperti itu.

Beberapa prioritas pembangunan pariwisata yang direformasi dalam kerangka paradigma *sustainable development* tersebut, diantaranya adalah (a) perlindungan terhadap kawasan pariwisata yang rentan, (b) regulasi industri yang ramah lingkungan beserta pemanfaatannya; (c) pengelolaan kunjungan wisatawan yang baik dan bertanggungjawab, (d) penghitungan daya dukung lingkungan secara cermat, tepat dan bermanfaat, (e) konsultasi dan partisipasi masyarakat secara optimal, (f) menciptakan hubungan yang santun antara wisatawan, dan para pelaku bisnis, (g) pemantauan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman dalam kepariwisataan yang berkelanjutan, (h) melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governence* dalam tata kelola kepariwisataan, dan (i) sinergisitas antara pemerintah pusat, daerah otonom, dengan para stakeholders pariwisata, (Kementrian Lingkungan Hidup dan UNDP, 2000).

Pada prinsipnya paradigma pembangunan pariwisata dalam periode ini adalah pembangunan pariwisata yang

berintegrasi antara kepentingan pasar pariwisata, visi pembangunan nasional, dan kekuatan global dalam rangka mewujudkan bentuk-bentuk pariwisata yang ramah lingkungan, yang bisa menumbuhkembangkan kesejahteraan dan perdamaian lokal (otonomi daerah), nasional maupun global. Pertalian ketiga komponen di atas (SHD, GG, HAM), pada prinsipnya untuk mewujudkan tujuan global seperti itu, dan mendorong seluruh pelaku pariwisata di Indonesia untuk terus mengedepankan prinsip *sustainable* (keberlanjutan) dalam strategi pembangunan pariwisatanya.

Oleh karena, persoalan lingkungan jauh mendapat perhatian luas, maka pada periode ini, isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Indonesia banyak menyertakan persoalan ini ke dalam beberapa strategi pembangunan pariwisatanya. Salah satu bentuknya adalah kebijakan *mass tourism* yang menjadi primadona pada paruh pertama (era 80-an) dikembangkan lagi ke jenis-jenis pariwisata *alternatif* yang bersekala kecil dengan bertumpu pada ekologi dan lingkungan (*Ecotourism*). Sehingga banyak bermunculan bentuk-bentuk ekowisata (*ecotourism*) seperti: arung jeram, wisata alam, wisata biota bawah laut, dan lain-lain, yang tetap memperhatikan ambang batas daya dukung lingkungan, kelestarian, dan keberlanjutan.

Pegeseran orientasi dari *mass tourism* ke *alternative tourism* tersebut, ternyata juga telah mendorong terjadinya perubahan arah kebijakan pembangunan pariwisata Nasional. Tidak kurang dari 54 keputusan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengawal strategi dan paradigma pembangunan di atas. Mulai dari Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, PP No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Kepariwisataan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, dan PP No. 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Kemudian dikeluarkan

5 buah Keputusan Presiden RI, 5 Instruksi Presiden, 6 Surat Keputusan bersama Menteri, dan masih ditambah lagi sekitar 35 buah Surat Keputusan Menteri Parpostel, termasuk surat Keputusan Menteri Parpostel tentang pembentukan Badan Pengembangan Pariwisata Nasional, (Kementerian Lingkungan Hidup dan UNDP, 2000).

Hanya saja, satu hal yang luput dari fokus perhatian kebijakan pemerintah pada periode ini adalah persoalan kebudayaan. Sama dengan pada paruh pertama (era 80-an), persoalan ini hanya diikutkan (cantolkan) penanganannya dengan kebijakan lain yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Seperti disebutkan sebelumnya, maka persoalan kebudayaan dianggap sudah dengan sendirinya masuk ke dalam isu-isu strategis pembangunan pariwisata seperti: *sustainabel* (keberlanjutan) di atas. Oleh karenanya banyak kalangan peneliti pariwisata (era 90-an) yang menyatakan bahwa dampak sosial budaya dari pariwisata nasional secara umum merugikan, dan kalangan pemerhati budaya tersebut kemudian membuat paradigma baru (bersifat lokal) dalam industri pariwisata, yang dikenal dengan Pariwisata Budaya (*culture tourism*) dan bukan Budaya Pariwisata (*tourism of culture*), seperti halnya yang telah berjalan di kepariwisataan Bali.

Paradigma ini sekaligus menggeser bentuk paradigma lama yang secara empiris lebih menempatkan sektor pariwisata sebagai mesin produksi ekonomi (*industri jasa secara besar-besaran*) dibandingkan menguatkan karya-karya kebudayaan yang bernilai pariwisata. Artinya, bentuk pariwisata yang dikembangkan di Indonesia lebih bercorak Industri yang mampu meraup devisa sebesar-besarnya, dibandingkan dengan memperkuat aset-aset kebudayaan lokal yang bernilai pariwisata sebagai sumber dayanya. Dengan kata lain paradigma *budaya pariwisata*, dalam perkembangannya lebih diperkuat pertumbuhannya dibandingkan dengan *pariwisata*

budaya. Artinya, pertumbuhan budaya yang dihasilkan dari industri pariwisata lebih menonjol perkembangannya, dibandingkan dengan kebudayaan lokal yang menyokong dan bernilai pariwisata. Padahal, jika merujuk pada paradigma pariwisata di atas, seharusnya, bentuk-bentuk karya budaya yang terakhirlah (wisata lokal) yang terus didorong pertumbuhannya sebagai modal dalam menghidupkan kepariwisataan Indonesia, dan bukan sebaliknya. Inilah gambaran umum paradigma pariwisata dan perkembangan implementasinya pada paruh kedua (era 90-an).

2.4.2 Era Reformasi (1998-sekarang)

Memasuki *melinia* (dan komunikasi) sekarang ini, paradigma pariwisata nasional pada prinsipnya tidak berubah secara total tetapi hanya bergeser pada isu-isu strategis yang lebih mengedepankan prinsip *populis* (memanusiakan manusia). Kekuatan global yang mendorong adalah isu *Milenium Development Goals* (MDGs) yang menekankan delapan perinsip dalam setiap strategi kebijakan pembangunan Nasional setiap negara, yaitu: (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara optimal (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan Ibu; (6) Mencegah dan menurunkan risiko penularan PMS, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; (7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan, (Bappenas, 2005)

Agenda global ini, kemudian dijabarkan ke dalam agenda Nasional dan Sektoral dalam strategi pembangunan pariwisata Nasional ke dalam bentuk pembangunan yang *mensejahterakan rakyat*. Isu strategis yang dikedepankan, adalah: (1) pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (*pro poor tourism development*);

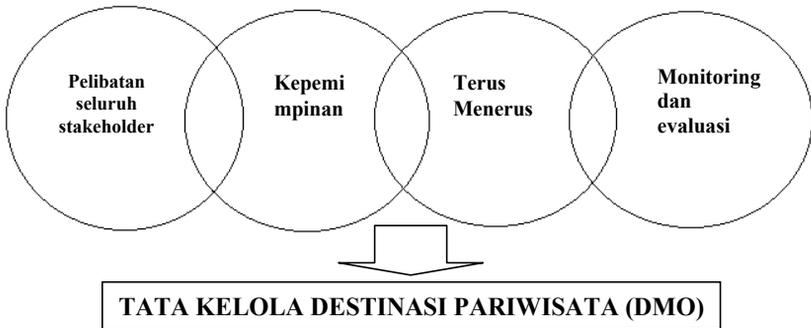
(2) berbasis komunitas (*pro community based tourism*); (3) penyediaan dan penyerapan tenaga kerja (*pro job*), (4) peka terhadap kebutuhan dan selera tuan rumah dan wisatawan (*pro host-guest*); dan (5) kelestarian lingkungan (*pro environment*) mencerdaskan komunitas (*pro knowledge*).

Berdasarkan isu strategis ini, pada akhirnya, kepariwisataan Indonesia ditetapkan untuk memenuhi lima keselarasan tujuan pembangunan pariwisata, yaitu: (1) tujuan *ekonomi* (meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara), (2) *kesejahteraan* (menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran), (3) *pelestarian* (alam, lingkungan, kebudayaan), (4) *memperkokoh rasa nasionalisme* (mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa) dan (5) *diplomasi kebudayaan* (mempercepat persahabatan antar bangsa). Dalam mencapai tujuan ini, prinsip-prinsip seperti membawa nilai manfaat (material, non material), mewujudkan iklim kekeluargaan yang harmonis, rasa keadilan dan pemerataan, keseimbangan, menumbuhkan semangat kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, harus tetap menjadi batu pijakan dalam setiap strategi pencapaiannya.

Pada tingkat keputusan kebijakan, paradigma tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah *grand design* pengelolaan daerah tujuan wisata (DTW) yang disebut sebagai *Destination Management Organization (DMO)* atau Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Sebuah tata kelola destinasi pariwisata yang *terstruktur dan sinergis* yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualiti-

tas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal, dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal, (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010).

Prinsip yang dikedepankan adalah (1) *partisipatif* (lokal, pemerintah, pelaku usaha pariwisata), (2) *keterpaduan* (antara fungsi ekonomi, pemasaran, koordinasi, pemberdayaan, dan representatif); (3) *kolaboratif* (antara tujuan pariwisata dengan *Good governance-GG*), (4) *berkelanjutan* (ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan teknologi). Prinsip ini harus ada, baik dalam level lokal (kabupaten), regional (propinsi) dan Nasional, yang dikembangkan secara koordinatif, kemitraan, dan sistemik, untuk mencapai tujuan dari paradigma di atas (mensejahterakan rakyat).



Gambar 2. Persyaratan Implementasi DMO (diadopsi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010)

Hampir sama dengan implementasi paradigma sebelumnya, pada tahap ini pariwisata melalui strategi DMO tersebut juga ditargetkan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi, dengan tetap mengedepankan prinsip *sustainable development* yang sudah menjadi komitmen dalam pembangunan pariwisata nasional sejak paruh ke dua di atas. Dalam agenda jangka panjang dan pendeknya strategi DMO ini harus mampu memenuhi beberapa target diantaranya.

1. Bidang ekonomi
 - a. Peningkatan jumlah wisatawan, lama tinggal dan pengeluaran
 - b. Peningkatan usaha-usaha masyarakat (transport lokal, restoran, souvenir)
 - c. Peningkatan pendapatan (masyarakat lokal, desa dan kecamatan setempat) (*Pro poor*) serta mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal (*pro job*).

2. Bidang lingkungan
 - a. Mewujudkan *green tourism (ecotourism)*, dalam daya dukung lingkungan yang tidak melebihi ambang batas (*pro enviorenment*)
 - b. Menciptakan sehat lingkungan (*enviorenment health*) dengan cara bebas sampah dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan.

3. Sosial Budaya
 - a. Mampu menjaga, dan melestarikan warisan budaya (*heritage*) yang bernilai pariwisata, termasuk menjaga dan memelihara adat istiadat, sistem kepercayaan dan tata nilai yang menjadi budaya masyarakat lokal (*pro culture and custom*)
 - b. Mampu memanfaatkan warisan budaya tersebut untuk kegiatan pariwisata, dengan tetap mengedepankan tidak mengeksploitasinya tetapi saling menguntungkan kedua belah pihak (*simbiosis mutualisme*)
 - c. Mampu melakukan upaya-upaya konservasi terhadap situs-situs sejarah dan benda cagar budaya dengan mempertahankan keaslian situs sejarah serta cagar budaya sesuai keadaan masa lampau

Sekurang-kurangnya seperti itulah perkembangan paradigma kepariwisataan di Indonesia, dari paradigma *advocacy*, *developmental*, sampai pada *populis humanis* (*pro poor*, *pro job*, *pro environment*, dan *pro sustainable development*). Seperti yang terlihat di atas, apapun bentuk paradigma yang ditetapkan pada akhirnya selalu menempatkan agenda-agenda kebudayaan sebagai subordinat dari kepentingan abadi dari industri ini, yaitu: keuntungan ekonomi. Pada dasarnya, hal ini semakin mempertegas bila kehadiran kepariwisataan di Indonesia sebenarnya sangat bercorak industrial dengan ciri utamanya, adanya ekspansi kapital besar dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia.

2.5 Analisis Implementasi Paradigma

Sebagaimana ciri khas dari sebuah industri yang mengutamakan prinsip ekonomi secara murni, maka sudah jelas persoalan kebudayaan akan semakin jauh tertinggal perkembangannya. Kebudayaan yang sebagian besar telah menjadi sumber produksi pariwisata Indonesia (dari masa ke masa), pada kenyataannya hanya mampu bertahan di pinggir-pinggir dari pusat industri pariwisata tersebut. Karya budaya yang di masa lampau telah menghidupi pariwisata itu, kini telah terhempas dan terlindas oleh bentuk-bentuk baru kebudayaan yang dihasilkan oleh industri pariwisata itu sendiri. Dengan kata lain produk budaya yang bernilai pariwisata itu, selama ini hanya diposisikan sebagai penyerta dalam pertumbuhan industri pariwisata Nasional secara global. Kebudayaan itu bukan menjadi aset utama yang menghidupi industri ini, tetapi kehadirannya justru sebagai alat atau batu pijakan yang dapat difungsikan sebagai sumber produksi dari industri ini (pariwisata Indonesia).

Oleh karena itu sudah terlihat jelas di atas, bila persoalan sosial budaya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,

menjadi problematik yang krusial, bersamaan dengan persoalan lingkungan, dan kebocoran ekonomi. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk secepatnya membalikkan paradigma dari paradigma industri ke paradigma kebudayaan. Sehingga kearifan alam, budaya dan manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan pariwisata dapat terjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Tanpa itu, semua kekayaan alam dan budaya yang bernilai pariwisata saat ini, secara gradual akan dapat dipastikan mengaloi pendistorsian, jika tidak pemusnahan, karena tergeser oleh kuatnya arus budaya yang dibawa oleh industri pariwisata sendiri.

2.6 Kesimpulan

Setelah mempelajari Bab II pembaca dapat mendapatkan beberapa kesimpulan terkait perencanaan pembangunan pariwisata di Indonesia, antara lain :

1. Paradigma perencanaan dan kebijakan pembangunan pariwisata sejak masa Orde baru mengalami masa pasang surut yang cukup ekstrim, yaitu dari paradigma yang berorientasi pertumbuhan ekonomi menuju ke arah paradigma yang tidak semata memperhitungkan kepentingan ekonomi namun juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan aspek budaya. Hal ini didorong oleh perubahan paradigma perencanaan yang juga terjadi pada tingkat global.
2. Meskipun terjadi pasang-surut paradigma perencanaan dan kebijakan, namun pariwisata nasional tetap mampu membuktikan sebagai pemberi surplus ekonomi yang paling cepat, dan paling besar ke dalam negara-negara penerima wisatawan, dengan tetap memberi peluang besar bagi seluruh warisan kekayaan alam dan budaya yang bernilai wisata, menjadi aset yang mampu tumbuh dan memberi jasa keuntungan kepuasan maupun ekonomi bagi wisatawan maupun masyarakat penerimanya.

BAB III EKOWISATA

3.1 Pergeseran Selera Wisatawan

Trend baru: *Serenity, Sustainability, spirituality*

Pada dua dekade terakhir telah terjadi pergeseran motivasi berwisata para wisatawan, dari motivasi bersenang-senang menjadi mencari pengalaman baru. Paradigma pariwisata pun bergeser dari “*sun, sand and sea*” menjadi “*serenity, sustainability and spirituality.*” Berdasarkan penelitian, bahwa dalam kurun waktu 2005-2010 terjadi kenaikan hingga 165 % atas perjalanan wisata yang didasarkan pada keyakinan diri (*faith based*). UNWTO (2010) memperkirakan sekitar 330 juta wisatawan global atau kurang lebih 30% dari total keseluruhan wisatawan global melakukan kunjungan ke situs-situs religious penting di seluruh dunia, baik didasarkan pada motif spiritual atau pun motif kognitif.

Ada beberapa pergeseran di industri pariwisata, yang menjadikan industri ini kian diminati. Dengan pergeseran-pergeseran industri ini akan semakin menjadi primadona untuk dipacu perkembangannya. Pergeseran pertama adalah mekarnya peluang dari para wisatawan global yang mulai “*go to east*” dimana negara kepulauan Indonesia menjadi pilihan yang menarik (terutama wisata bahari dan kepulauan semisal Raja Ampat). Di samping itu implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dimulai tentunya turut membuka peluang pasar pariwisata, khususnya *inbound* (wisatawan mancanegara ke dalam negeri).

Kedua, selera pasar juga bergerak ke pariwisata luar negeri. Perlu diingat, kini berwisata ke luar negeri sudah menjadi *mass luxury*. Artinya, bepergian ke luar negeri kini

tak lagi merupakan barang mewah. Apalagi bepergian ke negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Para pemain seperti *travel agent* sudah melihat dan bergerak cepat untuk menangkap peluang besar dari adanya pergeseran perilaku konsumen ini. Tantangan terbesar bagi para *travel agent* tentu saja adalah mengemas paket-paket *outbound* yang menarik minat wisatawan.

Ada lima besar produk wisata sebagai kontributor kunjungan wisman ke Indonesia sebagaimana terungkap dari hasil survei PES (*passenger exit survey*) 2013 oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata. Kelima besar tersebut adalah: wisman yang melakukan wisata belanja dan kuliner (80%), wisata religi dan *heritage* (80%), wisata bahari (35%), wisata MICE: meeting, incentives, conference, and exhibition (25%), dan wisata olah raga (5%). Lima jenis wisata inilah yang seharusnya menjadi fokus pengembangan pariwisata *inbound* penghasil devisa. Wisata MICE misalnya, potensinya luar biasa besar, namun hingga detik ini perhatian dari pemerintah masih minim.

Ketiga, selera pasar konsumen pariwisata kini sebagian besar sudah diinduksi oleh informasi digital melalui internet berupa *travel blog* atau situs pembandingan harga antar penyedia layanan pariwisata. Dukungan dari pengguna internet, khususnya pengguna media sosial sudah sangat massif dalam menggeliatkan industri pariwisata nasional. Tanpa diminta, mereka meramaikan jagat internet dengan konten digital seputar *travelling* baik pra, saat, dan pasca liburan.

Keempat, pergeseran selera yang datang dari kelas menengah Indonesia yang memosisikan liburan sebagai "*basic needs*". Dengan daya beli yang semakin tinggi, kelas menengah merasa bahwa liburan telah menjadi suatu kebutuhan baru yang wajib dilaksanakan setiap tiga bulan, setengah tahun, atau paling tidak setahun sekali. Adanya *travel review* di platform blog atau media sosial, memudahkan *middle class* untuk

mencari informasi yang diinginkan. Beberapa blog yang dimiliki *blogger* pecinta *travelling* kerap ramai dikunjungi oleh kelas menengah. Kebutuhan liburan yang meningkat ini juga didorong oleh biaya transportasi dan akomodasi terjangkau dengan munculnya *budget airlines* dan *budget hotel*.

Pergeseran terakhir adalah meluasnya cakupan wisata. Wisata kini tidak lagi sebatas hanya pergi ke gunung atau pantai. Wisata kini sudah mengalami sofistikasi dan menjelma menjadi beragam bentuk. Ada jenis berwisata yang berurusan dengan isi-mengisi perut alias wisata kuliner. Ada jenis berwisata yang terkait ibadah atau kita sering menyebutnya sebagai wisata religi. Ada jenis berwisata yang terkait dengan berobat: contohnya *health check-up* di Singapura, yang diselengi dengan jalan-jalan. Demikian pula ada juga orang berwisata seraya menonton konser musik. Juga ada wisata olah raga seperti nonton Liverpool di Stadion Anfield.

Salah-satu pergeseran tersebut adalah munculnya trend wisatawan mengunjungi alam terbuka sambil melakukan upaya-upaya konservasi, yang disebut dengan ekowisata.

3.2 Definisi dan Konsep Ekowisata

Sekitar tahun 1980-an lahir suatu konsep *alternative tourism*, yang memberikan kritikan terhadap paradigma lama tentang pariwisata. Dikatakannya, pembangunan pariwisata merupakan pembangunan yang masif, eksploitatif, cepat, dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Paradigma ini akhirnya tergeser seiring dengan semakin meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat lokal. Sudut pandang *ecotourism* (*ekowisata*) akhirnya diambil sebagai paradigma baru untuk mengakomodir pariwisata yang pro masyarakat lokal (*pro local people*) tersebut.

Dalam sejarah perkembangannya, *ecotourism* tersebut terus mengalami dialektika pendefinisian, dengan tanpa meninggalkan substansinya yang pro masyarakat lokal (*pro*

local people) tersebut. Salah satunya diberikan oleh *Ecotourism Society*, sebuah organisasi not-profit yang dideklarasikan di Vermont, dengan tingkat kepedulian yang tinggi tentang hal itu, (Ceballos-Lacuarin (1987). Kelompok masyarakat ini (NGO) mendefinisikan *ecotourism* sebagai, "*Responsible travel to the natural areas that conserves the environment and sustains the well being of local people* ", atau seperti yang dinyatakan oleh Hector Ceballos Lascuarin (1987 dalam Boo, 1991) sebagai "*Traveling to undisturb area or uncontaminated natural areas with a specific objective of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals*". Konsep ini dipertegas lagi oleh David Western (1987) yang menyatakan bahwa: ekowisata merupakan aktivitas wisata yang bertanggungjawab untuk kelestarian alamnya. Ekowisata harus mampu menciptakan dan memuaskan keinginan alam, dengan cara mengkonservasi, melestarikan ekologi, dan melibatkan peran aktif wisatawan dalam setiap pengembangan dan pembangunan.

Terlihat di situ aspek empati terhadap ekologi begitu besar ditekankan dalam definisi. Kemajuan sudut pandang ini kemudian dikonsensuskan oleh *World Conservation Union* (WCU, 1996) dengan menyatakan bahwa: ekowisata sebagai perjalanan bertanggungjawab secara ekologis, dalam bentuk menghargai keindahan alam (termasuk kebudayaan lokal) dan mempromosikan konservasi terhadap setiap daerah yang dikunjunginya, terutama daerah yang masih asli (*pristine*). Pentingnya aspek ekologi ini, juga diperhatikan secara serius oleh Wood (2002). Dia menyatakan bahwa: ekowisata sebagai kegiatan wisata bertanggungjawab dengan mendasarkan pada kegiatan wisata alam (termasuk wisata pedesaan dan wisata budaya) beserta pengelolaan atraksi di dalamnya.

Meskipun istilah ekowisata sudah sering dipergunakan oleh kalangan akademisi, pebisnis wisata, dan NGO, tetapi penggunaan istilah ekowisata masih sering dikacaukan (Galley, G., and Clifton, J., 2004). Salah satunya diberikan oleh oleh

Hector Cebalos Lascuarin (Lascuarin, 1987, dalam Boo, 1991) sebagai *“Traveling to undisturb area or uncontaminated natural areas with a specific objective of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals”*. Konsep ini dipertegas lagi oleh David Western (1987) yang menyatakan bahwa ekowisata merupakan aktivitas wisata yang bertanggung jawab untuk kelestarian alamnya. Ekowisata harus mampu menciptakan dan memuaskan keinginan alam, dengan cara mengkonservasi, melestarikan ekologi, dan melibatkan peran aktif wisatawan dalam setiap pengembangan serta pembangunan.

The International Ecotourism Society (2002), mengerucutkan pengertian itu dengan mendefinisikan bahwa *ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat*. Aspek tanggung jawab dan kelestarian ini ditekankan lagi oleh ahli lainnya (Damanik, J. dan Weber, H.F., 2006), dengan meletakkan ekowisata sebagai: kegiatan wisata berbasis alam, bersifat berkelanjutan, dikelola secara khusus, berdampak positif terhadap lingkungan, berorientasi pada lokal, tidak bersifat konsumtif, dan fokus pada pengalaman serta pendidikan tentang alam.

Dari dalam negeri beberapa kalangan mencoba menterjemahkan dan mendefinisikan istilah *ecotourism*. Sudarto (1999), misalnya mencoba menjelaskan bahwa istilah *ecotourism*, berasal dari kata *Ecological, Economical, Evaluating community opinion*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ekowisata berasal dari kata : 1). Ekologi, artinya ekologi sebagai sumberdaya dan daya tarik ekowisata, dan ekowisata memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian alam dan lingkungan, 2). Ekonomi, artinya bahwa ekowisata merupakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, 3). Evaluasi Kepentingan dan Opini masyarakat, artinya

ekowisata mempunyai kepedulian terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta ekowisata merupakan suatu upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang diharapkan masyarakat yang diberdayakan ekonominya tersebut dapat memberikan kontribusinya pula terhadap pelestarian alam dan lingkungan.

Menurut Sudarto (1999), belum ada istilah yang tepat dalam menerjemahkan istilah *ecotourism* ke dalam bahasa Indonesia, ada yang menerjemahkan ekowisata dengan istilah wisata ekologis dan ada pula yang menerjemahkan sebagai ekowisata walaupun ekowisata sebagai istilah yang paling ringkas dan baik dari sisi pengucapan. Kesepakatan yang disepakati dalam simposium dan semiloka *ecotourism* pada April 1995 yang diselenggarakan PACT/WALHI dan Januari serta Juli 1996 yang diselenggarakan kembali oleh INDECON, dihasilkan rumusan yang merupakan hasil pengembangan dari definisi yang dikeluarkan oleh *The Ecotourism Society* yaitu :

“Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahan juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata.”

Dari definisi di atas menjelaskan, ada lima hal yang mendasari kegiatan ekowisata yaitu : 1) Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, 2) Dilakukan daerah-daerah yang masih alami (*nature mode*) atau di daerah yang dikelola secara kaidah alam, 3) Tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan budaya, 4) Memberikan

dukungan terhadap upaya-upaya konservasi alam, dan 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Sudut pandang yang sedikit berbeda, tetapi tetap berada dalam satu semangat yang sama dilakukan oleh Fandeli (2002). Ia mengambil perspektif ekonomi dan kelestarian alam sebagai lokus kajiannya. Kedua unsur tersebut dikonseptualkan ke dalam pengertian yang disebut sebagai: ekowisata dan wisata minat khusus. Dari sudut pandang ini, Fandeli (2002) menyatakan bahwa melalui ekowisata, wisatawan dan seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan wisata, diajak untuk lebih peka terhadap masalah lingkungan dan sosial, sehingga diharapkan sumberdaya alam tetap lestari dan wisatawan mempunyai apresiasi lingkungan yang tinggi. Di samping itu, masyarakat di sekitar objek pariwisata juga bisa memperoleh keuntungan (ekonomi) dari penyelenggaraannya, karena wisatawan ekowisata umumnya bertujuan bersatu dengan alam dan budaya lokal, dan menjauhi hiruk-pikuk suasana perkotaan. Kebersatuan ini secara tidak langsung akan mampu membawa efek ekonomi bagi masyarakat lokal tersebut.

Berdasarkan karakteristik ini, dapat dikatakan bahwa dalam pertumbuhannya ekowisata telah meletakkan pondasi kerangka konseptual yang kokoh baik dalam perspektif teoritik maupun pragmatisnya. Semua elemen pembangun pariwisata dilibatkan secara aktif, baik dalam hal pemeliharaan, pelestarian, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat lokalnya. Begitu juga dengan wisatawan sendiri. Mereka juga dituntut aktif untuk sadar lingkungan dan peka terhadap sosial budaya setempat, selama melakukan kegiatan wisata. Bersamaan dengan itu para penyedia jasa juga dituntut mampu menyediakan produk-produk ekowisata yang ramah lingkungan dan yang tidak kalah penting adalah; harus memberdayakan masyarakat lokal secara sosial, ekonomi dan budaya. Inilah titik-titik pertemuan terpenting

dari keseluruhan kajian, analisis dan cara pandang ekowisata di atas. Secara definisi telah meletakkan perspektifnya yang tegas, dan secara operasional telah memberikan pedoman yang jelas. Penelitian ini, akan mengambil semua itu sebagai konsep operasional yang berharga untuk melihat pertumbuhan dan proses perubahan yang berlangsung.

3.3 Prinsip-Prinsip Ekowisata

Dari kajian-kajian definisi di atas, terlihat bahwa: terdapat kesatuan yang utuh antara wisatawan, masyarakat lokal, objek ekowisata (alam dan budayanya) dan kelangsungan kelestarian dari ketiganya. Seperti yang terkandung dalam definisi, kesatuan holistik ini dipandang akan mampu membawa pengaruh ekonomi bagi masyarakat lokal, dan kelestarian terhadap alam ekologinya sebagai objek ekowisata yang di eksplorasi. Cara pandang seperti ini, menjadikan penerapan ekowisata dapat berjalan selaras dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan di atas. Dimana keduanya sama-sama menekankan dan mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat (*pro local people*) dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisatanya.

Kolaborasi kedua aspek ini, menghasilkan postulat umum yang dikenal dengan prinsip-prinsip ekowisata. Prinsip-prinsip ini lebih bersifat pragmatis, dan tidak terlalu akademik konseptual seperti yang ada dalam kajian definisi di atas. Sebagai kerangka pragmatis, maka prinsip-prinsip ini lebih memiliki nilai fungsional, khususnya untuk pedoman dalam mengelola ekowisata. Prinsip-prinsip yang digagas oleh *The International Ecotourism Society (TIES)*, sebuah organisasi nirlaba internasional yang berkiprah di bidang ekowisata, terdiri atas, antara lain (TIES,2000):

- (1) Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat

kegiatan wisata,

- (2) Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya,
- (3) Menawarkan pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi atraksi,
- (4) Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan,
- (5) Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal,
- (6) Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik di daerah tujuan wisata,
- (7) Menghormati hak azasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak azasi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Dalam konteks destinasi, prinsip-prinsip tersebut tergolong general dan masih harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal. Dengan begitu, prinsip ekowisata di suatu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Kendati demikian, dimensi-dimensi pokoknya masih tetap sama dengan prinsip-prinsip general tersebut. Salah satu destinasi yang telah mengadaptasi itu, adalah: Pemerintah Indonesia melalui kajian terhadap ekowisata di Bali pada 2002. Bersama Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Indonesia menetapkan sembilan prinsip utama

untuk tatakelola ekowisata Bali, yaitu:

- (1) Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya,
- (2) Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaanya terhadap alam;
- (3) Memberikan kontribusi secara kontiyu terhadap masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat setempat;
- (4) Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat;
- (5) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum adat (*awig-awig*) masyarakat setempat;
- (6) Pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dengan persetujuan masyarakat setempat,
- (7) Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen,
- (8) Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan
- (9) Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*, yaitu: keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), dengan manusia (*Pawongan*); dan dengan lingkungan (*Palemahan*).

Gambaran ini dapat dikatakan sebagai salah satu contoh penerapan prinsip general di atas ke dalam prinsip khusus. Paradigma ekowisata disesuaikan dengan kondisi lokal dan tujuan khusus yang ingin dicapai melalui potensi ekowisatanya. Merujuk kembali pada beberapa kajian di atas,

pada akhirnya diketahui bahwa: ekowisata secara eksklusif telah memperlihatkan sebuah ciri-ciri yang cukup spesifik. Dari kesimpulan beberapa studi sebelumnya, (Anonim, 2011) memperlihatkan terdapat 7 (tujuh) karakteristik yang mencirikan ekowisata seperti itu, yaitu:

- (1) Aktifitasnya sangat terkait dengan pelestarian dan konservasi lingkungan,
- (2) Kegiatan wisatanya berbasis alam, dan berskala kecil, baik dalam arti jumlah wisatawan maupun usaha wisatanya,
- (3) Tujuannya untuk pelestarian, keindahan dan menjaga kekayaan alam,
- (4) Tanggung jawab pelestarian dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama, khususnya organisasi perjalanan (*travel agent*) dan wisatawan,
- (5) Terdapat komitmen bersama antara penyedia jasa dengan wisatawan untuk menghargai lingkungan,
- (6) Perjalanan wisatanya menggunakan teknologi hemat energi, berbasis sumber daya dan karya lokal, dan
- (7) Pendapatannya dialokasikan untuk konservasi lokal dan mendukung pengembangan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

3.4 Strategi dan Tujuan Pengembangan Ekowisata Indonesia

Dalam pengembangan ekowisata di Indonesia, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep pengembangan ekowisata yang melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat (*community-based ecotourism*) pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang

menjadi obyek dan daya tarik ekowisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan seperti penginapan, pemandu wisata, penyediaan cinderamata khas yang berasal dari budaya dan flora dan fauna setempat, dan lain-lain.

Sedangkan pengembangan Ekowisata di Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati di tempat keberadaannya secara alami dan atau melalui upaya budi daya untuk meningkatkan peluang pemanfaatan berkelanjutan melalui cara-cara non eksploitasi.
- b. Mengembangkan potensi ekosistem melalui kegiatan wisata ekologis pada kawasan-kawasan strategis/potensial agar dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru dengan potensi khususnya, yang mampu mendorong perkembangan pembangunan pembangunan dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sosial budaya setempat.
- c. Mendorong peningkatan pengelolaan sumber daya ke arah yang lebih bijaksana melalui pendekatan ekologis, yang didasari atas pengertian yang lebih baik mengenai fungsi-fungsi ekosistem, inventarisasi keanekaragaman hayati yang komprehensif dan sah, pertukaran informasi, pemeliharaan pengetahuan dan kearifan tradisional, serta perencanaan yang terpadu.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai keanekaragaman hayati dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program pemanfaatan sumber daya.

KASUS:

Berbagai kepariwisataan yang terjadi akibat perkembangan pariwisata Bali selama ini lebih cenderung mengarah kepada menguatnya bentuk pariwisata massal (*mass tourism*). Tidak hanya jumlah wisatawan, juga penyediaan infrastruktur pariwisata, perilaku wisatawan, serta aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan di Bali semakin merepresentasi sosok pariwisata massal (Picard, 2006). Faktor kebijakan pemerintah di dalam menempatkan Bali sebagai destinasi pariwisata andalan memainkan peran penting dalam hal ini. Pemerintah sebagai lokomotif penggerak pembangunan kepariwisataan selalu menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya sebagai cerminan kesuksesan pembangunan pariwisata. Fasilitas akomodasi, baik kategori hotel berbintang dan non-bintang maupun resort-resort mewah yang dimiliki pemodal asing terus dibangun tanpa memperhatikan daya dukung di Bali.

Hal ini tercermin dari makin meningkatnya nilai investasi di sektor pariwisata di Bali. Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP) Provinsi Bali mencatat bahwa dari Rp 7 triliun investasi pada tahun 2010, sebanyak 80 persen di antaranya masuk untuk sektor pariwisata. Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tercatat jumlah kamar hotel bintang sebanyak 18.684 unit ditambah dengan 21.775 unit kamar hotel non-bintang (BPS, 2011). Sementara jumlah kamar hotel di Bali, baik berbintang maupun non-bintang, pada tahun 2010 sudah mencapai 45.557 kamar. Jika diasumsikan rerata luas lahan yang digunakan untuk 1 unit kamar adalah 25 m^2 , maka total luas lahan yang diokupasi kamar hotel mencapai 113,89 hektar (Atmaja, Y., I.B., 2002).

Masifnya pertumbuhan investasi pariwisata tersebut pada tataran realitas terlihat dalam perubahan bentang lahan pulau Bali secara drastis. Daerah pesisir, daerah bantaran sungai, perbukitan, dan pegunungan; bahkan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air pun tidak lepas dari sasaran lokasi pembangunan fasilitas pariwisata. Perubahan

fungsi-fungsi lahan yang sangat pesat, bukan saja menjadi ancaman serius terhadap eksistensi para petani yang sejak lama bergantung pada lahan pertanian sawah, tetapi juga mengakibatkan perubahan struktur pekerjaan yang rentan menciptakan masalah pengangguran (Sutawan, 1997).

Pada konteks pengembangan destinasi pariwisata, berbagai kondisi di atas sangat potensial mengubah wajah Bali menjadi destinasi pariwisata yang jauh dari nilai-nilai pariwisata budaya. Padahal sejatinya, kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pariwisata di Bali merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komponen sosial budaya masyarakat adalah modal utama dalam pengembangan pariwisata Bali. Di dalam jaringan komponen tersebut, budaya agraris yang terwujud dalam tatanan desa *pakraman* (dulu disebut desa *adat*) dan Subak berfungsi sebagai pilar utama penyangga struktur sosial budaya yang ada. Artinya, faktor kunci keberhasilan pembangunan pariwisata Bali terletak pada keberlangsungan dua pranata tradisional tersebut. Idealnya pengembangan pariwisata Bali semestinya diarahkan agar mampu menciptakan pola hubungan saling menguntungkan (simbiotik-mutualistik) antara elemen-elemen desa *pakraman* dengan industri pariwisata. Dengan demikian pariwisata diharapkan akan menjadi bagian hidup dan mempunyai makna/memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa *pakraman* itu sendiri (Timothy dan Boyd, 2003).

BAB IV PROBLEMATIKA PARIWISATA PANTAI

Pesatnya laju pembangunan yang berlangsung selama ini diyakini telah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun ada satu hal mendasar yang seolah terlupakan dalam proses pembangunan tersebut, yakni bergesernya orientasi sebagian besar masyarakat dari pembangunan dan pengembangan maritim ke arah pembangunan daratan (*continent*). Indonesia di era sebelum kolonial, bahkan jauh sebelumnya di jaman keemasan Sriwijaya dikenal sebagai bangsa yang jaya di lautan. Armada laut kerajaan Sriwijaya bahkan telah mengarungi lautan hingga ke daratan India. Dalam masa berikutnya kita mengenal jaman keemasan kerajaan makasar dengan perahu Pinisi nya menguasai dunia pelayaran. Namun, di era kemerdekaan kesadaran akan pentingnya kebahariaan ini dilupakan bahkan ditinggalkan. Pemerintah sejak jaman Orde lama, orde baru, bahkan era Reformasi hanya memiliki perhatian yang kecil terhadap kelautan dan pesisir. Tak aneh kemudian, sumber daya alam kelautan kita alih-alih dikelola dengan baik, malah menjadi ajang penjarahan dari kapal-kapal asing. TNI AL kita tak memiliki kekuatan yang cukup guna mengamankan wilayah perairan tersebut. Pun hal yang sama terjadi dengan kehidupan nelayan kita yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan karena hasil tangkapan ikan mereka tak memadai. Pada bagian lain, pengrusakan terhadap laut dan pantai terjadi di mana-mana. Kehidupan terumbu karang banyak yang rusak, bibir pantai terabrasi, bakau dibabat, dan ratusan industri membuang limbah mereka ke samudera.

Tak pelak kondisi ini semakin menjauhkan Indonesia dari paradigma pembangunan yang berwawasan bahari. Ini sungguh ironis bagi negara pemilik panjang pantai terluas di dunia.

4.1 Kearifan Lokal Bali dalam Memandang Laut

Sejak jaman Bali Mula, umat Hindu di Bali sudah meyakini akan pentingnya peran sungai, danau, dan laut. Semua itu tersurat dalam kosmologi keyakinan mereka, dan tersirat dalam praktik ritus keseharian yang dijalani. Dalam konsep Nyegara-Gunung, segara (laut) adalah unsur purusa (maskulinitas) dan gunung adalah unsur pradana (femininitas). Laut, sang ayah adalah pelebur segala kotoran, cemar (sarwa mala), sehingga sangat penting menjaga hubungan kehidupan skala dan niskala dengan laut dan gunung. Semuanya dalam upaya menjaga keseimbangan hidup di dunia.

Bila sedikit menelisik kepada asal dari kepercayaan Wedanta, yaitu tanah India. Semenjak Weda sebagai kitab suci umat Hindu pertama kali diwahyukan di India, di sana tersurat bahwa terdapat tujuh sungai yang disucikan sekaligus menjadi tempat dimana para Rsi menerima wahyu Tuhan, tujuh sungai tersebut, yaitu Sungai Gangga, Sungai Sindhu, Sungai Saraswati, Sungai Yamuna, Sungai Godawari, Sungai Narmada, dan Sungai Sarayu. Keyakinan akan betapa sucinya sungai sebagai sumber kehidupan juga telah merasuki sendi-sendi kehidupan umat Hindu di Bali, namun akibat percampuran kebudayaan, terjadi sedikit pergeseran lokasi upacara jika dibandingkan dengan agama Hindu di India. Apabila di India umat Hindu melakukan upacara keagamaan di tujuh sungai tersebut, umat Hindu di Bali lebih cenderung melakukan upacara untuk menyucikan diri di pantai. Hal ini disebabkan karena umat Hindu meyakini, ketujuh sungai di India tersebut, bermuara di laut dan laut di seluruh dunia memiliki air yang sama. Sehingga dalam praktek upacara

keagamaan, umat Hindu di Bali tidak asing dengan laut.

Umat Hindu di Bali sangat akrab dengan upacara nyegara gunung dan melasti dalam praktek keagamaan. Upacara nyegara gunung merupakan manifestasi kepercayaan umat dalam konteks menyucikan roh orang yang sudah meninggal. Sebagaimana halnya upacara nyegara gunung, upacara melasti merupakan upacara penyucian diri dan benda-benda pusaka atau *pratima* yang dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi. Masyarakat Hindu di Bali, memandang laut sebagai zona suci yang dapat meleburkan segala hal-hal kotor dan yang manifestasi Tuhan yang menguasai lautan adalah Sang Hyang Baruna. Dahulu, sungai dan laut bagi masyarakat amatlah suci sehingga masyarakat tidak berani sembarangan membuang sampah ke sungai. Masyarakat percaya, apabila membuang sampah sembarangan, Tuhan akan membalas dengan menurunkan hujan dan banjir besar yang disebut sebagai *blabar*. Setiap bencana yang terjadi di Bali, dimaknai dengan filosofi mendalam bahwa ada hubungan kausalitas dibalik suatu bencana. Masyarakat Hindu percaya, Sang Pencipta memiliki tujuan di balik hadirnya sebuah bencana, untuk itu tiap kali terjadi bencana besar, ada upacara besar pula di baliknya. Bukan suatu hal yang aneh bagi umat Hindu di Bali ketika ada orang yang menenggelamkan hewan ternak ke kawah gunung berapi, menenggelamkan hewan ternak di sungai ataupun laut.

Hal tersebut telah menjadi bagian dari denyut nadi masyarakat Hindu, bahwa setiap peristiwa memiliki makna di baliknya dan laut menjadi media yang sangat baik untuk memohon pengampunan dan memperoleh penyucian. Sungai dan laut, dipandang masyarakat sebagai sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan sekaligus pelebur segala dosa dan hal-hal negatif lainnya. Sayangnya seiring pertumbuhan pariwisata di Bali, penduduk menjadi semakin padat dan kearifan lokal tentang kesucian sungai mulai

memudar. Perlahan masyarakat, khususnya di perkotaan mulai membuang sampah ke sungai dan mandi menggunakan bahan kimia. Bahkan tidak hanya itu, limbah industri tekstil juga kerap dibuang di selokan yang pada akhirnya berujung di laut.

Kondisi eksisting di lapangan menunjukkan, pura-pura yang berada di sekitar pantai kondisinya mulai memprihatinkan sebagai akibat dari abrasi dan penambangan pasir. Bahkan pura yang namanya telah mendunia seperti Pura Tanah Lot, bagian dasarnya juga mengalami pengikisan akibat ombak laut. Kearifan lokal dalam memandang laut sebagai salah satu sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, selayaknya dikembalikan seperti sedia kala. Konsep kearifan lokal tersebut, sejatinya merupakan bagian dari *Tri Hita Karana*, yaitu fungsi laut sebagai media penghubung manusia dan Tuhan (*parahyangan*) dan fungsi manusia dalam menjaga laut (*palemahan*).

4.2 Problematika Pariwisata di Daerah Pesisir

Pulau Bali merupakan destinasi pariwisata yang terdiri atas atraksi wisata yang kompleks, namun apabila mendengar kata 'Bali' tentu yang tersirat pertama kali di benak setiap orang adalah sebuah pulau dengan pantai yang eksotis. Lebih dari sekadar pantai, sesungguhnya keindahan sejati dari Bali adalah citra ramah tamah dan kepolosan penduduknya terutama penduduk di sekitar pantai. Jika waktu dapat diputar kembali ke tahun 1950-an, dimana areal sekitar Pantai Kuta masih berupa semak belukar dan persawahan, dapat dilihat wisatawan disambut oleh keramahan dan kepolosan masyarakat asli yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Namun sekarang, masyarakat asli justru terpinggirkan oleh masyarakat pendatang. Orientasi pelayanan yang dulunya tulus menyampaikan keramahtamahan, kini berubah menjadi orientasi pelayanan dengan dasar materi.

Kehidupan yang semakin sulit dan menghimpit, memaksa para pemilik tanah menjual tanahnya kepada investor. Akibat semakin meningkatnya volume pembangunan di pesisir Bali, khususnya untuk pembangunan akomodasi, tak jarang ruang publik pun ikut menjadi sasaran pembangunan. Pelanggaran terhadap kawasan sempadan pantai juga tidak jarang terjadi di pesisir Bali. Anehnya, pemerintah seolah menutup mata dengan fenomena ini. Padahal Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 telah menetapkan kawasan sempadan pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi. Namun di pesisir Bali, dapat dengan mudah ditemui akomodasi yang berdiri berdampingan dengan laut, baik berupa restoran, hotel maupun night club terutama di Kabupaten Badung. Penggunaan kawasan sempadan pantai, juga telah menggeser zona religi dimana masyarakat terbiasa menggunakan ruang publik di pantai untuk aktivitas keagamaan. Sebagai konsekuensi akibat pencaplokan ruang publik oleh pariwisata, masyarakat mau tidak mau harus berbagi ruang publik dengan wisatawan. Ketika melakukan aktivitas keagamaan, umat Hindu dapat saja berbagi ruang dengan wisatawan yang sedang berjemur. Bukanlah suatu fenomena aneh di Bali, jika umat Hindu melakukan upacara keagamaan di tengah lautan wisatawan yang mengenakan pakaian yang seronok.

Kompleksitas permasalahan tidak hanya dapat dilihat dari isu moralitas akibat pembagian ruang publik namun juga isu fisik terkait dengan lingkungan sekitar pesisir yang secara kualitas kondisinya semakin memprihatinkan. Tengoklah Pecatu, daerah dengan perbukitan kapur yang kini 'diadaptasikan' menjadi sebuah daya tarik wisata dengan lapangan golf dan kondominiumnya yang megah. Masyarakat di Pecatu yang sedari dulu memang kesulitan air karena daerahnya yang kering, kini menjadi semakin sengsara akibat kenaikan jumlah akomodasi di sekitar Pecatu. Tidak hanya

penggunaan ruang publik, penggunaan sarana dan prasarana seperti air bersih pun, masyarakat masih harus berbagi dengan wisatawan. Di kala wisatawan tengah asyik bermain air di kolam renang, masyarakat kesulitan air bersih dan harus menghemat agar dapat memenuhi kebutuhan MCK. Kondisi ini menyiratkan, bagaimana masyarakat menjadi tamu di daerahnya sendiri.

Lain Pecatu lain pula Pantai Sanur, pantai yang berlokasi di Kotamadya Denpasar ini masih sibuk berkutat dengan masalah abrasi. Beruntung bagi Pantai Sanur, Pemerintah Kotamadya telah mengalokasikan dana untuk membangun pemecah ombak yang sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat bersantai. Sayangnya, tidak semua pantai di Bali seberuntung Pantai Sanur. Di Kabupaten Jembrana, yang pariwisatanya tidak semapan Pantai Sanur, abrasi tersebar di 21 titik sepanjang 20,22 kilometer. Abrasi ini bahkan mencaplok lahan pertanian warga dan menyebabkan subak di sekitar pantai terancam hilang. Pemerintah kabupaten sesungguhnya telah berupaya menangani abrasi, namun keterbatasan dana juga membatasi bentang wilayah yang abrasinya dapat diatasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmerataan kontribusi pariwisata dan ketidakadilan dalam menentukan prioritas penanganan abrasi. Jika hal ini terus berlanjut, maka malang bagi daerah yang pariwisatanya belum berkembang, daerah tersebut akan semakin kehilangan lahan akibat dari abrasi.

4.3 Community Based Tourism

Pariwisata kemudian hadir dan dielu-elukan sebagai industri tanpa asap. Industri yang terkenal 'aman' dan dipandang mampu membawa kontribusi secara finansial, ternyata tidak selamanya 'bersih'. Kendala yang dihadapi pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata di Bali kian kompleks dari hari ke hari. Secara fisik, penambahan jumlah sampah berbanding lurus dengan penambahan

jumlah wisatawan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kerap kali, masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) membuang sampah di sungai tanpa peduli konsekuensinya di kemudian hari. Beragam akomodasi yang ada di Bali juga masih awam tentang pentingnya menjaga sungai dan laut sebagai sumber kehidupan. Tiap harinya, ribuan ton limbah padat berupa sampah plastik dan limbah cair seperti air campuran detergen dan sabun mandi dihasilkan oleh masyarakat dan wisatawan. Hal ini dapat menimbulkan eutrofikasi akibat alga yang tumbuh subur dapat mempengaruhi kelangsungan hidup terumbu karang. Secara langsung, kontak wisatawan dengan terumbu karang juga dapat mempengaruhi kualitas hidup terumbu karang sebagai penyangga ekosistem di lautan ketika ada tangan-tangan jahil yang berniat membawa terumbu karang sebagai oleh-oleh. Hal ini tentu saja amat miris, mengingat pertumbuhan terumbu karang yang berkisar satu sentimeter setiap tahunnya dan akan memakan waktu lama untuk menumbuhkannya kembali.

Wisata bahari yang bertanggung jawab dan berkelanjutan kini menjadi pekerjaan rumah bagi para stakeholder untuk direalisasikan, bukan hanya sekadar wacana yang diberitakan di media dan disosialisasikan di berbagai kalangan masyarakat. Sudah saatnya membangun potensi Indonesia melalui perairan, khususnya laut mengingat Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Negara Indonesia telah terkenal dari segi historis sebagai negara maritim sejak zaman kerajaan Sriwijaya

Ketidakmerataan pariwisata di Pulau Bali telah membuat perbedaan terhadap respon masyarakat dalam menerima keberadaan wisatawan. Masyarakat di Pulau Bali yang pariwisata di daerahnya berkembang dan telah memasuki fase stagnasi seperti Pantai Legian, Pantai Seminyak dan Pantai

Nusa Dua cenderung acuh terhadap keberadaan wisatawan. Masyarakat sering melihat wisatawan berlalu-lalang dan memandang wisatawan sebagai sumber pendapatan. Berbeda halnya dengan desa-desa yang berada jauh dari kota dan masih jarang melihat wisatawan, seperti Desa Tegalcangkring di Jembrana yang pantainya masih belum dijamah pariwisata. Respon masyarakat di daerah tersebut masih sangat ceria dan penuh rasa ingin tahu ketika melihat wisatawan. Perbedaan respon masyarakat tuan rumah ini dipengaruhi oleh kondisi suatu atraksi wisata. Pantai Kuta, yang kini mulai ramai dan kredit, membuat masyarakat asli di sekitar pantai merasa jenuh sehingga kualitas pelayanan menurun. Jika hal ini dibiarkan tanpa ada penanganan lebih lanjut, masyarakat perlahan dapat menolak keberadaan pariwisata karena dianggap memberikan kontribusi negatif, seperti macet, tindak kriminal dan kemerosotan moral dimana hal tersebut tidak sebanding dengan *income* yang mereka dapatkan.

Menyelaraskan wisatawan dan masyarakat untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan bukanlah suatu hal yang mudah. Beberapa pendekatan dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak sekaligus meminimalisir kemungkinan kerusakan lingkungan. Pariwisata berbasis masyarakat dapat menyediakan keuntungan kepada masyarakat melalui pengambilan keputusan dan pengawasan suatu daya tarik yang mengutamakan masyarakat (Pearce, 1992). Mengingat besarnya keuntungan yang dihasilkan pariwisata sebagai industri tanpa asap yang kini belum diimbangi dengan kepedulian dalam konteks ekologi, pariwisata berbasis masyarakat hadir sebagai suatu konsep baru yang menjanjikan untuk menyelaraskan pariwisata dengan lingkungan, di dalamnya termasuk manusia serta alam sekitarnya. Pariwisata berbasis masyarakat atau yang populer dengan istilah *community based tourism* dapat menjebatani

paradigma environmentalis dengan developmentalis. Sayangnya, tidak banyak atraksi wisata yang mampu menerapkan pariwisata berbasis masyarakat sepenuhnya. Konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang mendasari munculnya pariwisata berbasis masyarakat belum banyak diilhami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar daya tarik wisata. Saat ini, pariwisata dianggap sebagai industri yang hanya memberikan keuntungan, bukan industri yang harus dipelihara agar tetap dapat berlanjut di kemudian hari.

Titik vital pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terletak pada seberapa besar masyarakat diberikan andil untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen pembangunan pariwisata. Konsep pariwisata berbasis masyarakat, dapat menopang pertumbuhan wisata bahari yang bertanggung jawab dan concern terhadap pelestarian lingkungan sekitar. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.96/HK.501/MKP/2010, wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut. Lebih lanjut yang merupakan sub usaha dari wisata bahari adalah wisata selam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata selancar, dermaga bahari dan sub usaha lainnya yang ditetapkan oleh bupati, walikota dan atau gubernur. Hampir seluruh sub usaha wisata bahari tersebut ada di Pulau Bali, bahkan telah berkembang sedemikian rupa dan jumlahnya berbanding lurus dengan kenaikan jumlah wisatawan. Namun tidak semua usaha wisata bahari yang berkembang di Bali peduli terhadap kelestarian lingkungan. Aktivitas diving dan snorkeling yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki tangan-tangan jahil dapat merusak terumbu karang, aktivitas memancing turut pula berisiko terhadap punahnya ikan-ikan spesies tertentu. Kemudian apa yang dapat dilakukan industri

pariwisata untuk mereduksi resiko-resiko ini?

Jawabannya adalah kolaborasi antara konsep pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat pesisir dapat dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan, penetapan regulasi hingga tahap pengawasan (*controlling*) suatu usaha wisata bahari. Sebagai contoh, dalam aktivitas memancing, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai jenis-jenis ikan apa yang terancam punah, apa alasan utama mengapa jenis-jenis ikan tersebut harus dilindungi yang pada intinya sosialisasi tersebut akan mengarahkan masyarakat pesisir menuju kepedulian yang lebih terhadap lingkungan sekitarnya. Apabila masyarakat telah merasa peduli, maka masyarakat akan berusaha memproteksi lingkungan sekitarnya agar tidak dirusak. Pengawasan terhadap aktivitas diving dan snorkeling oleh masyarakat juga dapat mereduksi resiko punahnya terumbu karang. Apalagi jika masyarakat diberikan penghargaan atas kontribusinya menjaga lingkungan berupa keuntungan secara finansial, masyarakat akan semakin terpacu untuk terlibat langsung sekaligus mengawasi aktivitas kepariwisataan di sekitarnya. Sudah saatnya paradigma top down digantikan dengan paradigma *bottom up* untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam industri pariwisata.

Beberapa contoh sukses kolaborasi antara pariwisata berbasis masyarakat dengan pembangunan kepariwisataan dapat dilihat di Desa Pemuteran dan Kawasan Pariwisata Lovina. Di Desa Pemuteran, aktivitas menumbuhkan terumbu karang melibatkan peran aktif masyarakat dan masyarakat turut menerima timbal balik berupa keuntungan ekonomis. Sisi positifnya, ada peluang wisatawan akan kembali mengunjungi Desa Pemuteran untuk melihat terumbu karang yang mereka tanam pada waktu sebelumnya. Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata. Sementara di Kawasan Pariwisata Lovina, masyarakat

pesisir terlibat dalam aktivitas melihat lumba-lumba di tengah laut Bali. Masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas kepariwisataan tanpa harus mengubah profesi mereka sebagai nelayan. Pariwisata tidak memaksa masyarakat mengubah kemampuan dasar yang telah dimiliki secara turun temurun, namun mengarahkannya secara positif guna mendapatkan nilai tambah secara finansial.

4.4 Strategi ke Depan

Di masa yang akan datang, para *stakeholders* industri pariwisata diharapkan secara sinergis menyelaraskan pariwisata dengan lingkungan, misalnya dengan pemberdayaan masyarakat dalam manajemen pengelolaan wisata pesisir. Kawasan Tanjung Benoa, Pantai Sanur, Pantai Kuta dan kawasan lainnya yang menjadi daya tarik wisata bahari sudah sepatutnya memberdayakan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada bilangan investasi yang dijanjikan investor. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan, dapat menggunakan wewenangnya untuk memberikan batasan terhadap eksploitasi investor di sekitar pesisir, terutama yang melakukan pembangunan dengan tujuan wisata di daerah sekitar pantai. Pemberian izin usaha watersport terutama di beberapa daerah yang nyaris mengalami *over-capacity* sebaiknya dibatasi guna memberikan ruang publik bagi masyarakat.

Kemudian para pemangku kepentingan di bidang industri, khususnya industri pariwisata sebaiknya membentuk komunitas atau forum sebagai wadah diskusi yang bekerja sama dengan LSM di bidang lingkungan hidup demi meningkatkan komunikasi dan kerjasama dalam pengawasan pelestarian lingkungan. Melalui komunitas atau forum tersebut, pemilik usaha atau investor di bidang wisata bahari dapat saling mendukung dalam pembuatan aturan yang berkenaan dalam aktivitas kepariwisataan. Kepala daerah juga dapat

berkontribusi untuk menjadi jembatan penghubung antara pemerintah pusat, investor dan masyarakat. Sebagai prioritas utama, masyarakat diberdayakan dan diberikan pelatihan secara intensif dan berkala mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. Dengan kearifan lokal yang dimiliki Bali dalam memandang laut, bukan merupakan hal yang sulit untuk mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersikap lebih pro aktif dalam bersama-sama menerapkan wisata bahari berbasis masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan adalah menciptakan hubungan sinergis antar stakeholder sehingga tujuan yang direncanakan, yaitu membangun wisata bahari berbasis masyarakat dapat diwujudkan.

Strategi yang lebih mendasar adalah dengan mengajak semua pihak untuk kembali melihat laut sebagai sumber kehidupan. Laut adalah sahabat kita dalam menjalankan pembangunan, sehingga ia harus dirawat, dihidupi, bukan hanya dirusak, dieksploitasi, dan dicemari. Sejak masih usia sekolah, anak muda bangsa harus diperkenalkan dengan paradigma berbasis bahari. (*)

BAB V

KRITERIA DESA WISATA SEBAGAI INSTRUMEN DASAR PENGEMBANGAN DESA WISATA

Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Tanah Air sudah sedemikian penting. Ia sudah mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak *mass tourism*. Dalam konteks kepariwisataan Bali perkembangan desa wisata menjadi bagian tak terpisahkan dari pasang-surut perkembangan pariwisata. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya kepada semangat *pro job, pro growth, dan pro poor* (pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan).

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata Kabinet Kerja (2015-2019) telah menetapkan bahwa program pengembangan desa wisata menjadi salah-satu agenda prioritas. Dalam konteks ini, Propinsi Bali memperoleh kesempatan mengembangkan 100 desa wisata baru dengan dukungan pendanaan dari APBN hingga tahun 2019. Tentu saja ini sebuah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Namun, di balik peluang tersebut pengembangan desa wisata yang selama ini berlangsung masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. *Pertama*, persoalan belum adanya kriteria desa wisata yang bersifat standard yang bisa dijadikan acuan manakala melakukan pemetaan terhadap desa-desa wisata. Sehingga pengembangan sebuah desa cenderung bersifat duplikasi, yakni mengacu kepada

desa wisata yang telah ada sebelumnya, tidak mengangkat keunikan lokal. *Kedua*, belum adanya model pengembangan desa wisata yang dapat berfungsi sebagai cetak biru (*blue print*), khususnya dalam hal pengembangan kelembagaan lokal, yaitu pengelola desa wisata. Pengaruh pengelolaan desa wisata dalam menjamin kesuksesan pengembangan desa wisata memang teramat vital. Absennya dua hal tersebut, membuat pengembangan desa wisata menjadi tersendat dan terkesan berjalan ala kadarnya.

Desa wisata Penglipuran di Bangli, misalnya, setelah diluncurkan pada tahun 1993, dalam proses perjalanannya berhasil tampil menjadi salah-satu destinasi unggulan dan andalan Kabupaten Bangli dalam menarik kunjungan wisatawan. Beberapa desa lainnya pun akhirnya dicoba dibangun dan dikembangkan meniru proses perkembangan Desa Penglipuran. Terjadi proses duplikasi secara sengaja dengan mengabaikan otentisitas potensi dan keunikan sendiri. Desa Baha di Kabupaten Badung yang secara tiba-tiba ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemda Kabupaten Badung, misalnya, meniru begitu saja pola pembangunan *angkul- angkul* (pintu gerbang pekarangan tradisional Bali) yang ada di Penglipuran. Terbukti akhirnya, hal tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan, Desa Baha tidak bisa berkembang secara optimal sebagai desa wisata.

5.1 Pendekatan Pengembangan

Satu hal penting yang diabaikan dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pengembangan desa wisata di Bali selama ini terkesan belum memiliki pendekatan yang kuat. Padahal hasil pengkajian di beberapa negara pendekatan tersebut telah menghasilkan beberapa bentuk pendekatan. Pendekatan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan masyarakat) memiliki spektrum

konsep dan pendekatan yang bervariasi. Ada lima aspek yang ingin dikemukakan disini (Baiquni 2009), antara lain :

Holistic approach. Pendekatan ini melihat secara menyeluruh dimensi pembangunan atau secara holistik. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan berbagai elemen atau sektor pembangunan secara terpadu, sehingga perumusan masalah dan pemecahannya diselenggarakan secara kolektif dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah *system thinking* sebagai cara untuk membuka pemahaman dan melakukan inovasi dalam merumuskan konteks kebijakan dan pengembangan yang tepatguna.

Participatory learning. Pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lokal perlu dilakukan secara partisipatif, menggali bersama kebutuhan dan merumuskan prioritas penanganan dalam proses 'belajar bersama'. Sesungguhnya yang paling tahu persoalan adalah pelaku lokal (masyarakat dan pemerintah daerah) sendiri, bukan konsultan atau kontraktor pembangunan yang berasal dari luar dan memiliki kepentingannya sendiri. Peran konsultan pada penguatan proses memfasilitasi pembelajaran kolektif, sehingga pemahaman permasalahan akan lebih baik dan solusinya dapat dikerjakan bersama-sama sesuai fungsi masing-masing lembaga dalam tata manajemen. Metode yang digunakan saresahan, lokakarya dan *learning by doing*.

Empowerment of management. Proses pembelajaran tersebut mencakup individual dan institusional. yang oleh Ki Hajar Dewantoro disebut Triple A (*Asih, Asah dan Asuh*) dalam proses belajar akan menimbulkan pencerahan (*enlightment*) dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*). Kelembagaan yang kuat terdiri dari para pelakunya yang juga tercerahkan dalam belajar dan bekerja. Manajemen kelembagaan yang terus membangun pencerahan dan pemberdayaan akan memberikan perbaikan kinerja dalam pengembangan ekowisata.

Action research. Manifestasi aparatur yang tercerahkan dan

kelembagaan yang mandiri, hanya teruji bila telah melakukan tindakan nyata dan bermanfaat bagi lingkungannya. Riset aksi merupakan bagian yang saling melengkapi dalam pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan. Metode riset aksi dilakukan melalui proses pembelajaran dapat diperkaya dengan pengalaman lapangan.

Sinergy and network. Pendekatan yang penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan adalah kesediaan untuk membuka jaringan dan bekerja secara jejaring dengan segenap komponen kelembagaan baik yang ada dilindungi pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun kelembagaan masyarakat dan bisnis. Sinergi dan jejaring merupakan upaya untuk mewujudkan tugas dan menjawab tantangan pembangunan secara bersama, menciptakan keseimbangan *check and balance*, dan membangun *trust* diantara pelaku pembangunan ekowisata.

Orientasi pengembangan desa wisata seyogyanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini perlu kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan secara wajar dan adil, baik terhadap alam maupun manusianya. Tidak hanyamanusiaya ngmemilikihak, juga alamingkunganmemilikihakyang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia yang memanfaatkannya. Optimalisasi daya dukung memerlukan pemahaman yang baik mengenai karakter, dinamika dan kecenderungan yang berkembang. Ini perlu dicermati dan diikuti, sehingga perkembangan itu mengarah pada kelestarian, bukan kerusakan.

5.2 Konsep dan Prinsip Dasar Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Inskip (1991) dengan sangat baik mengungkapkan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal di

dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Terkait dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Desa wisata, sebagai salah satu bentuk dari pariwisata pedesaan dapat memberikan banyak manfaat kepada upaya pengembangan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah pedesaan (Sugiarti,2008). Berbagai potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan pengalaman autentik kepada wisatawan dan sekaligus memberikan Kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pariwisata. Pengembangan desa wisata dengan demikian dapat menjadi salah-satu upaya untuk menumbuhkan potensi kewirausahaan lokal, mendiversifikasi produk pariwisata, menopang perekonomian masyarakat setempat, serta merevitalisasi budaya lokal.

Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi wilayah, pengembangan desa wisata disinyalir dapat mengatasi urbanisasi dan mendorong perekonomian pedesaan. Di samping itu pariwisata pedesaan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Sebagai salah-satu bentuk pariwisata alternatif, desa wisata dapat menjadi alat yang potensial untuk menunjang pembangunan lingkungan yang berkesinambungan (Oppermann, 1996; Crofts dan Holland,1993). Selain menimbulkan dampak positif, pengembangan desa wisata yang kurang terkontrol juga bisa memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan pedesaan. Dampak tersebut antara lain adalah meningkatnya tekanan

terhadap lingkungan akibat pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas untuk menunjang kegiatan desa wisata (Page and Gertz,1997).

Program pengembangan desa wisata tidak saja bertujuan untuk mendorong masyarakat desa dalam mengelola potensi alam serta budayanya secara kreatif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, namun lebih daripada itu ia juga bertujuan untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi persaingan global (Rahman, 2009). Dengan kata lain, pengembangan desa wisata memiliki tujuan utama untuk membangun masyarakat desa agar memiliki ketahanan budaya dan ekonomi. Dengan dukungan ekonomi atau modal yang memadai, masyarakat desa akan dapat mempertahankan dan mengembangkan warisan budayanya. Dengan demikian dalam pengembangan desa wisata yang berkarakter 'pro-rakyat' tujuan dan targetnya adalah memberikan kesempatan atau mendorong masyarakat agar lebih aktif, kreatif, dan pro-aktif dalam mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata di daerahnya.

Desa wisata merupakan salah satu bentuk Wisata Pedesaan. Wisata pedesaan merupakan perjalanan yang berorientasi menikmati suasana kehidupan pedesaan, menghormati serta memperoleh nilai tambah hidup dari budaya dan tradisi masyarakat setempat serta lingkungan alam, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan lingkungannya merupakan obyek dan daya tarik wisata. Lingkup desa wisata dapat berupa alam seperti gunung, persawahan, hutan, tebing, bentang alam, flora dan fauna, juga taman laut; budaya seperti peninggalan sejarah, adat istiadat, tradisi, kehidupan sehari-hari, dan karya arsitektur; atau berupa *saujana*, yaitu karya budaya (benda) yang 'menyatu' dengan bentang alam.

Karena itu perlu dipahami *kriteria dasar* pengembangan desa wisata antara lain : a) keberadaan obyek dan daya tarik: desa memiliki obyek daerah tujuan wisata, paling sedikit berdekatan dengan suatu obyek daerah tujuan wisata yang sudah terkenal, sehingga dapat dikaitkan dengan paket perjalanan yang sudah ada, b) memiliki akses fisik dan akses pasar, c) memiliki potensi kemitraan, d) adanya motivasi dan antusiasme masyarakat, dan, e) tersedianya fasilitas umum minimal. Namun kriteria ini nampaknya belum cukup operasional untuk diimplementasikan dalam memetakan dan melakukan tipologisasi terhadap desa-desa wisata yang terdapat di Bali.

Selain itu, pengembangan wisata pedesaan selayaknya memenuhi prinsip perencanaan sebagai berikut: a) memperhatikan karakteristik lingkungan setempat, b) menekan sekecil mungkin dampak negatif pengembangan kepariwisataan di desa tersebut, c) materi yang digunakan sesuai dengan lingkungan setempat, d) bahan-bahan operasional yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang atau hasil daur ulang serta memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebab wisata pedesaan bukan *mass tourism*, dan e) melibatkan masyarakat desa dengan menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku kegiatan kepariwisataan, yaitu menjadi pemilik langsung/tak langsung desa wisata tersebut dan kepemilikan atas tanah tidak dialihkan.

5.3 Kriteria-Kriteria Desa Wisata

Seringkali pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, mengalami kebingungan dalam melakukan seleksi terhadap puluhan calon desa wisata yang ada di wilayahnya. Pertanyaannya adalah; apakah yang bisa dijadikan tolok ukur dalam meloloskan atau menolak sebuah desa untuk ditetapkan sebagai desa wisata? Pihak aparat di

Dinas Pariwisata Kabupaten seringkali gamang (dilematis) bila dihadapkan pada sejumlah pertanyaan mendasar soal kriteria apakah yang dipergunakan dalam menyeleksi calon-calon desa wisata tersebut? Penyusunan kriteria desa wisata ini adalah dalam upaya menjawab kegamangan pihak Dinas Pariwisata tersebut, yang mungkin juga menjadi kegelisahan para pemangku kepentingan desa wisata yang lainnya.

Sebagai instrument untuk melakukan verifikasi faktual terhadap sembilan desa wisata di Gianyar, maka dirumuskan kriteria desa wisata yang terdiri dari delapan aspek, antara lain; aspek alam/bio hayati, aspek lingkungan fisik, aspek budaya, aspek amenitas/prasarana, aspek SDM, aspek kelembagaan, sikap dan tata kehidupan masyarakat, dan aksesibilitas. Ke delapan aspek memiliki jumlah kriteria yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing aspek (lihat Matrik 1). Demikian pula, masing-masing kriteria memiliki skor maksimal yang berbeda sesuai dengan bobotnya masing-masing. Proses terwujudnya kriteria desa wisata sebagai instrument verifikasi desa wisata ini melewati proses diskusi yang intensif dengan sejumlah pakar dan praktisi pariwisata, khususnya desa wisata.

Matrik 1. Kriteria Desa Wisata

A	A L A M/BIO HAYATI	Skor maksimal
1	Terdapat lanscape alam/geografis yang unik dan indah (terasering sawah, perkebunan, lembah, air terjun, gumpuk pasir,dll)	4
2	Terdapat fenomena hayati yang unik (goa kelelawar, hutan burung, dll)	3
3	Terdapat flora/tumbuhan yang endemik dan unik	3
4	Terdapat fauna/satwa yang endemik dan unik	3
5	Ada kemudahan mengamati satwa liar	2
6	Terdapat mata air(pancuran/beji)	2

7	Masyarakat memanfaatkan beji untuk kepentingan pariwisata	2
8	Terdapat tanaman langka	3
9	Terdapat kebun tanaman upakara	3
10	Warga memanfaatkan tanaman upakara sebagai bahan upacara adat (artinya, tingkat ketergantungan ke wilayah luar desa kecil)	2
11	Terdapat kebun tanaman obat/usada	3
12	Ketersediaan informasi yang akurat tentang vegetasi	3
13	Terdapat peluang untuk lintas alam (trekking, rafting, snorkeling, dll)	2
14	Suhu dan kelembaban udara yang nyaman	2
15	Curah hujan yang normal	2
16	Limbah industri kecil terkelola dengan baik	3
	JUMLAH	42
B	LINGKUNGAN FISIK	
1	Lingkungan fisik relatif masih alami	3
2	Memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan	2
3	Laju alih fungsi lahan sawah relatif terkontrol	3
4	Memiliki sistem pengolahan sawah/kebun secara organik	4
5	Badan air (sungai, telabah) terjaga dari polusi	2
6	Terdapat warga masyarakat yang memanfaatkan badan air untuk kegiatan produktif ramah lingkungan, misalnya memelihara ikan air tawar.	2
7	Terdapat lapangan olahraga atau alun-alun desa	2
8	Terdapat peta desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal.	4
9	Memiliki pembagian wilayah ke dalam tiga zone, yaitu; utama mandala (konservasi murni), madya mandala (pemanfaatan terbatas), nista mandala (pemanfaatan)	3
10	Memiliki pengaturan ruang desa tertulis (zonasi) yang telah tersosialisasikan kepada warga.	4
11	Terdapat pola pemukiman yang masih tradisional	3

12	Keberadaan telajakan di depan pekarangan masih dominan	2
13	Terdapat tanah adat berupa setra, hutan desa, dan laba pura.	2
14	Resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, tsunami)	3
	JUMLAH	39
C	BUDAYA	
1	Terdapat mitos/legenda desa	2
2	Terdapat ritual tradisi yg unik dan khas	4
3	Terdapat permainan tradisional yang masih hidup	2
4	Terdapat olah raga tradional yang masih hidup ¹	3
5	Terdapat bentuk kesenian tarian sakral yang masih hidup	4
6	Terdapat sekehe kesenian tari yang masih hidup	2
7	Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat. ²	3
8	Terdapat sekehe kesenian karawitan/sekehe gong yang masih 'hidup'	2
9	Terdapat sekehe kidung (seni suara tradisional) yang masih 'hidup'	2
10	Terdapat sanggar tari Bali	2
11	Ada tokoh seniman tari yang masih aktif berkreatifitas	4
12	Pernah ada seniman tari berskala maestro yang saat ini telah meninggal, namun sejarah dan ketokohnya masih dirasakan masyarakat.	3
13	Terdapat warga yang berprofesi sebagai <i>usada</i> (healer)	3
14	Terdapat kuliner khas desa dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat	2
15	Terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal (chef lokal), minimal 4 orang	3
16	Terdapat artefak sejarah berupa situs purbakala yg diakui Negara	4
17	Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif	3

18	Ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya menyeimbangkan antara merawat seni dan mengkomersialkan seni ³	3
19	Ada aturan tegas dalam menjaga kesenian sacral	3
20	Terdapat pura kahyangan tiga dengan ornamen arsitektur Bali yang khas	3
21	Terdapat sistem siklus piodalan di pura yang dilakukan krama secara berkelanjutan dan mandiri	2
22	Terdapat aturan (<i>code of conduct</i>) perihal tata-cara memasuki pura secara tertulis yang telah disepakati oleh seluruh warga desa.	3
23	Lingkungan sekitar jabe sisi pura (area depan dan samping) tertata dengan asri, hijau, dan lapang.	2
24	Terdapat kelompok petani yang masih menggunakan bajak.	3
	JUMLAH	67
D	AMENITAS/INFRA-STRUKTUR	
1	Terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai sebagai homestay	3
2	Terdapat bangunan balai banjar yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (kantor pengelola, tourism center, dll)	2
3	Terdapat toilet yang cukup layak di area balai banjar	2
4	Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 mobil)	3
5	Terdapat jalan desa yang aman dan memadai	4
6	Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri	2
7	Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman	3
	JUMLAH	19
E	KELEMBAGAAN	
1	Terdapat struktur dan perangkat banjar adat yang bekerja efektif	2
2	Terdapat awig-awig banjar/desa pakraman yang tertulis	2
3	Terdapat lembaga adat Kerta desa	2

4	Terdapat lembaga sabha desa	4
5	Terdapat struktur dan perangkat organisasi Subak yang bekerja efektif	2
6	Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja efektif	2
7	Terdapat sistem disaster mitigation berbasis lokal (kulkul)	2
8	Terdapat Lembaga Perkreditan Desa yang berkembang sehat dan dinamis	2
9	Terdapat koperasi banjar/desa yang bekerja secara efektif	2
10	Terdapat kelompok warga (sekehe) pengelola sampah/pemilah sampah yang telah berdiri minimal 6 bulan terakhir.	4
F	SDM	
1	Terdapat warga masyarakat usia produktif yang cukup besar dan mukim di desa (> 30%) ⁴	2
2	Terdapat warga yang merupakan alumni sekolah SMK Pariwisata (minimal 2 orang)	2
3	Terdapat warga yang menguasai bahasa asing	2
4	Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, travel, dll)	2
5	Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas kelompok yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian).	3
6	Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit-unit usaha yang dibentuk oleh desa/banjar adat (misalnya LPD, koperasi, kelompok sampah, pasar desa).	2
7	Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengerajin berbasis tradisi (ukiran, undagi, pande, pembuat alat upacara, pakaian, kuliner tradisional, dll)	3
	JUMLAH	16
G	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT	
1	Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa ⁵	2
2	Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan.	2

3	Masih ada sistem gotong-royong yang berlangsung secara berkelanjutan	2
4	Potensi konflik kecil	3
5	Terdapat sistem resolusi konflik internal (dadia, antar dadia, banjar)	3
6	Terdapat sistem resolusi konflik eksternal (pasuwitran nyatur desa)	3
7	Respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin banjar adat masih kuat.	3
8	Proporsi penduduk pendatang kecil (maksimal 25 %) ⁶	3
9	Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang, UKM)	3
10	Memiliki Jenis Partisipasi Aktif	3
	JUMLAH	27
H	AKSESIBILITAS	
1	Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik	2
2	Jarak ke pusat kota kabupaten cukup dekat	2
3	Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai ⁷	2
4	Memiliki moda transportasi local	3
5	Kepemilikan mobil pribadi relatif rendah ⁸	3
	JUMLAH	12

5.4 Contoh Kasus: Verifikasi Desa Wisata Gianyar

Sebagai contoh kasus penerapan Kriteria desa wisata, penulis mencoba memverifikasi Sembilan desa wisata di Kabupaten Gianyar. Dari sembilan desa wisata di Gianyar yang diverifikasi/dikaji, akhirnya diperoleh tabulasi hasil verifikasi desa wisata (Matrik 2). Dari matrik terlihat bahwa Desa Kemenuh memperoleh skor penilaian tertinggi (211) dan skor terendah diraih oleh desa Kendran (179). Selain itu dari hasil penilaian dapat dilihat bahwa ada empat desa tergolong ke dalam kategori Sangat Memenuhi dan lima desa

tergolong ke dalam kategori Memenuhi. Selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut bisa dimunculkan program dan strategi pengembangan yang sesuai dengan hasil verifikasi tersebut.

Hasil verifikasi yang sudah dilakukan menjadi dasar yang penting dan dituangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata kabupaten Gianyar. Sementara itu dua kabupaten yang lain, yaitu Kabupaten Badung dan Karang Asem juga memakai Kriteria Desa Wisata yang dihasilkan ini sebagai instrument dalam melakukan verifikasi terhadap desa-desa wisata di kedua kabupaten tersebut.

Matrik 2 Tabulasi Verifikasi Desa Wisata Kab. Gianyar

Aspek	Ke- menuh	Taro	Singa- padu Tengah	Kerta	Singa- padu Kaler	Batubu- lan	Ke- disan	Mas	Kend- ran
Alam/bio hayati	27	40	21	34	20	17	24	18	21
Lingkun- gan Fisik	29	24	29	34	28	26	29	21	34
Budaya	63	47	58	40	56	61	49	55	40
Infrastruk- tur	17	16	12	14	14	13	14	18	11
Kelem- bagaan	22	24	23	18	23	19	15	20	22
SDM	14	16	16	14	16	14	16	16	15
Sikap & TKM	23	23	25	24	20	22	24	23	23
Aksesi- bilitas	16	10	15	15	13	17	13	11	13
Skor Total	211	200	199	193	190	189	184	182	179
KATEGORI	SM	SM	SM	SM	M	M	M	M	M

Range Skor :

- Sangat memenuhi : 191-254
- Memenuhi : 127-190
- Cukup memenuhi : 64-126
- Kurang memenuhi: 0-63

5.5 Kesimpulan

Kriteria desa wisata sebagai instrument untuk melakukan verifikasi desa wisata yang dihasilkan dalam penelitian ini terdiri dari delapan aspek, antara lain; (1) aspek alam/bio hayati, (2) aspek lingkungan fisik, (3) aspek budaya, (4) aspek amenitas/prasarana, (5) aspek Sumber Daya Manusia (SDM), (6) aspek kelembagaan, (7) sikap dan tata kehidupan masyarakat, dan (8) aspek aksesibilitas. Ke delapan aspek memiliki jumlah kriteria yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing aspek. Sedangkan, masing-masing kriteria memiliki skor maksimal yang berbeda sesuai dengan bobotnya masing-masing.

Sembilan desa wisata di Kabupaten Gianyar yang diverifikasi dalam penelitian ini terpilah dalam dua kategori yaitu empat desa termasuk ke dalam kategori Sangat Memenuhi (Kemenuh, Taro, Singapadu Tengah, dan Kerta) dan lima desa termasuk ke dalam kategori Memenuhi (Singapadu Kaler, Batubulan, Kedisan, Mas, dan Kendran). Desa dengan skor tertinggi diraih oleh Desa Kemenuh, dan desa dengan skor terendah diraih oleh desa Kendran, Tegallalang.

Hasil penelitian ini sesungguhnya telah melalui proses '**hilirisasi hasil riset**' karena telah dipergunakan oleh tiga kantor Dinas Pariwisata Kabupaten di Bali sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pariwisata, yakni: kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem, melalui kegiatan Kajian Potensi Desa Wisata. Khusus untuk Kabupaten Gianyar bahkan sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Sedangkan di kabupaten Badung hasil kajian kriteria desa wisata sedang berproses menjadi produk hukum berbentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

BAB VI

KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

6.1 Pendahuluan

Dalam bab berikut mahasiswa bisa mempelajari anatomi konflik yang terjadi dalam pembangunan pariwisata serta bagaimana konflik tersebut dimediasi dan dicarikan solusinya. Guna mendukung pemahaman mahasiswa dalam mengidentifikasi konflik disertakan sejumlah potret relasi hubungan antara desa dengan investor di kawasan pariwisata Ubud. Dalam setiap kasus digambarkan kronologis kasus, aktor-aktor yang terlibat, kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor, dan interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor sehingga memunculkan problematik tata hubungan. Antar masing-masing kasus memiliki tingkat kedalaman dan keluasan deskripsi yang beragam, tergantung dari kualitas informasi yang ditemukan di lapangan. Dengan mendalami bab ini mahasiswa diharapkan memahami bagaimana konflik dalam pengembangan pariwisata bisa muncul, menemukenali gejala konflik, dan menganalisis akibat dari adanya konflik.

6.2 Bali dalam Pusaran Konflik Pariwisata

Apa yang Anda bayangkan dengan Bali manakala dilekatkan dengan predikatnya sebagai sebuah destinasi pariwisata terkenal di dunia? Pulau Surga, Pulau Dewata, pulau Seribu Pura, Pulau Kesenian, atau Pulau Eksotik? Tidakkah semua atribut yang melekat pada Bali ini hanyalah delusi?

Sesungguhnya proyek romantisasi atas Bali sebagai tujuan pelancongan sempurna mulai digarap oleh Belanda

sejak tahun 1920-an. Pemerintah Kolonial Belanda-lah yang secara terus-menerus membangun citra Bali yang eksotik, unik, setelah sebelumnya Belanda melakukan reorganisasi desa, memperkenalkan desa dinas untuk kepentingan administrasi dan pemungutan pajak (Schulte Norddholt, 2002). Belanda mereproduksi citra Bali yang eksotik untuk kepentingan ekonomi pariwisata, karena Bali tidak menghasilkan rempah-rempah maupun hasil perkebunan besar seperti halnya pulau-pulau lainnya di Nusantara. Dengan tepat sejarahwan Adrian Vickers (1989) menyebutkan Bali sebagai “*created image*”, ‘citra buatan’. Dengan ‘citra buatan’ ini pula pemerintah Bali maupun pemerintah Indonesia di Pusat (Jakarta) bersama-sama dengan pemilik modal, pengusaha, lantas berusaha “mati-matian” mereproduksi Bali agar tetap menjadi masa lalu meskipun kenyataan *setting* sosial-ekonomi Bali sudah berubah.

Pariwisata sebagai bisnis citra pada intinya sesungguhnya merupakan perjumpaan budaya lokal (Bali) dengan budaya wisatawan, budaya tenaga kerja pendatang, maupun budaya pariwisata itu sendiri (Smith, 1989). Konsekuensi logis bagi Bali yang sengaja membuka diri sebagai daerah tujuan wisata adalah masuknya secara intensif berbagai pengaruh kebudayaan modern terhadap sistem sosio-kultural Bali. Terlebih lagi ketika Bali dijadikan daerah wisata massal (*mass tourism*) yang menuntut fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan berstandar internasional, asing, sehingga intrusi unsur-unsur budaya modern pun tidak terhindarkan terjadi dengan massif di Bali.

Modernisasi tidak terelakkan membawa dampak kepada Bali untuk memasuki masa transisi dari tradisi agraris ke kehidupan sistem industri, jasa, dan perdagangan yang memiliki tatanan berbeda dengan tradisi agraris Bali sebelumnya. Hal ini tidak terhindarkan membawa konsekuensi perbenturan antara tata nilai tradisi (lama) dengan tata nilai modern (baru),

yang secara individu maupun kolektif mengantarkan orang Bali menjadi rentan konflik dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal (c.f. Supardi Suparlan, 1981).

6.3 Konflik Pariwisata

Kawasan Wisata Ubud sebagai sebuah obyek wisata, telah berkembang sejak tahun 1930-an. Ketika itu beberapa pelukis Barat, seperti Walter Spies, Antonio Blanco, Bonnet, menetap di Ubud dan berinteraksi dengan pelukis-pelukis desa Ubud. Saat ini selain sebagai salah-satu desa wisata dengan *trendmark* desa lukisan tradisional, Ubud juga memiliki puluhan hotel dan restoran yang dikelola oleh pengusaha lokal maupun pengusaha dari luar Ubud. Selain hotel-hotel besar, terdapat pula ratusan villa, bungalow skala kecil yang dikelola warga lokal. Berbagai fasilitas pariwisata tersebut tidak hanya berlokasi di pusat desa Ubud, namun juga menyebar ke desa-desa di sekitar Ubud, seperti Desa G, SY, dan B. Keberadaan berbagai fasilitas wisata tersebut di satu sisi telah mampu membawa kemajuan wilayah terutama dari aspek ekonomi. Banyak warga lokal maupun pendatang yang bekerja di hotel-hotel dan restoran. Akibatnya tumbuh pula usaha penyediaan tempat tinggal berupa kos-kosan. Ekonomi produktif masyarakat lokal pun menggeliat. Kesejahteraan warga merangkak maju.

Di sisi lain, sering muncul ketegangan atau konflik antara pengusaha pariwisata dengan pengurus *desa pakraman* (adat) terkait dengan pola relasi yang ada. Hubungan masyarakat lokal (*desa pakraman*) dengan investor (pengusaha jasa pariwisata) selama ini masih sering diwarnai berbagai problematik. Tidak aneh kemudian bila kemudian banyak muncul kasus perselisihan antara pihak *desa pakraman* dengan pihak investor. Salah-satu contoh kasus yang mencuat ke media massa adalah kasus di Desa SY G, Ubud pada tahun

2004. Kasus tersebut terjadi antara pengelola salah-satu hotel berbintang dengan pengurus *desa pakraman* terkait dengan besaran sumbangan hotel kepada pihak desa. Kasus tersebut sesungguhnya ibarat puncak gunung es dari banyaknya persoalan yang masih tersembunyi di bawah permukaan terkait dengan pola relasi antara ke dua belah pihak. Berbagai permasalahan tersebut timbul akibat belum jelasnya tata aturan menyangkut prosedural masuknya investor ke *desa pakraman*.

Di satu sisi pihak investor menghadapi ketidakjelasan ketika melakukan negosiasi dengan pihak desa, menyangkut berbagai macam tuntutan *desa pakraman*. Pihak *desa pakraman*, misalnya, dianggap sering mengajukan sharing prosentase pungutan yang tinggi setiap bulan tanpa argumentasi yang jelas. Demikian juga tuntutan desa tentang pelibatan warga (*krama desa*) dalam proyek investor sering tidak masuk akal. Di sisi lain, pihak investor dianggap sering mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Fenomena-fenomena demikian tentu saja akan mudah memunculkan masalah di kemudian hari.

Tidak selalu memang sumber masalah berasal dari sikap 'bandel' atau sikap tidak mau tahu pihak investor. Dalam banyak kasus malah sering terungkap bahwa sumber persoalan justru bermula dari lemahnya pemahaman pihak *desa pakraman* dalam merumuskan aturan-aturan yang jelas dalam *awig-awig* atau *perarem* yang ada guna menentukan posisi tawar dengan investor. Para *bendesa adat* dan *prajuru* lainnya terkesan belum memiliki wawasan yang cukup memadai bermain dalam percaturan sistem ekonomi modern. Akibatnya, banyak tuntutan-tuntutan pihak *desa pakraman* yang tidak rasional dalam bernegosiasi dengan investor. Pada kondisi ekstrim desa sering muncul menjadi sosok yang terlampau kuat (*super power*), sehingga sering menindas kepentingan para investor.

Di tengah pusaran persoalan tersebut, posisi *desa pakraman* dalam bernegosiasi dengan pihak luar, termasuk pengusaha pariwisata semakin terjepit. Dalam beberapa kasus konflik *desa pakraman* dengan investor membuktikan betapa lemahnya posisi *desa pakraman* terhadap investor. Para pengusaha pariwisata dalam berbagai kasus yang muncul telah didampingi oleh seorang pengacara hukum yang handal dan dilindungi hukum nasional. Sementara *prajuru desa adat* tampil hanya dengan pemahaman-pemahaman hukum adat yang sepotong-sepotong. Terkadang pengacara sebagai mediator dari pihak investor menyelesaikan permasalahan berdasarkan hukum nasional, sehingga menyebabkan proses penyelesaian masalah tidak sesuai dan berbeda dengan pola penyelesaian yang ada pada sistem adat lokal. Akibatnya, *desa pakraman* lebih sering berada di posisi yang kalah.

6.4 Kasus-Kasus Relasi Desa dengan Investor

a. Hotel Asri; kerja sama saling menguntungkan

Hotel Asri yang merupakan hotel berbintang empat berdiri pada tahun 2003. Pemilik hotel ini adalah seorang warga negara Singapura yang juga memiliki beberapa *corporate* di bidang lainnya di berbagai negara belahan dunia. Hotel Asri hanya salah-satu bagian kecil dari kerajaan bisnis sang Taipan.

Pada awal berdiri terjadi kesepakatan tidak tertulis antara pihak hotel dengan masyarakat Banjar A, tentang prosentase tenaga kerja. Kesepakatan tersebut berisikan bahwa 20 % dari total seluruh karyawan Hotel Asri harus diisi dari warga Banjar A. Pada awal pendiriannya, pihak hotel berencana merekrut tenaga kerja sebanyak 120 orang. Saat itu terdapat 107 orang warga banjar yang melamar, sedangkan jatah yang tersedia untuk masyarakat setempat sejumlah 24 orang. Pihak Uma Hotel melakukan seleksi sesuai dengan prosedur professional yang berlaku, yakni dengan memperhatikan keahlian calon

karyawan. Setelah dilakukan proses rekrutmen terjadi protes yang dilakukan oleh pihak masyarakat dengan mengadakan demonstrasi ke hotel. Aksi tersebut dapat direspon oleh manajemen hotel dengan baik sehingga tidak sampai terliput ke media massa. Setelah ditelusuri demonstrasi tersebut ternyata dimotori oleh sekelompok warga banjar yang kecewa karena keluarganya tidak diterima dalam proses seleksi karyawan. Masalah dapat diselesaikan dengan terjalannya komunikasi antara pihak hotel dengan warga Banjar A.

Pihak pengelolaan SDM Hotel Asri mengakui bahwa kualitas tenaga kerja yang berasal dari banjar cukup baik, hal ini tercermin dari jenjang karier yang mereka capai cukup bagus. Pada awal masuk mereka memang masih ditempatkan sebagai tenaga kerja level terendah, seperti tenaga Satpam (*security*), tukang kebun (*gardener*), pencuci piring, dan pembersih kamar hotel (*room boy*). Namun setelah bekerja cukup lama beberapa orang dari mereka berhasil mencapai posisi pengawas staf (*supervisor*). Salah-satu karyawan asal Banjar A malah telah berhasil mencapai posisi sebagai *Purchasing Manager*, yang tugasnya adalah mencarikan bahan-bahan kebutuhan hotel sehari-hari di luar lingkungan hotel.

Selain terpenuhi tuntutan soal prosentase tenaga kerja, warga Banjar A juga diberi kesempatan berkontribusi dalam hal penyediaan atraksi kesenian berupa tari-tarian dan gamelan (tabuh) di hotel manakala dibutuhkan. Di samping itu pihak hotel juga menyewa beberapa kendaraan pribadi (*rent car*) warga A untuk operasional hotel. Keseluruhan kerja sama tersebut belum tertuang dalam kesepakatan tertulis. Pihak manajemen hotel terkesan membiarkan agar kesepakatan antar hotel dengan masyarakat tersebut statusnya tidak tertulis. Tujuannya, agar pihak hotel mempunyai *bargaining positioning* yang kuat tatkala berhadapan dengan pihak masyarakat lokal.

Komunikasi yang baik antara pihak hotel dengan masyarakat setempat dipandang menjadi kunci keberhasilan dalam menjalin tata hubungan selama ini. Dalam hal ini, kualitas dan kapasitas pimpinan banjar (*kelihan*) sangat menentukan model komunikasi yang terbentuk. Apabila kelihannya memiliki kapasitas yang baik, maka ia akan bisa menjaga netralitas perannya dari berbagai kepentingan jangka pendek dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Namun sebaliknya, apabila kapasitas informal leader tersebut buruk, di mana ia tak dapat ‘memegang’ masyarakat yang dipimpinnya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, maka pola kepemimpinan yang dijalankannya juga buruk. Pernah ada kasus, *kelihan* merekomendasikan seorang warganya yang tidak ada pertalian darah dengan diri *kelihan*, untuk diterima di hotel. Padahal pada saat yang bersamaan keponakannya sendiri juga ikut melamar. *Kelihan* merekomendasikan warganya tersebut dengan pertimbangan calon tenaga kerja tersebut mempunyai keahlian yang baik dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pihak manajemen hotel menilai sikap *kelihan* ini sebagai sebuah cermin kedewasaan dalam memimpin. Selanjutnya manajemen hotel cukup ‘memegang’ *kelihan* tersebut dalam berkomunikasi dengan pihak banjar adat.

Pihak banjar juga meminta peran dalam pelaksanaan upacara keagamaan yang terkait dengan operasional hotel, misalnya, dalam acara peresmian tempat atau lokasi hotel. Dalam tradisi keagamaan di Bali peresmian sebuah tempat sebagai lokasi usaha apapun harus diawali dengan sebuah upacara *pecaruan*, walaupun si pemilik usaha berasal dari luar Bali dan bukan penganut Hindu. Pengurus dan warga Banjar A meminta pihak hotel membeli bahan upacara dari mereka. Pada saat itu karena tidak ingin mencari masalah, pihak hotel menyetujui tawaran pihak banjar tersebut, walaupun harga bahan upacara yang ditawarkan pihak banjar lebih mahal dari

harga rata-rata yang berlaku. Dalam masa-masa berikutnya, setiap acara upacara di tempat pemujaan Hindu di lingkungan hotel setiap enam bulan, pihak hotel selalu membeli bahan upacara kepada pihak banjar A.

b. Hotel *Bagus*, Payangan; Premanisme desa adat

Hotel *Bagus* hanya salah satu chain dari jaringan bisnis pemilik (orang Singapura). Beberapa unit bisnisnya menggurita di 22 negara lainnya di seluruh dunia, mulai dari usaha hotel, fashion, media penerbitan, dan yayasan yang bersifat *charity* (sosial). Kehadiran Hotel *Bagus* di daerah Payangan, tepatnya di banjar B, telah memberikan dinamika baru bagi kalangan masyarakat. Hotel bagi sebagian besar warga banjar dipandang sebagai simbol keberlimpahan uang, keberhasilan bisnis, kemudahan memperoleh pekerjaan. Masyarakat yang masih bercorak agraris tidak memahami bagaimana logika investasi itu berjalan. Bagi mereka logikanya amat sederhana; kedatangan hotel adalah rejeki bagi desa, karenanya haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin.

Sejak pertama kali berdiri masyarakat sekitar hotel menuntut agar karyawan hotel 40 % berasal dari masyarakat lokal. Selain itu pihak hotel dituntut agar menerima anak-anak muda banjar B yang membutuhkan training bekerja bisa diterima di hotel *Bagus*. Dalam proses penerimaan tenaga kerja inilah persoalan kerap kali muncul. Warga masyarakat yang keluarganya ditolak bekerja atau training beberapa kali mengancam manajer HRD hotel, yang kebetulan seorang wanita. Si manajer diancam secara langsung di kantornya dan diminta untuk berhati-hati dalam perjalanan berangkat dan pulang dari hotel. Puncaknya, beberapa kali terjadi penutupan jalan masuk ke hotel oleh warga yang melakukan aksi protes.

Ada empat banjar di sekitar hotel yang meminta setoran uang dari hotel setiap bulannya. Besarnya di atas Rp 1 juta. Selain itu hotel juga wajib menyampaikan sumbangan

kepada pura di masing-masing banjar apabila pura tersebut melangsungkan upacara odalannya. Sumbangan bisa berwujud uang ataupun barang. Kalau berupa uang nilainya rata-rata 1 juta rupiah. Selain itu pihak organisasi pemuda banjar adat (*sekehe teruna*) juga meminta sumbangan bazaar setiap tahunnya. Nilainya rata-rata Rp.500 ribu. Di luar berbagai sumbangan wajib di atas, hotel masih dibebani pula dengan permintaan sumbangan spontan, misalnya bila ada perbaikan tempat suci (pura). Kondisi demikian menyebabkan pihak bagian keuangan hotel menghadapi ketidakpastian yang berlanjut.

Problem lainnya adalah soal pengaturan waktu libur. Karena sebagian besar karyawan hotel berasal dari banjar sekitar hotel *Bagus*, maka ketika ada upacara di pura banjar setempat, maka karyawan kompak minta jatah libur. Hal demikian sudah barang tentu sangat merepotkan pihak manajemen hotel dan mengganggu kinerja hotel secara keseluruhan. Pihak hotel kesulitan dalam menerapkan aturan hotel secara tegas karena apabila sanksi dijatuhkan terhadap karyawan yang melanggar, maka pihak banjar akan membela warganya yang terkena sanksi itu. Saat ini, kelihan dusun banjar B juga bekerja di hotel sebagai *gardener manager*.

Pihak manajemen hotel *Bagus* mengungkapkan tentang hampirtakadanya peran asosiasi semacam PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dalam memediasi konflik yang terjadi antara hotel dengan masyarakat lokal. Hotel merasakan 'kesendirian' dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di bawah. Dalam upaya meningkatkan komunikasi antar pengusaha pariwisata di kawasan Payangan para pengusaha berinisiatif membentuk semacam forum komunikasi bersama antar pengusaha yang ada. Dalam forum tersebut didiskusikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal.

c. Hotel *Cantik*; terjepit di antara lima desa adat

Hotel *Cantik* berdiri pada tahun 2002 berlokasi di wilayah desa pakraman C, Kecamatan Payangan. Lokasi hotel ini masuk ke barat menerobos area persawahan dari ruas jalan raya G-Payangan-Kintamani, berada persis di pinggir jalan Tukad Ayung. Tepat di seberang hotel, juga terdapat areal persawahan yang merupakan wilayah Desa Karang F, Kabupaten Badung. Sebelum berganti nama menjadi *Cantik*, hotel tersebut bernama Hotel Ayu. Pemilik (*owner*) Hotel *Cantik* berasal dari Kota Surabaya Jawa Timur, seorang warga keturunan Tionghoa.

Pada masa awal berdirinya, yaitu sekitar tahun 1990-an, terjadi konflik yang cukup keras antara pihak *owner* dengan masyarakat. Konflik tersebut dipicu oleh tidak beresnya persoalan jual-beli tanah dari petani pemilik tanah kepada pihak investor akibat campur tangan pihak ketiga (makelar tanah). Masyarakat merasa dipermainkan oleh makelar tanah yang menentukan harga dengan seenaknya. Kasus tersebut terekspose secara luas, bahkan sempat masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Gianyar. Namun karena Bupati Gianyar pada saat itu, dengan cepat memediasi konflik yang terjadi, maka perseteruan terbuka di ruang pengadilan bisa cegah. Bupati memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ketertiban dalam menjaga suasana kabupaten Gianyar agar tetap kondusif bagi pengembangan pariwisata.

Selain harus berhubungan dengan Desa Pakraman C, pihak hotel pun harus berurusan dengan empat banjar lainnya, yaitu Banjar D, Banjar Penaka, Banjar E, dan Banjar Karang F. Banjar C merasa berhak mendapat perhatian hotel karena lokasi hotel *Cantik* berada di wilayah Banjar C. Banjar D beralasan karena hotel berada dekat dengan wilayahnya. Demikian pula pihak Banjar E berargumentasi karena satu-satunya akses jalan menuju hotel *Cantik* harus melewati wilayah banjar E. Sedangkan pihak banjar F, beralasan bahwa pihak hotel telah memanfaatkan view

atau panorama persawahannya. Mereka kompak menghadapi pihak hotel dengan tuntutan yang seragam.

Selain berbagai alasan di atas, strategi banjar/desa dalam meminta sumbangan ke hotel dilakukan dengan melakukan kesepakatan dulu diantara sesama lima desa tentang isi dan besaran tuntutan mereka. Setelah terjadi kesepakatan internal 5 banjar, barulah mereka bersama-sama menemui pihak hotel untuk bernegosiasi. Dalam kondisi 'terkepung' maka pihak hotel pun akhirnya memenuhi tuntutan masing-masing desa tersebut.

Beberapa kesepakatan yang tercapai dan telah berjalan hingga sekarang, antara lain : *pertama*, hotel *Cantik* wajib memberikan sumbangan berupa uang sebesar 4 juta rupiah kepada masing-masing banjar setiap bulannya. *Kedua*, hotel *Cantik* berkewajiban mengakomodasi warga ke lima banjar untuk bekerja di hotel sebesar 60 % dari total jumlah karyawan hotel. *Ketiga*, pihak hotel berkewajiban memberikan sumbangan (*dana punia*) ke pura-pura kahyangan tiga yang ada di masing-masing banjar pada saat hari piodalan. Sumbangan tersebut dapat berupa daging babi, beras, dan uang. *Keempat*, pihak hotel harus mempertimbangkan mempergunakan kelompok-kelompok kesenian yang ada di masing-masing banjar untuk keperluan atraksi kesenian di hotel *Cantik*, misalnya kesenian tari-tarian, gambelan, kecak, dan lain lain.

Selain harus melayani berbagai tuntutan dari kelima banjar di sekitarnya, pihak hotel juga harus memenuhi tuntutan pihak Subak di sekitar hotel. Subak meminta sejumlah sumbangan dana manakala ada odalan di pura Subak yang jatuh setiap 210 hari.

d. Kasus Jeram Melayani Desa Adat; Nak Belog Ngabe Bedil

Jeram, perusahaan rafting yang beroperasi sejak 3 Oktober 1989, berlokasi mulai hulu Sungai Ayung tepatnya di Desa B Payangan dan berakhir di Desa G, Ubud. Usaha *Jeram*

mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2000-2002. Saat itu puluhan tamu manca negara memanfaatkan jasa *Jeram* setiap harinya berekreasi mengarungi aliran sungai Ayung. Namun pasca Bom Bali I tahun 2002, jumlah tamu yang dilayani mulai menyusut. Sebagai sebuah usaha atraksi alternative perkembangan usaha *Jeram* cukup stabil.

Alur sungai Ayung yang dilewati jalur rafting sepanjang lebih kurang 8 kilo meter dengan melintasi wilayah 11 desa pakraman. Termasuk salah satu desa yang berada di Kabupaten Badung, karena sungai Ayung sendiri merupakan perbatasan antara wilayah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar. Sebagai bentuk tanggung-jawab sosial, perusahaan memberikan sumbangan kepada 11 desa yang menjadi penyanding usaha *Jeram*. Dua desa yang berokasi di ujung alur rafting, diberikan keistimewaan berupa dipakainya penduduk setempat sebagai tenaga porter (jasa pengangkut perahu karet). Porter tersebut digaji rata-rata dua juta rupiah sebulan per orang, ditambah lagi dengan bonus lembur.

Persoalan utama dalam mengelola manajemen usaha adalah dalam menghadapi orang-orang preman di desa yang selalu memeras perusahaan. Masalahnya bukan pada besarnya sumbangan yang diminta, namun pada ketidakpastian pola sumbangan, baik waktu, besarnya dana, maupun kepentingan pengambilan sumbangan. Desa tidak pernah memberikan penjelasan penggunaan sumbangan yang diberikan perusahaan kepada desa. Desa adat juga tak mempunyai basis argumentasi yang kuat, misalnya dalam bentuk awig atau *perarem* desa, dalam meminta sumbangan kepada perusahaan. Desa hanya berpedoman pada kasus yang terjadi di desa lain, di mana desa tersebut dapat memperlakukan usaha pariwisata dalam wilayahnya sebagai salah-satu sumber untuk mendapatkan dana secara rutin. Dalam konteks inilah pihak manajemen *Jeram* menganggap hubungan mereka dengan warga masyarakat desa seperti *ngarepin nak belog ngandong*

bedil (peribahasa bahasa Bali, artinya: menghadapi orang bodoh, tapi memanggul memanggul senapan). Pentolan-pentolan warga desa memang terlihat lugu, bodoh, tidak berpengalaman, namun pada saat melancarkan siasat atau strategi menghadapi pengusaha mereka bisa mengeluarkan berbagai strategi yang cerdas, meskipun sering memojokkan pihak investor.

Jenis-jenis pungutan tersebut yang dikenakan terhadap *Jeram* antara lain; penerimaan sebagai karyawan *Jeram*, sumbangan kupon bazaar, perbaikan pura, jasa akses penggunaan jalan setapak subak, dll. Sumbangan terbesar diminta oleh dua desa yang menjadi titik start dan finish jalur rafting *Jeram*, yaitu Desa B (Payangan) dan desa G (Ubud).

Dalam melakukan negosiasi dengan desa, *Jeram* menggunakan jasa orang berpengaruh di desa sebagai tenaga konsultan. Ia semacam penghubung kepentingan-kepentingan hotel terhadap masyarakat. Cara sejenis sering diterapkan oleh sebagian besar bentuk usaha pariwisata di daerah Payangan. Jadi ada satu orang kuat yang dipegang untuk berurusan dengan masyarakat lokal. Orang kuat ini bisa berupa tokoh pemimpin formal (perbekel, kelihan, atau pekaseh) namun bisa saja orang kuat tersebut hanya seorang orang kuat/preman desa/bigman yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Dalam pengamatan pihak manajemen *Jeram*, ada perbedaan yang jelas terkait kinerja antara karyawan dari luar masyarakat setempat dengan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat. Tenaga kerja lokal (dari masyarakat setempat) memiliki kinerja yang buruk, tidak punya motivasi untuk maju, sering mengacaukan jalur birokrasi perusahaan. Karakter demikian tumbuh dari perasaan warga lokal yang merasa berada 'di atas angin' dari perusahaan, sehingga walaupun mereka berperilaku menyimpang dari aturan kerja, perusahaan akan segan menegur, karena ada adat yang melindungi kepentingan mereka.

Terdapat hal yang ganjil menyangkut isi perjanjian antara pihak perusahaan dengan salah-satu pemilik tanah yang digunakan oleh *Jeram* sebagai akses masuk ke sungai. Dalam perjanjian yang dibuat dengan pemilik tanah di awal berdirinya usaha rafting, salah-satunya berbunyi; *Jeram* harus menyediakan pekerjaan bagi anak si pemilik tanah, kelak bila anak tersebut sudah cukup umur untuk bekerja. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh notaris. Pada saat perjanjian tersebut dibuat si pemilik tanah belum menikah. Saat ini anak si pemilik tanah sudah bersekolah SD (Sekolah Dasar).

Selain itu, terjadi kecemburuan di masyarakat karena keluarga tertentu saja yang mendominasi bekerja di *Jeram*. Ke depan manajemen *Jeram* akan menerapkan sistem kontrak dengan pihak *sekehe teruna* (organisasi karang teruna). Misalnya, untuk mengangkat satu perahu karet ke sungai dibayar Rp.40.000, siapapun tenaga yang mengangkut, diatur oleh organisasi *sekehe teruna*.

Apa yang dialami oleh perusahaan *Jeram*, sebelumnya pernah menimpa perusahaan rafting yang lain. Namun perusahaan tersebut kurang memiliki ketahanan dalam menghadapi segala tuntutan dari masyarakat lokal, sehingga perusahaan tersebut lebih memilih pindah ke lokasi lain. Pada titik yang berlawanan, pihak desa adat juga menunjukkan sikapnya yang tidak adil, karena usaha rafting yang dimiliki pengusaha lokal tidak dikenai sumbangan.

e. Hotel Damai; Konflik Panjang berbuah Kerjasama

Pembangunan Hotel *Damai* di Banjar H, Desa SY, Kecamatan Ubud, Gianyar diwarnai oleh berbagai konflik sejak awal berdirinya. Jika merunut kembali kisah ketidakharmonisan warga Banjar H dengan pihak pengelola hotel *Damai*, sejatinya telah muncul sejak kali pertama hotel ini akan dibangun, yakni pada tahun 1993. Saat akan mengadakan pembangunan hotel di wilayah ini, pihak perhotelan memang

lebih banyak berhubungan langsung dengan pihak desa dinas, yang kala itu dijabat Kepala Desa SY almarhum Made T. Karena SY baru dimekarkan dari Desa G, maka Kepala Desa waktu itu merupakan hasil penunjukkan langsung dari pemerintah daerah, bukan berdasarkan pemilihan oleh rakyat.

Entah bagaimana perhitungannya, ternyata setelah hotel *grand opening* tahun 1997, pihak warga Banjar H yang notabene menjadi tempat *Damai* dibangun tak mendapat perhatian sama sekali. Sumbangan dalam bentuk apapun tak pernah diberikan. Pun pengangkatan karyawan yang biasanya diambil beberapa persen dari pihak warga banjar, juga tak ada realisasinya. “Pada 1997 Kades SY katanya sempat ditawarkan pihak hotel *Damai*, bahwa Desa SY mendapat jatah tenaga kerja di hotel,” ungkap Kelian Dinas Banjar H saat ini, Made S.

Masyarakat tidak mendapat kejelasan seberapa banyak jatah karyawan yang akan diterima pihak hotel. Bahkan saat hotel sudah beroperasi, warga SY yang bekerja di hotel itu hanya satu dua saja. Kondisi ini tentu memunculkan polemik di kalangan warga. Masyarakat merasa tak dihiraukan dan ingin tahu lebih jelas isi kesepakatan antara pihak hotel dengan pihak Desa SY. Di masa-masa selanjutnya dan setelah polemik semakin mengental, warga SY yang mendapat jatah bekerja di hotel *Damai* hanya 8 orang. Ironisnya, dari jumlah sebanyak itu tak satu berasal dari Banjar H.

Kenyataan tersebut tentu semakin membuat warga H mempertanyakan sebab musababnya. Sayang mereka tak pula memperoleh jawaban, dan permasalahan ini mengambang selama dua tahun. Pada tahun 1999, masyarakat H yang sudah tak tahan memendam persoalan, akhirnya menggelar demo dan menuntut kejelasan akan keputusan antara pihak hotel dengan desa. Sayang, Made T selaku Kades SY tak mampu mempertanggungjawabkan berbagai keputusan yang telah disepakati antara pihak hotel dengan desa. Akhirnya Kades

asal Desa Bitera , Gianyar ini dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Desa SY, kemudian digantikan Cok GO dari banjar H.

Aksi demonstrasi yang dilakukan warga H atas ketidakadilan yang diterima selama hotel *Damai* berdiri, memang membuahkan hasil. Pihak banjar H diberikan jatah jatah 12 orang menjadi karyawan hotel, tentunya berdasarkan hasil *interview*. Hanya saja dalam perjalanan berikutnya, 12 tenaga kerjayang merupakan jatah dari banjar ini tidak memberi kontribusi pada pihak banjar. Mereka tak mau menyisihkan penghasilan ke banjar. Akhirnya polemik kembali merebak di masyarakat H, terutama menyangkut ke 12 karyawan hotel yang *nota bene* mendapat jatah dari banjar ini.

Menyikapi persoalan agar tak sampai terus berlarut, akhirnya pihak pengurus di Banjar H pada tahun 1999 menggelar rapat bersama warga dengan menghadirkan pihak manajemen hotel. Dalam rapat yang berlangsung di wantilan Pura banjar H, intinya membahas tentang karyawan dari banjar H dan kontribusinya pada masyarakat. Dalam rapat yang juga menghadirkan manajemen Hotel *Damai*, ternyata tak mendapatkan jalan keluar yang pasti. Sebanyak 12 karyawan yang bekerja telah menjadi karyawan hotel ngotot tak mau menyisihkan pendapatan untuk kepentingan banjar. Sebagai jalan keluar, akhirnya diputuskan untuk memberhentikan 12 karyawan asal banjar H tersebut bekerja di hotel. Sebagai gantinya, pihak hotel mesti mengeluarkan dana Rp 500.000 per satu jatah/bulan. Itu artinya, tiap bulan pihak *Damai* menyumbangkan dananya Rp 6 juta.

Dalam perjalanan selama kurang lebih 5 tahun (1999-2004), beberapa warga banjar H mencoba kembali peruntungan melamar sebagai karyawan hotel *Damai*. Setiap kali melamar jawaban yang didapat hanya ucapan terima kasih, tanpa alasan penolakan yang jelas. Sebaliknya, orang dari luar H yang justeru begitu gampang bekerja di hotel ini. "Kondisi kala itu ibarat api dalam sekam. Jika dibiarkan terus, kelak

pasti akan meledak,” ujar Made S. Kelian Dinas ini tahu persis situasi di lapangan, termasuk pandangan masyarakat akan keberadaan hotel *Damai*. Mengantisipasi agar persolan tak lebih parah, Subakta bersama beberapa petinggi di Banjar H serta warga banjar akhirnya berupaya mencari solusi lewat berbagai usulan yang akan diajukan ke pihak hotel.

Pada pertengahan Februari 2004, pihak banjar mengundang manajemen *Damai* untuk berembug membicarakan berbagai usulan yang telah disepakati warga banjar H. Isi kesepakatan terkini yang disampaikan ke pihak hotel di antaranya, warga minta kontribusi dari pihak hotel ke warga banjar dinaikkan dari Rp 6 juta perbulan menjadi Rp 16 juta perbulan, di samping itu jika ada upacara di pura, pihak *Damai* menyumbang 100 kg beras dan 100 kg babi.

Usulan itu tak serta merta diterima oleh pihak hotel. Manajemen *Damai* masih mempelajari permintaan warga. “Kami selaku warga banjar menunggu kesanggupan pihak hotel,” kata Subakta. Pasca bulan Februari itu, beberapa kali pertemuan antar dua pihak sempat digelar. Sayang kesepakatan belum juga didapat. Akhirnya pada 21 April 2004, rapat kembali berlangsung, menghadirkan pihak hotel dan sekitar 300-an warga. Saat berlangsung rapat di wantilan balai banjar H itulah, berbagai usulan dari warga muncul. Begitu menegangkan, sampai-sampai pihak manajemen hotel yang khawatir akan terjadi tindakan tak diinginkan memilih keluar lewat pintu belakang.

Pasca kejadian itu, ketegangan terjadi. Selang dua hari berikutnya, warga kembali melakukan aksi unjuk rasa ke pihak hotel. Alasannya, karena ada warga H ‘diculik’ dan mengira pihak *Damai* mengambil orang yang bersangkutan. Aksi demonstrasi besar-besaran pada minggu terakhir di bulan April 2004 itu berlangsung hingga larut malam bahkan mendapat pengamanan ekstra ketat dari pihak keamanan Polres Gianyar. Peristiwa itu selain sempat menutup akses

jalan di depan hotel, juga telah terjadi pengerusakan beberapa sarana milik hotel *Damai*. Sebanyak 12 warga H kala itu diamankan pihak berwajib ke Polres Gianyar dengan alasan melakukan pengerusakan sarana hotel.

Setelah kondisi agak tenang, sekitar pukul 19.00 Wita, pihak keamanan dari Polres Gianyar bersama-sama prajuru di Banjar H meminta kepada warga agar menandatangani surat pernyataan tak berperilaku anarkis, melakukan pengerusakan termasuk tak menggelar demo. Jika sampai tak mau ditandatangani, maka 12 warga yang ditahan di Polres Gianyar tidak akan dilepaskan. Pihak hotel *Damai* pun menyepakati pernyataan tersebut, termasuk siap menjaga kedamaian.

Pasca penandatanganan pernyataan tersebut, keadaan mulai tenang, demonstrasi pun tak pernah terjadi lagi. Sedangkan perseteruan yang melibatkan warga Banjar H dengan hotel *Damai* penyelesaiannya diambilalih Polres Gianyar. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak akhirnya bersepakat bahwa pihak manajemen hotel *Damai* tiap bulan menyerahkan bantuan Rp 10 juta, di mana dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai kegiatan di banjar. Persentase penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan jatah banjar tak lagi diberlakukan. Warga pun menyetujui keputusan itu.

Setelah titik temu tercapai dan 12 warga yang sempat ditahan selama 20 hari dikeluarkan, maka hubungan antara warga Banjar H dengan Hotel *Damai* semakin harmonis. Rasa saling curiga antar kedua pihak tak lagi terjadi. Malah hubungan yang sifatnya sama-sama menguntungkan terus terbina. Kalau pihak hotel melakukan kegiatan dan perlu tenaga keamanan atau pemuda, maka tenaga dari banjar ini yang diterjunkan. Bila membutuhkan penari pentas di hotel, cukup memanfaatkan potensi seniman di Banjar H dan atas jerih payah para seniman juga mendapatkan imbalan. Pun saat berlangsung upacara pada tempat suci yang ada di Hotel

Damai, penanganan lebih banyak diserahkan ke pihak banjar.

Begitu pula waktu berlangsung kegiatan adat seperti *ngaben* massal serta acara adat lainnya, maka ada saja sumbangan dari hotel ini. Dan, jika di Banjar H melaksanakan acara adat atau upacara, biasanya akan memberikan sesuatu berupa makanan dan lauk-pauk ke hotel sebagai bentuk ikatan bathin.

Gesekan antara *Damai* dengan warga Banjar H menjadi pelajaran berharga semua pihak di wilayah ini. Pasca kejadian tersebut sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan muncul kembali, maka Banjar H kemudian membuat aturan bahwa bagi siapapun yang membangun usaha di lingkungan banjar ini, maka 30- 40 persen tenaga kerja mesti direkrut dari warga banjar. Oleh karena itu, sebelum usaha dibangun, para investor biasanya oleh petinggi adat maupun dinas di banjar ini guna menjelaskan aturan yang berlaku di Banjar H. Imbal balik dari pemberlakuan aturan ini, prajuru banjar memberikan hak yang sepatutnya didapat pengusaha, di antaranya memperlancar proses pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk ijin surat domisili.

f. Banjar Adat Nyuh Kuning

Investasi sudah hadir di Nyuh Kuning sejak tahun 1980-an yang ditandai dengan mulai dilirikinya wilayah tersebut sebagai tempat bermukim oleh para turis mancanegara. Fenomena tersebut tidak terlepas dari posisi strategis banjar Nyuh Kuning yang bertetangga dengan desa Ubud. Kejenuhan investasi, khususnya akomodasi dan restoran, di Ubud, pada akhirnya juga menyebar ke desa-desa tetangga Ubud, termasuk banjar Nyuh Kuning. Turis-turis asing saat itu mulai melihat sisi menarik banjar Nyuh Kuning sebagai desa yang tenang, asri, dan mengandung daya magis tersendiri. Selain juga Nyuh Kuning juga dikenal sebagai desa penghasil patung khas Pendet yang kesohor. Masyarakat Nyuh Kuning

pun merespon kebutuhan para tamu itu dengan membangun berbagai artshop dan fasilitas akomodasi sederhana, seperti home stay dan warung makan. Seiring perkembangan waktu para pemain bisnis pariwisata pun tak hanya diperankan oleh orang-orang Nyuh Kuning, namun juga diramaikan oleh para investor dari luar banjar Nyuh Kuning, dengan skala investasi yang lebih besar.

Kehadiran investor luar ini membawa pengaruh yang besar terhadap pola perekonomian masyarakat Nyuh Kuning. Harga lahan tiba-tiba meningkat tajam, tidak hanya lahan-lahan produktif yang berlokasi di dekat jalan raya, namun pelonjakan harga lahan juga dialami lahan-lahan yang lokasinya dianggap kurang strategis, misalnya di pinggir sungai, bagian sisi barat banjar Nyuh Kuning.

Banjar Nyuh Kuning menjalin relasinya dengan para investor yang menanamkan modalnya di Nyuh Kuning dengan menerapkan prinsip simbiosis mutualisme. Artinya, kerja sama yang terjalin diarahkan agar memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak (*win-win solution*) dengan menjaga keberlanjutan investasi. Prinsip ini dipegang teguh oleh para pengurus banjar yang diberi mandat untuk menjalankan kepentingan seluruh warga Nyuh Kuning, termasuk di dalamnya kepentingan dalam berhubungan dengan para pengusaha pariwisata yang ada di Nyuh Kuning. Warga banjar menyalurkan berbagai gagasannya dalam musyawarah banjar (*sangkep*). Keputusan yang muncul dalam sangkep banjar diterjemahkan oleh para prajuru ke dalam berbagai bentuk kebijakan lokal (*perarem*) yang mengatur tata hubungan dengan pihak investor. *Perarem* berisikan klausul-klausul yang mengatur segala hak dan kewajiban yang melekat pada pihak investor maupun banjar Nyuh Kuning.

Beberapa klausul atau pasal penting yang mengatur hak dan kewajiban para investor di Nyuh Kuning, misalnya : 1) besarnya iuran bulanan dan mekanisme pembayaran, 2) posisi

investor dalam sistem banjar adat, 3) hak-hak investor. Dalam menentukan besarnya pungutan bulanan pihak desa adat tidak menetapkannya dengan semena-mena, namun berdasarkan azas kepatutan dengan mengadakan perbandingan terhadap pungutan di desa-desa sekitar Nyuh Kuning. Pihak prajuru juga memberikan penjelasan kepada para investor tentang pemanfaatan uang yang diperoleh dari pemungutan tersebut, yang sebagian besar diarahkan untuk kebutuhan warga banjar, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan upacara di pura-pura yang terdapat di Nyuh Kuning.

Pihak prajuru banjar tidak hanya meminta sumbangan materi kepada investor, namun memberikan ruang bagi para investor untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka terkait dengan program pembangunan banjar. Pihak prajuru banjar berkomunikasi kepada para pengusaha secara individual kemudian menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada para warga banjar lainnya dalam pesangkepan banjar untuk dibahas lebih lanjut. Pola demikian selama ini terbukti bisa melancarkan hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak. Karakteristik investor yang sebagian besar merupakan investor lokal (asal investor masih dalam satu wilayah kecamatan Ubud) berkontribusi besar terhadap tingkat pemahaman investor terhadap adat-kebiasaan masyarakat Nyuh Kuning.

6.5 Akar Persoalan Relasi Desa dengan Investor

Hubungan antara desa pakraman dengan investor menjadi problematik, seperti terlihat dari kasus-kasus yang diuraikan di atas, karena terdapat beberapa persoalan mendasar menyangkut tata hubungan antara keduanya. Melalui sebuah dialog *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak desa pakraman dan investor kekusutan persoalan tersebut dicoba untuk diuraikan. Setelah melalui diskusi yang alot akhirnya ditemukan sejumlah akar persoalan dari problematik tata hubungan desa dengan investor di kawasan pariwisata Ubud

selama ini. Masing-masing persoalan dipilah ke dalam tiga level, yaitu; **level desa pakraman, level investor, dan level pemerintah.**

Pada pihak desa pakraman ada beberapa persoalan yang mengganjal, antara lain :

1. Investasi sering dilakukan tanpa sosialisasi kepada desa pakraman terlebih dahulu. Investor yang datang ke desa hanya mengandalkan ijin dari instansi pemerintah yang telah dikantonginya. Mereka tidak mengetahui atau tidak mempedulikan kalau di tingkat akar rumput (*grass root*) tatanan masyarakat di Bali mereka akan berhadapan dengan desa pakraman, di mana pada umumnya para pengampu desa pakraman masih berpola pemikiran tradisional; bahwa desa pakramanlah yang paling berhak atas wilayahnya. Kasus pendirian hotel *Cantik* di banjar C, Payangan, yang tercermin dari **kasus 3** di atas menggambarkan dengan jelas fenomena ketiadaan proses sosialisasi ini. Biasanya pada saat memulai berinvestasi pihak investor mempercayakan pengurusan meloby pihak masyarakat kepada pihak ketiga yang dipandang profesional. Pihak ketiga tersebut bisa seorang pengacara, atau seorang calo. Sukses atau gagalnya sosialisasi sangat tergantung kepada kepiawaian pihak ketiga tersebut dalam mengkomunikasikan kepentingan investor kepada masyarakat.

2. Desa pakraman kurang dilibatkan dalam tahapan investasi. Persoalan kedua ini masih berhubungan dengan persoalan pertama di atas. Akibat sikap masa bodoh pihak investor, mereka secara sengaja tidak melibatkan opini atau pendapat warga desa pakraman dalam tahapan investasi yang dikerjakan. Alasannya sederhana, pihak investor merasa telah membayar pajak kepada pihak pemerintah daerah, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi berurusan atau menghubungi pihak desa. Dari pihak

desa menganggap sikap demikian merupakan bentuk pelecehan terhadap eksistensi mereka sebagai pemangku wilayah setempat. Pihak desa memandang bahwa merekalah yang mengetahui kondisi desa, termasuk soal keamanan wilayah. Selanjutnya pihak desa pakraman juga berprasangka terhadap investor bahwa pihak desa baru akan dilibatkan saat sudah terjadi masalah dalam proses investasinya. Fenomena demikian terlihat pada kasus pembangunan Hotel *Damais* desa Kedewaan, Ubud. Sikap masa bodoh pemilik hotel dalam kasus ini malah telah membuahkan konflik menegangkan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga.

3. Keberadaan calo/makelar tanah yang sering memeras krama (warga desa pakraman) pemilik lahan.

Calo atau makelar tanah adalah orang yang menjadi perantara antara pemilik tanah dengan pembeli tanah ketika berlangsung proses transaksi tanah, dengan motif mencari keuntungan dari pihak-pihak yang dihubungkannya. Dalam kenyataannya, pada berbagai kasus proses berinvestasi di wilayah desa, makelar seringkali memanfaatkan perannya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kedua pihak yang bertransaksi. Bahkan seringkali makelar memeras *krama* dengan memainkan harga tanah. Mereka kadang bersekongkol dengan prajuru adat agar *krama* rela melepaskan tanahnya dengan harga yang diinginkan oleh makelar.

4. Kesepakatan antara investor dan desa adat dibuat tidak tertulis, sehingga sering dilanggar.

Dalam berhadapan dan bernegosiasi dengan investor pihak desa pakraman seringkali menggunakan model-model perilaku tradisional, misalnya mengabaikan pencatatan

tentang materi kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak pengusaha. Pihak desa percaya begitu saja terhadap kesepakatan-kesepakatan lisan yang telah dirumuskan kedua belah pihak. Akibatnya tidak ada jaminan hitam di atas putih apabila kesepakatan tersebut akan ditepati di kemudian hari.

5. Lemahnya posisi desa adat dalam hukum nasional. Desa pakraman belum bisa menjadi subyek hukum positif karena ada aspek kewenangannya yang belum diakui oleh negara. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri manakala desa pakraman mengadakan perjanjian dengan pihak luar yang membutuhkan kepastian hukum, termasuk perjanjian dengan investor. Akibatnya dalam beberapa kasus desa pakraman tidak mampu melindungi keutuhan aspek *palemahan*, *parahyangan* dan *pawongannya*, karena investor dilindungi hukum nasional. Misalnya, terdapat kasus *tanah duwe desa* yang diklaim sebagai milik individu kemudian dijual kepada pihak luar dan pihak desa pakraman dikalahkan di pengadilan negara.

Sedangkan di pihak investor terdapat beberapa akar persoalan, antara lain :

1. Belum ada kepastian panduan dan prosedur berinvestasi di wilayah desa pakraman. Investor yang hendak melakukan aktivitas investasi di wilayah desa pakraman seringkali berhadapan dengan prosedur yang tidak jelas, beragam, serta bertele-tele yang diberlakukan oleh desa pakraman. Pihak desa menyodorkan serangkaian persyaratan memulai investasi yang sulit diterima secara logika berusaha bagi kalangan investor. Salah-satu contoh, misalnya soal jenis pungutan di awal investasi; pada sebuah desa memakai pungutan berupa uang dengan besar tertentu, sementara pada desa lain memakai patokan

sejumlah barang tertentu. Kasus lainnya, misalnya, soal dengan pihak siapa investor harus berurusan pertama kali, apakah dengan pihak desa dinas ataukah dengan desa pakraman? Persoalan dualisme desa yang bagi masyarakat Bali merupakan sesuatu yang normal, namun bagi calon investor menjadi soal yang pelik.

2. Kekhawatiran terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat/krama yang kurang rasional. Masyarakat seringkali tidak memahami proses atau tahapan berinvestasi yang harus membutuhkan jangka waktu cukup lama serta faktor-faktor pendukung sebelum dapat meraih keuntungan bisnis. Dalam benak kolektif masyarakat, setiap investor pasti orang atau sekelompok orang yang memiliki banyak modal, sehingga bisa dimintakan uang kapan saja dan untuk kepentingan apapun. Masyarakat juga bahkan tidak mengetahui bahwa dana yang dipakai berinvestasi tersebut sering merupakan hasil dari meminjam di bank, sehingga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

3. Berangkat dari kekeliruan persepsi masyarakat ini, mereka merumuskan berbagai tuntutan atau permintaannya kepada investor. Hasilnya yang disampaikan bukanlah daftar kebutuhan masyarakat yang mereka atas namakan, namun lebih merupakan daftar keinginan yang kurang masuk akal dan tidak logis. Kasus Hotel *Bagus* dan Hotel *Damais*, misalnya, dengan sangat jelas membuktikan thesis ini. Masyarakat Banjar C mengharuskan pihak hotel *Bagus* agar memenuhi tuntutan kuota penerimaan tenaga kerja bagi warga mereka sebesar 60 %. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka besar kemungkinan pihak masyarakat desa akan menempuh cara-cara pemaksaan bersifat fisik agar tuntutan mereka terpenuhi. Model-model penyelesaian seperti inilah yang

membuat investor tidak nyaman dalam menjalankan investasinya.

4. Adanya sifat kecemburuan masyarakat tertentu di sekitar usaha. Besarnya pengaruh 'orang kuat' di kalangan desa dalam berinteraksi dengan pihak hotel mengakibatkan sebagian besar akses manfaat atas keberadaan hotel dikuasai oleh sang 'orang kuat' tersebut. Orang kuat tersebut tentu akan mengutamakan lingkaran terdekat (keluarga) untuk mendapatkan akses keuntungan yang diberikan pihak hotel. Misalnya, soal jatah tenaga kerja, sang 'orang kuat' akan mengutamakan menempatkan keluarga terdekatnya untuk diterima di hotel tersebut. Pada gilirannya masyarakat yang lainnya akan merasa cemburu karena tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dirasakan oleh keluarga sang 'orang kuat'. Pada kasus perusahaan rafting *Jeram* di Banjar B, Kecamatan Payangan, fenomena ini cukup mengemuka bahkan telah menimbulkan ketegangan di antara warga masyarakat desa. Pihak investor pada umumnya tidak memiliki kekuatan pengendalian yang cukup kuat guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial di antara warga masyarakat desa.

Sedangkan pada **sisi pemerintah** sebagai pemegang kebijakan juga terdapat beberapa persoalan, yaitu :

1. Lemahnya peran Pemerintah dalam memediasi investor dan desa pakraman. Ketika terjadi konflik antara investor dengan desa adat dalam berbagai skala seringkali aparat pemerintah level terbawah tidak mau terlibat dalam menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. Aparat pemerintah tidak sanggup memainkan peran sebagai mediasi antar dua pihak yang tengah bertikai.

2. Belum memiliki peraturan yang menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi investor. Sebagai pihak pemegang otoritas dan memiliki kewenangan membuat peraturan semestinya pemerintah berperan dalam menyediakan perangkat perundangan yang dibutuhkan dalam mengatur dan mengendalikan investasi yang ada di wilayahnya. Namun pada banyak daerah hal tersebut belum mampu diwujudkan. Hal ini menyebabkan Pemerintah terkesan gagap ketika terjadi konflik antara desa dengan investor.

Tabel Masalah Tata Hubungan dalam Perspektif Desa Pakraman, Investor dan Pemerintah

Aktor	Masalah	Sumber Masalah
Desa adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi sering dilakukan tanpa sosialisasi kepada desa adat terlebih dahulu 2. Merasa kurang dilibatkan dalam tahapan investasi. Padahal yang mengetahui kondisi desa, adalah bendesa adat sendiri. Saat ada masalah, baru diberikan desa adat. Desa pakraman baru dilibatkan saat sudah terjadi masalah, 3. Keberadaan calo/makelar tanah yang sering memeras krama pemilik lahan, 4. Kesepakatan antara investor dan desa adat jarang yang dibuat tertulis, sehingga sering dilanggar. 5. Lemahnya posisi desa adat dalam hukum nasional. Beberapa kasus membuktikan desa adat tidak mampu melindungi aspek parahyangan dan pawongannya, karena investor dilindungi hukum nasional 	<p>Kesenjangan Komunikasi</p> <p>Kesenjangan Komunikasi</p> <p>Intervensi pihak ketiga</p> <p>Komunikasi</p> <p>Kesenjangan pemahaman</p>

<p>Inves- tor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kepastian prosedur berinvestasi/belum ada informasi yang jelas (panduan) ketika masuk berinvestasi ke wilayah desa pakraman, 2. Kekhawatiran terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat/krama yang kurang rasional, 3. Adanya sifat kecemburuan masyarakat tertentu di sekitar usaha. Masyarakat merasa tidak memperoleh bagian. 	<p>Lemahnya regulasi</p> <p>Kesenjangan komunikasi</p> <p>Kesenjangan komunikasi</p>
<p>Pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Peran Pemerintah sebagai Mediasi Investor dan Desa Pakraman 2. Belum memiliki peraturan yang menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi investor 	<p>Kurangnya komitmen pemegang otoritas</p> <p>Ketiadaan regulasi</p>
<p>Masalah setelah investasi berlangsung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran atas nota kesepahaman atau kesepakatan yang telah dibuat, 2. Tidak berjalannya komunikasi antara investor dengan pihak DP, maupun antar elemen dalam DP sendiri, 3. Pemerintah lepas tanggungjawab terhadap persoalan yang timbul, 4. Adanya pungutan-pungutan 'tidak jelas' dari instansi pemerintah 	<p>Kurangnya komitmen</p> <p>Korupsi birokrasi</p>

Sumber : Diolah dari hasil wawancara &FGD (2009)

6.6 Tipologi Relasi Desa dengan Investor

Tipologi relasi antara desa dengan investor dirumuskan setelah dilakukan kajian terhadap beberapa kasus tata hubungan menyangkut pola relasional yang terbangun dan karakteristik masyarakat di masing-masing *desa pakraman* di mana kasus terjadi. Kawasan pariwisata Ubud sebagai sebuah kawasan yang memiliki sejarah kepariwisataan yang panjang ternyata menghadirkan fenomena relasi desa dengan investor pariwisata yang beragam.

Pertama, menarik untuk dikaji bahwasanya pertimbangan-pertimbangan investor dalam melakukan investasi ternyata dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat di mana investasi akan dilakukan. Karena maju-mundurnya usaha yang akan dijalankan salah-satunya ditentukan oleh seberapa harmonis relasi sehat yang bisa dibangun dengan desa-desa penyanding. Dalam kerangka paradigma demikian jelas suasana kondusif dari lingkungan investasi amat diperlukan.

Kedua, pola relasi yang terbangun antara desa dengan investor di kawasan pariwisata Ubud ternyata tidak berwajah tunggal, namun menghadirkan berbagai variasi pola hubungan; mulai dari hubungan yang bercorak kooperatif sampai hubungan yang bercorak konfliktual. Tipe hubungan yang muncul ternyata sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat lokal dalam hal ini desa pakraman, di mana investasi tersebut berlokasi. Karakteristik masyarakat dan institusi desa akan mempengaruhi cara desa pakraman memberikan respon terhadap kehadiran investasi. Memang tidak bisa dikelompokkan secara tegas atau hitam putih antara desa-desa yang bercorak kolaboratif dengan yang bertipe konfliktual, namun apabila dilihat secara keseluruhan akan terlihat sebuah pola yang cukup jelas. Sebagai sebuah thesa awal dapat dirumuskan bahwa semakin jauh jarak suatu desa pakraman dari intinya, semakin besar kemungkinan pola relasi yang terbangun bersifat konfliktual. Demikian berlaku sebaliknya.

Ketiga, tipologi pola hubungan desa-investor di kawasan pariwisata Ubud dapat dipilah dalam 3 (tiga) zone, yaitu **zone Inti**, **Antara**, dan **Terluar**. Namun di lapangan pemilahan wilayah zone-zone ini tidak berlaku secara tegas. Artinya, tidak ada batas yang tegas antara zone. Bahkan dapat terjadi desa yang berada di wilayah zone antara memiliki karakter tipologi zone terluar. Demikian pula bisa berlaku sebaliknya.

Adapun deskripsi masing-masing zone adalah sebagai berikut :

1. Zone Inti (*core zone*); desa adat yang beranjak dewasa.

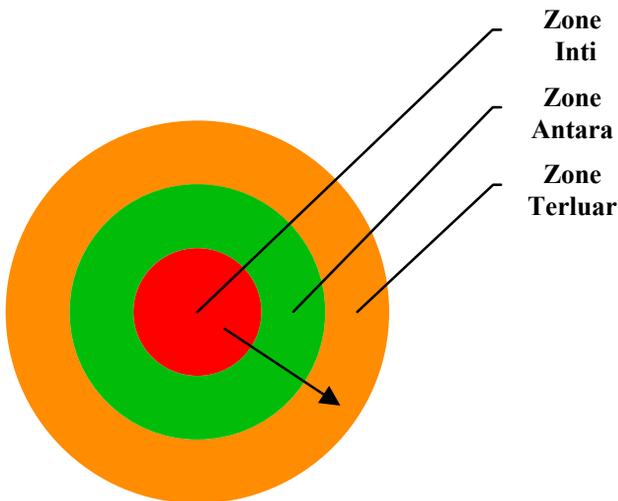


Gambar 3.3 Puri Ubud; ikon kepariwisataan Ubud

Tipologi ini berada di pusat desa Ubud dengan puri Ubud sebagai episentrumnya. Dari pusat episentrum wilayah inilah pengaruh pariwisata mulai merebak sejak awal abad 19, ketika para seniman Barat mulai bermukim di desa Ubud dengan difasilitasi oleh kaum aristokrat puri Ubud. Secara administrative desa-desa zone inti merupakan banjar atau dusun bagian dari Kelurahan Ubud. Desa-desa pakraman yang termasuk ke dalam wilayah zone inti pada umumnya memiliki pemikiran yang terbuka dalam mempersepsikan dan menerima pendatang, khususnya wisatawan dan investor. Mereka telah memiliki rekaman sejarah yang panjang dalam berinteraksi dengan pihak luar sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman kolektif yang cukup memadai dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar tersebut.

Selain itu beberapa warga desa dalam zone ini juga memainkan posisi sebagai pengusaha pariwisata, misalnya sebagai pengelola hotel, bungalow, money changer, warnet, mini market, dan restoran. Kondisi ini membuat pengetahuan kolektif masyarakat tentang seluk-beluk berinvestasi cukup baik. Mereka misalnya, memahami bahwa dalam berinvestasi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meraih keuntungan (dalam istilah investasi disebut BEV, *break event value*). Dampak selanjutnya, pengetahuan tersebut akan mendorong tumbuhnya sikap kooperatif dan menghargai kehadiran investasi sebagai mitra yang kontributif bagi wilayahnya.

Berangkat dari karakteristik masyarakat dan perangkat desa pakraman yang demikian, maka pola hubungan yang terbangun dalam zone inti adalah bercorak **akomodatif-kolaboratif**. Artinya, terbangun relasi yang sehat dan saling memahami antara kedua belah pihak karena masing-masing pihak mengenal dan memahami situasi dan kondisi pihak lain.



Gambar 3.4 Tipologi Corak Hubungan dalam 3 Zone

2. Zone Antara (*buffer zone*); wilayah abu-abu yang sulit ditebak

Wilayah **zone antara** berada di antara zone Inti dengan zone luar. Sebagai zone antara, zone ini menghubungkan fungsi-fungsi pariwisata yang ada di wilayah pusat menuju wilayah luar. Desa-desa pakraman yang termasuk zone antara berperan dalam mensuplay berbagai kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh fasilitas-fasilitas wisata yang ada di zone inti, misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan barang-barang kerajinan, dan seterusnya. Namun demikian tidak tertutup pula kemungkinan pada kawasan antara tersebut terdapat pula berbagai fasilitas pariwisata seperti lazimnya yang ada di zone inti walaupun dalam skala yang lebih kecil. Di sini, misalnya, terdapat berbagai tipe akomodasi villa yang lebih mengutamakan privasi wisatawan sebagai konsumennya.

Desa-desa yang termasuk zone antara misalnya: desa pakraman Nyuh Kuning, Pengosekan, Singakerta, Katiklantang, Bangkiang Sidem, Tegallantang, A, Gentong (Kecamatan Tegalalang), Desa Mas, dan lain-lain.

Karakteristik masyarakat pada desa-desa yang termasuk zone ini merupakan transisi dari karakteristik tradisional-tertutup mengarah ke modern-terbuka. Pada beberapa aspek masyarakat bersifat kolaboratif-kooperatif, namun pada beberapa segi yang lainnya masyarakat masih menganut pola-pola berpikir yang tradisional-tertutup-reaktif.

Pada beberapa desa, misalnya, mereka menerima kehadiran investor luar untuk berinvestasi di wilayahnya namun diikuti oleh persyaratan untuk ikut menjadi *krama adat*, walaupun sebatas sebagai krama adat pasif. Fenomena demikian misalnya terjadi di desa pakraman A, Ubud.

3. Zone Terluar; Desa adat terlampau kuat, pengusaha tidak berdaya

Kawasan yang termasuk dalam kategori zone terluar umumnya merupakan desa-desa agraris, yang letaknya cukup jauh dari pusat kawasan pariwisata Ubud (Kelurahan Ubud). Beberapa desa bahkan langsung berbatasan dengan desa-desa di luar Gianyar. Sebagai daerah yang bertipikal agraris, warga desanya pun cenderung masih berkarakter agraris, misalnya sangat memelihara homogenitas dalam interaksi sosial, memelihara sifat komunalitas, dan teguh dalam memegang kolektivitas kehidupan bersama. Segala keputusan yang bersentuhan dengan kepentingan bersama keadatan harus diambil melalui forum rapat warga desa adat (*sangkep*), termasuk segala persoalan yang terkait dengan hubungan dengan pengusaha/investor pariwisata.

Pada beberapa desa kasus yang termasuk zone ini, menunjukkan posisi desa adat yang sangat kuat manakala berhadapan dengan investor. Kekuatan desa tersebut tercermin dalam serangkaian tipikal gaya berhubungan yang kurang rasional yang diterapkan ketika benegosiasi dengan pengusaha pariwisata yang baru memulai berinvestasi di wilayah desa mereka. Tipikal tersebut antara lain : *pertama*, menuntut prosentase peluang kerja yang terlampau tinggi (di atas 40 %), tanpa melihat secara rasional kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dan kemampuan hotel atau restoran dalam menyerap tenaga kerja.

Kedua, menggunakan alasan kepentingan perbaikan pura dan pelaksanaan upacara *odalan* di pura-pura sebagai dasar meminta sumbangan. Hampir pada seluruh desa-desa adat yang masuk wilayah zone terluar modus demikian terlihat mengemuka. Secara rutin pihak desa akan meminta pihak pengusaha membayar sejumlah sumbangan (dalam bahasa lokal disebut *dana punia*) yang akan digunakan untuk kepentingan upacara. Pada beberapa kasus malah diakui

oleh prajuru atau warga desa adat, bahwa semenjak proses meminta sumbangan tersebut dilakukan upacara-upacara odalan di pura-pura mereka bisa berlangsung lebih semarak.

Ketiga, menjadikan kekuatan desa adat sebagai instrument untuk berkonflik dengan pengusaha ketika tuntutan warga tidak dipenuhi pihak pengusaha. Tipikal ketiga ini biasanya diperankan oleh orang-orang kuat (*big-man*) yang ada di suatu desa dengan menjadikan desa adat sebagai tameng. Mereka dapat memanfaatkan kepemimpinan desa adat yang lemah atau tidak berwibawa untuk menggerakkan *krama desa* untuk melancarkan tuntutan mereka kepada pihak hotel.

6.7 Super Power Masyarakat Lokal

Tebaran kasus-kasus tata hubungan di atas minimal mengisyaratkan *dua* hal, pada satu kutub terjadi fenomena semakin menguatnya peran desa adat dan pada kutub yang ekstrim terjadi fenomena marginalisasi desa adat sebagai sebuah entitas ekonomi lokal. Dua proses ini sesungguhnya telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda di Bali pada abad ke 19. Namun demikian, marginalisasi itu bekerja semakin intensif kurang lebih setengah abad terakhir, dengan masuknya perkembangan industri pariwisata, dengan melibatkan semakin banyak agen-agen kapitalistik global dan domestik, antara lain investor internasional, aparatus negara modern, makelar tanah, dan borjuasi lokal. Dua fenomena inilah yang tergambar jelas tengah mengepung desa-desa pakraman di wilayah penelitian, Kawasan Pariwisata Ubud.

Pada aras lokal desa adat, penetrasi ekonomi politik tersebut menimbulkan beberapa implikasi; *Pertama* semakin terbatasnya pengendalian politik desa adat terhadap pemanfaatan ruang-ruang ekonomi di wilayah teritorinya. Dalam beberapa kasus, desa adat terkesan diperdaya karena investor selalu datang dengan membawa ijin yang lengkap dari pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pihak desa

tampil dengan pemahaman yang sepotong-potong mengenai investasi. Desa seringkali terlambat dalam mengerem kedatangan investasi, misalnya melalui pembuatan aturan lokal tentang prosedur alih kepemilikan dan alih fungsi lahan-lahan pertanian. Sehingga tidak aneh kemudian sering muncul istilah *tanah kebengbeng* (artinya tanah terisolasi) sebagai akibat tidak terkontrolnya proses konversi lahan dalam model pembangunan yang kapitalistik.

Kedua, semakin menyempitnya ruang-ruang ekonomi lokal, yang ditandai oleh pengambilalihan asset-aset ekonomi lokal oleh kekuatan supralokal, terutama oleh negara. Misalnya, obyek-obyek wisata yang sebelumnya dikelola oleh desa, kemudian diambil alih oleh negara melalui Dinas Pariwisata Kabupaten.

Ketiga, runtuhnya *social capital* di tingkat lokal akibat pergeseran paradigmatik dan sosiologis perihal konsep-konsep kearifan lokal yang sebelumnya demikian tertanam kuat dalam kesadaran intelektual kolektif masyarakat Bali. Berbagai kekayaan kearifan local, seperti konsep menyamabraya (persaudaraan), *sagilik-saguluk sabayantaka* (senasib-sepenanggungan), semakin memudar dalam praktik keseharian relasi sosial akibat nilai-nilai baru yang dibawa oleh budaya investasi. Kasus konflik dalam keluarga akibat penjualan tanah kepada pihak investor tanpa kesepakatan keluarga besar, misalnya menjadi contoh kecil yang memperkuat telah terjadi fenomena runtuhnya *social capital* (modal sosial) di tingkat lokal.

Berhadapan dengan penetrasi kekuatan modal supralokal dengan berbagai agennya sampai ke tingkat lokal, maka respon yang diberikan oleh desa-desa adat di daerah penelitian tidaklah seragam. Dari hasil analisis terhadap data-data penelitian di lapangan, setidaknya terdapat **tiga bentuk reaksi lokal** (desa adat) terhadap kekuatan modal atau investasi.

Pertama, di beberapa desa adat cenderung memberi respon yang **akomodatif-kolaboratif**. Sikap ini muncul karena

berbagai alasan; masuknya investor pariwisata dianggap akan merubah wajah kemiskinan. Alasan kedua, karena penetrasi ekonomi kapitalistik dianggap oleh desa adat sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan atau sulit untuk ditolak karena dibawa oleh kekuatan pemerintah dengan segala perangkat kekuasaannya.

Kedua, adalah respon yang bersifat **ko-eksistensi**. Artinya, formulasi desa adat belum bisa dirumuskan karena terjadi perpecahan (fragmentasi) dalam struktur dan kultur komunalitas desa adat, antara *krama* (warga) dan *prajuru* (pengurus adat) yang pro investor dan kritis terhadap kedatangan investor. Awal mula perpecahan ini terjadi ketika desa adat yang dibentuk untuk menjamin terjaganya *public goods*, baik *public interest* (kepentingan masyarakat) dan *public properties* (hak-hak publik) menjadi goyah akibat muncul sejumlah godaan penumpukan kekayaan (orientasi akumulasi kapital) yang dikenalkan oleh *agency-agency* kapital. Implikasinya, ada sebagian *krama* dan *prajuru* mendukung proses konversi tanah *karang desa*, misalnya, untuk kepentingan investor atau bahkan menjual atau mengkontrakkan tanah milik pura (*pelaba pura*) kepada investor.

Ketiga, respons berbentuk **konflik-instrumentalist**. Konflik ini terjadi ketika masyarakat lokal menggunakan adat sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar mereka, baik ketika berhadapan dengan investor, pendatang maupun pemerintah. Dalam konteks ini adat oleh penggunaannya menjadi sangat bermanfaat untuk merumuskan tuntutan, seperti mendapatkan kuota jatah pekerjaan tertentu bagi warganya untuk dipekerjakan oleh pengusaha hotel, atau dengan alasan yang kurang masuk akal menolak sama sekali kehadiran investor. Kasus yang menimpa Hotel *Bagus* di Payangan di atas, misalnya secara benderang mempertegas fenomena instrumentalisasi kekuatan adat tersebut.

BAB VII

DAMPAK LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

7.1 Pendahuluan

Permasalahan abrasi pantai (mundurnya garis pantai ke arah darat) menjadi perhatian serius berbagai pihak dasawarsa terakhir ini. Hal ini terjadi sejak masalah tersebut banyak merugikan masyarakat pesisir, seperti hilangnya lahan pesisir atau lenyapnya pulau-pulau kecil. Berbagai ekosistem khas pesisir seperti estuaria, padang lamun, serta mangrove juga banyak mengalami kerusakan akibat terjadinya abrasi yang tak tertanggulangi.

Abrasi pantai banyak terjadi di sepanjang pantai utara pulau Jawa, Bali, dan beberapa pulau di Kepulauan Riau dan Kepulauan Seribu. Permasalahan abrasi, sering mencuat ke permukaan karena menghilangnya puluhan hektare lahan di pesisir tentu mengurangi fungsi peruntukan wilayah tersebut sebagai budi daya perikanan, pariwisata, pertambangan, dan tempat peruntukan industri.

Abrasi pantai dapat terjadi melalui 3 mekanisme penyebab, yaitu : 1) secara alami 2) akibat kegiatan manusia, dan 3) kombinasi di antara kedua-duanya. Pemanfaatan sumber daya alam dengan tidak memahami dinamika interaksi biogeofisik secara keruangan merupakan penyebab utama masalah abrasi pantai akibat ulah manusia. Sebagai contoh, abrasi yang terjadi di Kepulauan Riau dan Kepulauan Seribu diperkirakan terjadi karena aktifitas penambangan. Sedangkan abrasi di pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) penyebabnya sangat bervariasi. Abrasi di pantai-pantai di daerah Karawang, Brebes, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo disebabkan

oleh pembukaan kawasan hutan mangrove.

Aktivitas manusia lainnya adalah menebang atau merusak ekosistem mangrove di garis pantai baik untuk keperluan kayu, bahan baku arang, maupun dalam rangka pembuatan tambak. Padahal menurut Bengen (2001, 2000) hutan mangrove tersebut secara ekologis dapat berfungsi : (1) sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur, dan penangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, (2) penghasil detritus (bahan makanan bagi udang, kepiting, dan lain-lain) dan mineral-mineral yang dapat menyuburkan perairan, (3) Sebagai daerah *nurshery ground*, *feeding ground* dan *spawing ground* bermacam biota perairan.

Sedangkan abrasi di daerah delta Cimanuk, Indramayu dan Pantai Padang (Sumatera Barat) diakibatkan oleh pembelokan muara sungai secara sengaja oleh manusia. Abrasi akibat struktur bangunan yang menjorok ke laut banyak ditemukan di Bali dan Lombok. Contoh paling fenomenal adalah abrasi pantai di pantai Kuta, Bali Selatan akibat struktur bangunan *run way* bandara udara Ngurah Rai yang menjorok ke laut.

Abrasi pantai karena proses-proses alami sering terjadi pada pantai-pantai yang berhadapan dengan rezim energi (gelombang) besar. Di wilayah Indonesia, pantai-pantai yang mengalami erosi alami pada umumnya adalah pantai yang berhadapan langsung dengan samudera Indonesia dan Pasifik, di mana gelombang besar dari temperatur zone sampai ke wilayah teopis seperti yang terjadi di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa untuk pantai-pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia dan pantai utara Papua dan pantai di pulau-pulau kecil di utara Maluku untuk pantai-pantai yang berhadapan dengan samudera Pasifik.

7.2 Kasus-Kasus Abrasi di Pesisir Gianyar, Bali

Kabupaten Gianyar memiliki garis pantai sepanjang kurang-lebih 15 km. Mulai dari pantai Ketewel, Sukawati sampai di pantai Lebih, kecamatan Gianyar. Sejak dibangunnya jalan arteri Ketewel-Kusamba (Jalan Prof. I.B. Mantera) yang berada di tepian pantai Gianyar, telah terjadi pergeseran pemanfaatan lahan yang tinggi, dari pola pemanfaatan berfungsi agraris ke pemanfaatan *non*-pertanian. Pada beberapa kawasan lokasi jalan sangat dekat dengan pantai, sehingga alih fungsi pemanfaatan lahan semakin tinggi di kawasan-kawasan tersebut.

Selain pergeseran pemanfaatan lahan, di sepanjang pantai Gianyar juga terjadi fenomena alam erosi pantai (abrasi). Masalah abrasi pantai (mundurnya garis pantai ke arah darat) banyak merugikan masyarakat pesisir, seperti hilangnya lahan pesisir. Hal ini mengurangi fungsi ekologis dan ekonomis wilayah pesisir yang seharusnya dapat memberikan manfaat, misalnya untuk budidaya perikanan, industri garam, dan obyek pariwisata.

Abrasi pantai dapat terjadi secara alami, akibat kegiatan manusia, ataupun kombinasi keduanya. Pemanfaatan sumber daya alam dengan tidak memahami dinamika interaksi biogeofisik secara keruangan merupakan penyebab utama masalah erosi pantai akibat kegiatan manusia. Beberapa contoh aktifitas manusia yang kurang terkendali sehingga menyebabkan terjadinya abrasi, misalnya; penambangan material, pembukaan hutan mangrove untuk lahan tambak, pembelokan muara sungai, dan struktur bangunan yang menjorok ke laut.

Abrasi pantai yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Gianyar memang lebih banyak karena proses-proses alami. Hal ini dipengaruhi oleh posisi pantai pesisir Kabupaten Gianyar yang berhadapan dengan rezim energi (gelombang) besar Samudera Hindia.

7.2.1 Pantai Kubur, Ketewel, Sukawati

Di pantai Kubur berdiri beberapa buah bangunan villa, usaha ikan hias, galeri, dan penginapan yang berjarak 50-100 meter dari garis pantai. Menurut masyarakat sekitar, villa tersebut telah berdiri sejak 15 tahun lalu. Pemiliknya adalah seorang pengusaha perak dari Celuk, Sukawati. Villa tersebut juga menjadi tempat usaha kerajinan perak pemiliknya. Menurut keterangan penduduk sekitar pengusaha perak tersebut juga menjadi pemilik tanah di sepanjang pantai dari Br.Kubur sampai ke Br.Manyar, Ketewel (kurang lebih sepanjang 1,5 km). Sebagian pinggiran tanah yang menghadap ke pantai oleh pemiliknya dibuatkan senderan beton setinggi 1 meter. Gelombang pantai saat ini sudah langsung menghantam senderan tersebut. Akibatnya, para nelayan di pantai Kubur, Ketewel kesulitan mencari lahan untuk menambatkan jukung pada saat tidak melaut (Gambar 1). Jukung tidak mungkin selalu ditambatkan di depan senderan beton, karena jaraknya yang sudah demikian dekat dengan pantai. Akibatnya jukung bisa terseret terbawa gelombang ke tengah laut.



Gambar 1. Abrasi di Pantai Ketewel

Sedangkan usaha pemeliharaan ikan hias dimiliki oleh pengusaha dari Jawa. Usaha ini menempati sebuah bangunan besar di pinggir pantai yang berjarak hanya sekitar 15 meter dari garis pantai. Bangunan ini memiliki jarak terdekat ke garis pantai bila dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain yang terdapat di pantai kubur.

Akibat munculnya berbagai bangunan di pinggir pantai tersebut, akibat langsung yang dapat diamati adalah terjadinya penyempitan mulut sungai yang bermuara ke pantai kubur. Muara tersebut tepat berada di antara usaha pemeliharaan ikan hias 'A' dengan pura Hyang Naga. Menurut para nelayan yang sejak puluhan tahun menambatkan jukung di area tersebut, dulu sebelum berdirinya bangunan pemeliharaan ikan hias, muara sungai lebih lebar dan dalam. Namun sejak kehadiran bangunan-bangunan di sekitarnya aliran sungai menuju ke lepas pantai menjadi terhambat.

Fenomena lain yang teramati di sekitar pantai Kubur adalah terjadinya abrasi. Hal ini memang menjadi gejala alamiah di hampir seluruh pantai di Bali, khususnya pantai-pantai yang menghadap ke samudera Indonesia. Penyenderan beton yang kurang memperhatikan karakteristik pantai termasuk pola sel sediment setempat, sehingga berpengaruh terhadap pola garis pantai. Pada pinggir-pinggir pantai yang tidak disender terjadi penggerusan pasir yang tinggi.

7.2.2 Pantai Cucukan

Di pantai Cucukan, Desa Medahan ditemukan beberapa bangunan villa, baik yang telah lama berdiri, maupun yang baru saja dibangun. Sebuah bangunan villa dengan ukuran yang cukup besar berdiri di sebuah tanjung pantai. Tanjung ialah bagian daratan yang lebih menjorok ke arah laut dibandingkan dengan bagian daratan yang lain. Menurut informan yang bekerja di villa tersebut, bangunan villa tersebut dimiliki oleh seorang petinggi partai politik dari Jakarta dan

dibangun sejak empat tahun yang lalu (tahun 2002). Informan juga menyebutkan gelombang laut yang semakin dekat ke arah bangunan sejak villa tersebut dibangun. Hal ini berarti pasir di depan villa semakin berkurang akibat tergerus abrasi air laut.

Pada jarak sekitar 200 meter ke arah timur dari villa pertama, juga terdapat bangunan villa yang dimiliki oleh orang asing. Jarak villa yang baru dibangun ke arah garis pantai sekitar 25 meter. Bangunan villa yang baru ini mengubah arah aliran muara sebuah kali kecil menjauhi lokasi villa. Selain itu sebuah jalan setapak yang sebelumnya merupakan jalan tanah juga sedang diperkeras menjadi jalan aspal guna memudahkan akses masuk ke villa dan pantai.

Kurang lebih sekitar 400 meter ke arah timur ditemukan lagi sebuah bangunan villa. Di depan villa dipasang krib-krib beton berbentuk seperti drum berjajar sepanjang pantai. Villa tersebut memiliki jarak yang amat dekat dengan garis pantai (sekitar 10 meter). Hempasan gelombang telah sampai pada krib-krib yang terpasang di depan villa.

7.2.3 Pantai Lebih

Pantai Lebih dikenal sebagai pantai yang paling ramai dimanfaatkan sebagai arena rekreasi oleh masyarakat Gianyar timur. Lokasinya yang relative dekat ke kota Gianyar, membuat warga kota Gianyar banyak yang datang berekreasi ke pantai Lebih di akhir pekan atau hari libur lainnya. Beberapa bangunan warung semi permanent berdiri berjejer di sepanjang pantai Lebih. Pada umumnya warung-warung tersebut menjual sajian dengan lauk berbagai olahan ikan laut. Keberadaan warung-warung makan tersebut telah melanggar perlindungan kawasan sempadan pantai karena lokasinya yang sangat dekat dengan garis pantai (antara 10-50 meter).

Selain mengganggu fungsi ekologis pantai, keberadaan warung-warung tersebut juga mengurangi area pantai yang

digunakan sebagai tempat upacara *melasti* oleh umat Hindu pada hari-hari tertentu. Warung-warung tersebut selain bangunannya mepet ke laut, jumlahnya juga terlalu banyak sehingga suasana tata ruang kawasan pantai Lebih secara umum menjadi sesak dan tidak teratur. Kesesakannya ini makin terlihat ketika berlangsung upacara *melasti*, di mana ratusan orang datang ke pantai Lebih guna melakukan persembahyangan. Pada saat itu pantai Lebih memiliki tiga (3) fungsi sekaligus; (1) fungsi **ekonomi-modern**, yakni warung-warung makan, (2) fungsi **ekonomi-tradisional**, yakni sebagai area tempat penambatan perahu nelayan setempat, (3) fungsi **kultural-religius**, yakni sebagai tempat pelaksanaan upacara *melasti*.

Ketiga fungsi tersebut menghadapi ancaman serius karena pantai Lebih mengalami abrasi yang cukup parah. Hempan gelombang laut selatan lambat-laun mengikis sedimen pasir sehingga gelombang air laut semakin mendekati daratan. Abrasi tersebut termasuk abrasi natural, sehingga upaya pencegahannya tidak bisa dilakukan dengan upaya-upaya konvensional, seperti pembuatan senderan beton. Hal ini dapat dilihat dari rusaknya tanggul-tanggul beton yang dipasang pihak pemerintah di pantai Lebih.

7.2.4 Faktor Penyebab

Berangkat dari temuan fakta-fakta lapangan tentang kondisi sempadan pantai di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Gianyar, faktor-faktor penyebab kondisi ketidaksesuaian pemanfaatan atau pengelolaan ruang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertama, banyaknya lahan pesisir yang sudah beralih kepemilikan kepada pihak swasta (pemilik modal). Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam melakukan penanganan abrasi secara menyeluruh dan terpadu. Sehingga trend yang muncul adalah terjadi penanggulangan abrasi pantai sesuai

dengan kepentingan masing-masing pemilik lahan, tanpa memperhatikan dampak samping terhadap kawasan lainnya.

Kedua, belum optimalnya sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kepada masyarakat luas. Masyarakat pesisir, khususnya pihak-pihak swasta, kurang memahami peruntukan lahan yang direncanakannya menjadi fasilitas pariwisata.

7.3. Penanganan Masalah Abrasi Pantai

Telahterjadi pergeseran cara pandang dalam menangani masalah abrasi di negara-negara maju. Bekerja-sama dengan alam (*cooperate with natural process*) dijadikan pedoman utama dalam penanganan abrasi dengan memperhatikan proses-proses alam yang lebih regional dibandingkan lokal. Demikian pula penyelesaian abrasi dengan rekayasa lunak (*soft engineering*) lebih diutamakan dibandingkan dengan cara konvensional (*hard engineering*). Pendekatan tersebut semakin berkembang setelah tahun 1992 sehubungan dengan agenda 21 tentang pembangunan berkelanjutan. Karenanya pemahaman tentang sel sedimen (*sedimen transport system*) menjadi penting dalam perencanaan pesisir terutama dalam menangani masalah abrasi dan akresi pantai.

7.3.1 Sel Sedimen (*Sediment Cell*)

Ada beberapa definisi dari sel sedimen. Bray *et all* (1995) mendefinisikan sel sedimen sebagai suatu sistem transpor sedimen yang secara relatif self contained dimana sumber sedimen, deposit sedimen sementara, hilangnya sedimen, batas pergerakan sedimen, dan pola pergerakan sedimen teridentifikasi. Definisi lain oleh (Carter,1988) menyebutkan bahwa sel sedimen adalah suatu panjang pantai dimana sirkulasi sedimen pada pantai tersebut dikontrol secara ruang oleh distribusi energi gelombang sebagai penggerak

sedimen tersebut. Untuk kepentingan praktis dalam rencana pengelolaan garis pantai, sel sedimen didefinisikan sebagai pantai yang berasosiasi dengan wilayah *nearshore* dimana pergerakan sedimen non-suspended (kerakal dan pasir) *relatif self contained*; interupsi pergerakan dari sedimen dalam satu sel sedimen tidak mempengaruhi sel-sel lain di sebelahnya (MAFF,1995).

Carter(1988) membedakan dua tipe batas pergerakan sedimen: tetap(*fixed*) dan dinamis(*transient*). Batas tetap dapat dikenali sebagai kenampakan morfologi, seperti tanjung (*head land*) dan bibir sungai(*inlet*). Sedangkan batas dinamis sangat sulit dikenali sedangkan batas dinamis sulit dikenali karena dikontrol oleh distribusi energi gelombang. Beberapa ahli menyarankan penentuan batas pergerakan sedimen berdasarkan pada proses-proses erosi dan akresi. Karenanya perubahan orientasi garis pantai yang tiba-tiba seperti head land sering mengindikasikan pemisahan dari pergerakan sedimen di mana material sedimen bergerak ke dua arah dari tanjung tersebut yang mengindikasikan proses-proses erosi sedang berlangsung. Lebih jauh bila dua pola pergerakan sedimen bertemu, proses akresi terjadi, seperti yang terjadi pada *inlets* dan *estuary*.

Dalam aplikasinya, konsep sel sedimen menyatu dengan bujet sedimen (*sediment budget*). Selama 30 tahun konsep budget sedimen diaplikasikan di berbagai pantai di dunia, dan disimpulkan bahwa, meskipun mengkuantifikasi pendekatan ini sangat sulit, namun demikian tantangannya adalah bagaimana mengembangkan pendekatan yang berhubungan dengan kontribusi sedimen dan hilangnya sedimen dalam sebuah sistem transpor sedimen mendekati ketelitian detail. Pendekatan bujet sedimen menjadi salah-satu konsep yang sangat bermanfaat dalam riset pengelolaan pantai dan memperlihatkan keberhasilan dalam memecahkan

masalah abrasi pantai.

Dalam penerapannya, pendekatan bujet sedimen memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat dari masalah-masalah pantai, khususnya pada proses-proses erosi dan akresi. Misalnya, adanya bendungan di sebuah hulu DAS akan menyebabkan erosi di daerah pantai sebagai akibat dari pasokan sedimen yang berkurang di pantai bersangkutan. Demikian pula halnya dengan pembangunan struktur sipil yang menjorok di pantai akan mengganggu pola transpor sedimen di pantai yang akan mengakibatkan erosi atau akresi pada bagian pantai lainnya. Begitu pula dengan aktifitas manusia lainnya yang mengganggu sistem transportasi sedimen di pantai. Pengaruh langsung, seperti : penambangan pasir, pendalaman alur navigasi/pelayaran, penambahan pasir (reklamasi); ataupun tidak langsung, seperti : penggundulan hutan di hulu DAS, pola bercocok tanam yang tidak tepat, akan menyebabkan erosi di hulu DAS dan menambah pasokan sedimen ke pantai di muaranya.

Prinsip dasar dalam bujet sedimen adalah analisis dari kontribusi sedimen (*credits*) dan hilangnya sedimen (*debit*) yang akan mengganggu keseimbangan dari sistem tersebut dan diindikasikan terjadinya abrasi ataupun akresi pada pantai bersangkutan.

Sumber sedimen berasal dari : pergerakan sedimen sejajar pantai, sungai, erosi tebing pantai, pergerakan tegak lurus pantai, serta usaha manusia memasukkan pasir ke dalam sistem. Sedangkan kontribusi dari rombakan endapan biologis (terumbu karang) dan endapan kimia-fisik pada beberapa jenis pantai tidak terlalu penting. Berkurangnya sedimen dalam sistem dapat terjadi karena : pergerakan sedimen sejajar pantai, tegak lurus pantai, akibat angin, dan aktifitas penambangan.

7.3.2 Konteks Bali

Karena belum terpahami dengan baik perihal pentingnya sel sedimen di pantai, banyak pemanfaatan pesisir di Bali yang menimbulkan abrasi pantai. Reklamasi pulau Serangan yang menimbulkan abrasi di sepanjang pantai selatan-timur Bali menjadi contoh menarik, seperti abrasi di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Gianyar. Selain itu penanganan abrasi dengan membuat *crib* beton juga menimbulkan masalah serius di bagian pantai lainnya. Misalnya kribisasi di pantai Padanggalak telah memindahkan abrasi ke pantai-pantai di sebelah timur pantai Padanggalak, seperti pantai Ketewel. Fenomena ini jelas merupakan penanganan masalah pesisir yang parsial dan tidak memperhatikan dampak holistik secara kewilayahan.



Gambar 3. *Crib di pantai*

Di Bali banyak ditemukan wilayah-wilayah pesisir yang secara administrasi berbeda namun terletak pada satu sel sedimen. Karenanya aktifitas pada pesisir di suatu wilayah administrasi dapat memberikan dampak pada wilayah administrasi lainnya. Misalnya penanganan abrasi di pantai

Sanur (Denpasar) dapat berpengaruh amat besar terhadap kondisi pantai di pesisir Gianyar.

Kondisi diperparah lagi akibat tiadanya tanaman pengaman di pinggiran pantai, sehingga ombak laut selatan Bali leluasa menyapu bekas lahan huma yang disulap menjadi usaha tambak udang. Tergerusnya lahan-lahan dan bangunan di pinggiran pantai menjadi bukti nyata, betapa kerusakan dan kehancuran Bali dari pesisir sungguh ancaman serius.

Penanganan abrasi pantai-pantai di Bali selama ini memang cenderung sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh dan serentak. Kalau di satu tempat terbendung maka tekanan air akan terus mencari celah ke tempat lain, akibat sifat refraksi dari gelombang.



Gambar 4. *Tanggul beton di Nusa Penida*

Upaya menghadang ombak yang dilaksanakan di daerah ini memang terkesan setengah hati. Kurang memperhitungkan karakteristik ombak dan keadaan pantai. Padahal, pantai curam, seperti di kawasan Padanggalak, jelas kurang tepat bila langsung dibikinkan tanggul di pinggir

pantai, seperti dilakoni selama ini. Seharusnya ada pemecah gelombang (*sumberged breakwater*) di lepas pantai, sehingga tekanan gelombang sampai ke bibir pantai mengecil. Cara ini telah dilakukan di Pantai Beraban, di seputar Pura Tanah Lot.

Selain karakteristik ombak, pemilihan bebatuan sebagai tanggul tiada kalah penting diperhitungkan. Pemasangan batu karang hasil alam di kawasan Bukit Badung, seperti yang banyak dipergunakan pada beberapa pantai di Gianyar dan Denpasar, tak sepenuhnya mampu menahan gerusan ombak. Mudah terkikis. Bukankah lebih bagus mempergunakan batu yang dipasang berkait—bisa diikat dengan jaring. Di samping cocok sebagai tempat hidup lumut, material pasir yang dibawa ombak dari laut nantinya bisa mengendap di sela-sela bebatuan. Ujung-ujungnya, pengamanan pantai secara alami akan terbentuk.

Atau lakukan penanganan dengan kelembutan, secara alami, lewat memagari pantai dari aneka tetumbuhan pinggir pantai, seperti pandan. Hanya, cara ini tak sepenuhnya berlaku di lapangan. Sebaliknya, kawasan pantai yang semula banyak berhiaskan hutan bakau, pandan, dan waru, kini banyak disulap dengan bangunan beton. Seperti terlihat di sepanjang wilayah Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan.

Daerah yang semula tanpa penghuni dan banyak ditumbuhi tanaman bakau, belakangan dibabat dan beralih fungsi menjadi hutan beton. Luas hutan bakau di sekitar Bena sesuai data Monografi Pulau Bali terbitan Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, Djakarta tahun 1955, mencapai luas 2.792 hektare, sekarang hanya tinggal setengah, sebanyak 1.373,5 hektare. Akibat kurang memperhatikan hutan bakau, bukan saja memberi peluang munculnya abrasi, tapi juga lenyapnya tempat ikan-ikan berkembang biak. Itu berarti kesempatan orang-orang di tepian pantai yang mengandalkan hidup dari menangkap ikan, sebagai *banega* (nelayan) makin tipis harapannya untuk bisa panen.

Tentu bukan sekadar berbahaya bagi manusia. Perilaku kejahatan pada pesisir juga mengancam keberadaan tempat suci. Perlu disadari, di sepanjang pesisir Bali, ada banyak pura. Baik berstatus kahyangan jagat, dangkahyangan, pura desa, sampai ke pura subak. Di pesisir utara ada Pura Ponjok Batu, Pura Pulaki, Pura Pabean. Di Bali selatan agak ke timur ada Pura Gumang, Pura Goa Lawah, dan lainnya.

Fenomena abrasi pantai di pantai selatan Bali, khususnya wilayah Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi gelombang laut dan perlakuan pantai di wilayah lainnya yang kurang holistik. Sedangkan faktor internal mencakup aktifitas masyarakat di sekitar pesisir yang kurang peduli terhadap fungsi ekologi pesisir.

BAB VIII

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

8.1 Pendahuluan

Dalam upaya memberikan masukan masukan terhadap berbagai konsep dan kebijakan serta strategi pengembangan kepariwisataan nasional dan daerah maka perlu kajian dan pemikiran ulang terhadap berbagai indikator pembangunan kepariwisataan. Pengkajian tersebut didasarkan kepada berbagai indikator yang terdalem pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata mencakup empat indikator, yaitu: (1) Pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan, (2) Pembangunan pariwisata yang dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal, ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, (3) Pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, dan (4) Pembangunan pariwisata yang menghargai kebudayaan masyarakat setempat.

8.2 Dampak dari Pengembangan Pariwisata

Tidak hanya dampak positif, kegiatan pariwisata dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan obyek pariwisata maupun terhadap lingkungan sosial budaya setempat (Supriana N. 1997). Lingkungan didefinisikan dahulu sebagai sesuatu yang terdiri dari tiga komponen, yaitu lingkungan alam, binaan dan budaya yang saling terkait dan akan ada pengaruh lintas komponen yang dikaitkan dengan pembangunan pariwisata. Konsep

holistik mengenai lingkungan ini perlu untuk menyadari seluruh jelajah dampak potensial yang dapat ditimbulkan dari proyek atau pembangunan. (OECD, 1981).

Lingkungan alam dapat digambarkan mencakup udara, tanah, cahaya matahari, iklim, flora dan fauna. Lingkungan Binaan mencakup perkotaan, prasarana, ruang terbuka dan unsur bentang kota. Lingkungan Budaya mencakup nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, moral, seni, hukum, dan sejarah masyarakat. Lingkungan budaya juga dapat ditinjau dari dua tingkat, yaitu budaya tingkat tinggi seperti teater, gamelan, tarian istana, dan budaya rakyat yang populer seperti kesenian rakyat serta kesenian populer, kontemporer, dan ungkapan budaya bangsa.

Tipologi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai dampak potensial kegiatan pariwisata, Gree dan Hunter (1993) meneliti tentang dampak negatif pada lingkungan budaya yang dibagi dalam 6 komponen lingkungan yang akan rusak/berubah, yaitu : (1) nilai dan kepercayaan, (2) moral, (3) perilaku, (4) seni dan kerajinan, (5) hukum dan ketertiban, dan (6) sejarah. Hartanto (1997), menambahkan daftar dampak negatif lainnya yang akan terjadi pada Lingkungan Binaan dan Lingkungan Alam, yaitu pada: (1) flora dan fauna, (2) polusi, (3) erosi, (4) sumber daya alam, (5) pemandangan.

Komponen Lingkungan	F e n o m e n a Dampak Negatif	Kegiatan Pariwisata yang Menimbulkan Dampak Negatif
Flora dan Fauna	Gangguan perkembangan	1. Pengamatan burung 2. Gerak jalan
	Hilangnya atau kepunahan binatang	3. Perburuan liar 4. Hewan diawetkan dan bagian tubuh hewan 5. Masakan istimewa 6. Lingkungan alam yang dipadati pengunjung
	Perubahan pola migrasi hewan	7. Pariwisata di jalur migrasi
	Kerusakan vegetasi	8. Pembangunan sarana wisata baru 9. Kegiatan wisatawan di hutan lindung

Polusi	Polusi air	10. Limbah cair 11. Ceceran (minyak dan kimia berbahaya lain) 12. Pembuangan sampah padat
	Polusi udara	13. Emisi kendaraan
	Polusi suara	14. Terlampau padat 15. Kemacetan lalu lintas 16. Kehidupan malam yang tak terkendali
Erosi	Pengikisan permukaan tanah	17. Lalu lintas terlalu padat
	Tanah longsor	18. Lingkungan binaan tak terkendali 19. Penggundulan hutan
	Kerusakan D A S	20. Wisata berperahu tak terkendali 21. DAS terlampau dipadati penghuni / pengunjung
Sumber Daya Alam	Habisnya cadangan air tanah dan air permukaan	22. Terlalu banyak kawasan terbangun 23. Kerusakan sumber air
	Tingginya kemungkinan kebakaran	24. Api yang tak terkendali 25. Wisatawan yang tak bertanggung jawab
Dampak Pemandangan	Kawasan terbangun yang tanpak buruk	26. Tak ada perencanaan dan pengendalian (lansekap)
	Pemandangan yang kotor	27. Sampah 28. Kebersihan tak terjaga

Khususnya bagi daerah pesisir berbagai permasalahan yang umumnya ditemukan di wilayah pesisir dan bahari saat ini antara lain :

- 1). Penurunan sumberdaya alamiah: (a) erosi pantai; (b) konversi hutan bakau untuk tata guna lahan lainnya; (c) pengreklamasi wilayah pantai; (d) penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun; (e) tangkap lebih dan (e) eksploitasi lebih terhadap hutan bakau.
- 2). Polusi: (a) sumber-sumber industri (sampah); (b) sumber domestik (sampah rumah tangga dan sampah keras);

- (c) sumber-sumber dari pertanian (aliran atas bahan-bahan pestisida dan pupuk); dan (d) sumber-sumber lain (penggalan/penambangan).
- 3). Konflik penggunaan lahan: (a) tidak adanya akses ke arah pantai sebagai akibat padatnya pemukiman pada daerah tersebut; (b) tidak bisa dipergunakan daerah pantai akibat polusi yang sangat tinggi; dan (c) konservasi dan preservasi terhadap hutan bakau versus konversi sumberdaya yang sama untuk dijadikan tambak ikan/udang atau reklamasi menjadi daerah pemukiman atau untuk tujuan komersial lainnya.
- 4). Pengrusakan kehidupan dan kepemilikan akibat bencana alam: (a) banjir yang diakibatkan oleh badai; (b) gempa bumi; (c) angin topan cyclone, dan (d) tsunami.

4.3 Dasar Pemikiran

Penyusunan indikator keberhasilan Pembangunan pariwisata ini dilandasi oleh pemikiran pariwisata sebagai suatu sistem. Sebagai suatu industri, maka pariwisata dapat dijabarkan dalam Input, Proses, dan Output. Dengan menggambarannya sebagai sebuah sistem, maka akan memudahkan di dalam menemukan indikator keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Salah satu pendekatan system yang dapat dilakukan adalah pendekatan *Black Boxed Model System*. Dalam pendekatan ini system pariwisata dilihat dalam empat (4) aspek yaitu: 1. Controlled Inputs, 2. Controlled Inputs, 3. Desired Output, dan 4. Undesired Output. (Lihat Matrik I)

Matrik I Aspek dan Variabel Indikator KPKN

ASPEK	VARIABEL
1. Controllable Inputs	1. Dana
	2. Teknologi
	3. Sumber Daya Manusia
	4. Regulasi
	5. Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas
	6. Ruang
	7. Tenaga Kerja
	8. Pelayanan
2. Uncontrollable Inputs	1. Alam
	2. Lingkungan
	3. Posisi/Lokal
	4. Kebijakan Global
	5. Kondisi Ekonomi Global
3. Desired Output	1. Wisatawan
	2. Belanja
	3. Tenaga kerja
	4. Income Penduduk
	5. Devisa
	6. Manfaat
4. Undesired Output	1. Kerusakan Lingkungan Hidup
	2. Perubahan Budaya
	3. Kebocoran Devisa
	4. Persaingan antar Pelaku

ASPEK	ARAHAN INDIKATOR	VARIABEL	TOOLS
<p><u>Kerusakan Lingkungan Hidup</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan adalah kondisi penurunan kualitas kondisi suatu fenomena lingkungan hidup akibat kegiatan kepariwisataan yang berlangsung. 	1. Terjadi kasus pencemaran dan tanah yang terjadi di dalam/sekitar DTW/Kawasan pariwisata.	Kadar e-coli, kerusakan muka tanah, erosi	Survey

<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Hidup adalah lingkungan fisik/abiotik dan biotik yang terdapat di dalam dan sekitar DTW/Kawasan Wisata, baik pada matra daratan, pesisir, dan laut. 	<p>1. Terjadi kasus pencemaran air tanah, badan air (sungai) yang terjadi di dalam/sekitar DTW/Kawasan pariwisata.</p>	<p>Kadar e-coli, kadar zat-zat beracun, limbah beracun perairan</p>	<p>Survey</p>
	<p>2. Terjadi Erosi permukaan tanah</p>	<p>Persentase permukaan tanah yang tererosi sebagai gangguan situs karena aktifitas wisata, penggundulan dan erosi karena penggunaan lain seperti penebangan, pembangunan jalan.</p> <p>% permukaan tanpa pohon atau tutupan semak (dibedakan ruang terbuka alami atau ruang terbuka karena aktifitas manusia)</p>	<p>Pencatatan periodic (tahunan) Survey Wawancara Observasi</p>
	<p>3. Terjadi pembangunan fasilitas wisata di daerah-daerah konservasi, seperti sempadan sungai, jurang, danau, pantai, sebagaimana yang diatur oleh UU.</p>	<p>Perbandingan kawasan terbangun untuk fasilitas wisata dengan kawasan hijau</p>	<p>Survey</p>
	<p>4. Terjadi kasus pembuangan limbah hotel/villa/restoran tanpa proses pengolahan sesuai standar yang diatur oleh peraturan yang berlaku ke tanah, sungai, dan pantai.</p>	<p>Jumlahkasus hotel/villa/restoran yang membuang limbah tanpa proses pengolahan sesuai standar yang diatur oleh peraturan yang berlaku ke tanah, sungai, dan pantai.</p>	<p>Survey</p>
	<p>5. Terjadi kasus pembangunan fasilitas wisata yang merubah secara massif bentuk bentang lahan asli (geomorfologi).</p>	<p>Jumlah kasus pembangunan fasilitas wisata yang merubah secara massif bentuk bentang lahan asli (geomorfologi).</p>	<p>Survey</p>
	<p>Terjadi kasus eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya hayati (flora dan fauna) untuk kepentingan kegiatan wisata.</p>	<p>Jumlah kasus eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya hayati (flora dan fauna) untuk kepentingan kegiatan wisata.</p>	<p>Survey</p>

2. Variabel Perubahan Budaya

ASPEK	ARAHAN INDIKATOR		
<p><u>Perubahan Budaya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan adalah suatu proses perubahan yang kondisi unsur-unsur ke arah kualitas yang lebih rendah. 	1. Terjadi pelecehan budaya oleh wisatawan yang terjadi di dalam/sekitar DTW/Kawasan pariwisata.	Jumlah kasus pelecehan budaya oleh wisatawan yang terjadi di dalam/sekitar DTW/Kawasan pariwisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Budaya mencakup nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, moral, seni, hukum, dan sejarah masyarakat. 	2. Terjadi profanisasi kesenian sakral masyarakat yang terjadi di dalam/sekitar DTW/Kawasan pariwisata.	Jumlah kasus profanisasi kesenian sakral masyarakat yang terjadi di dalam/sekitar DTW/Kawasan pariwisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	3. Terjadi perubahan sistem nilai-nilai, warga masyarakat akibat kegiatan pariwisata yang dimuat di media massa di suatu kawasan/destinasi wisata.	Jumlah kasus perubahan sistem nilai-nilai, warga masyarakat akibat kegiatan pariwisata yang dimuat di media massa di suatu kawasan/destinasi wisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	4. Terjadi perubahan sistem kepercayaan, warga masyarakat akibat kegiatan pariwisata yang dimuat di media massa di suatu kawasan/destinasi wisata.	Jumlah kasus perubahan sistem kepercayaan, warga masyarakat akibat kegiatan pariwisata yang dimuat di media massa di suatu kawasan/destinasi wisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	5. Terjadi perubahan pola perilaku warga masyarakat akibat kegiatan pariwisata yang dimuat di media massa di suatu kawasan/destinasi wisata.	Jumlah kasus perubahan pola perilaku warga masyarakat akibat kegiatan pariwisata yang dimuat di media massa di suatu kawasan/destinasi wisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	6. Terjadi komersialisasi sistem upacara adat masyarakat setempat untuk kegiatan pariwisata.	Jumlah kasus komersialisasi sistem upacara adat masyarakat setempat untuk kegiatan pariwisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	7. Terjadi komersialisasi sistem upacara agama masyarakat setempat untuk kegiatan pariwisata.	Jumlah kasus komersialisasi sistem upacara agama masyarakat setempat untuk kegiatan pariwisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa

3. Variabel Kebocoran Devisa

VARIABEL	ARAHAN INDIKATOR	VARIABEL	TOOLS
<p><u>Kebocoran Devisa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebocoran pendapatan pariwisata akibat terjadinya flow (aliran) pendapatan ke luar negeri akibat berbagai faktor: 	1. Terdapat unit-unit usaha di bidang jasa pariwisata (hotel, restoran, travel agent, money changer; dll) yang dimiliki oleh WNA di dalam/sekitar DTW/ Kawasan pariwisata.	Jumlah unit-unit usaha di bidang jasa pariwisata (hotel, restoran, travel agent, money changer; dll) yang dimiliki oleh WNA di dalam/sekitar DTW/Kawasan pariwisata.	Survey/ wawancara
	2. Terdapat unit-unit usaha di luar jasa pariwisata namun masih terkait dengan sektor pariwisata (misalnya: usaha jual beli villa, ekspor-import souvenir, sekolah) yang dimiliki oleh WNA di dalam/ sekitar DTW/Kawasan pariwisata.	Jumlah unit-unit usaha di luar jasa pariwisata namun masih terkait dengan sektor pariwisata (misalnya: usaha jual beli villa, ekspor-import souvenir, sekolah) yang dimiliki oleh WNA di dalam/sekitar DTW/ Kawasan pariwisata.	Survey/ wawancara
	3. Adanya pekerja asing yang bekerja di hotel/restoran/ villa/travel agent yang terdapat di suatu kawasan/ destinasi wisata.	Jumlah pekerja asing yang bekerja di hotel/ restoran/ villa/ travel agent yang terdapat di suatu kawasan/destinasi wisata.	S u r v e y / wawancara
	4. Adanya pekerja asing yang bekerja di unit-unit usaha di luar jasa pariwisata namun masih terkait dengan sektor pariwisata (misalnya: usaha jual beli villa, ekspor-import souvenir, sekolah) yang terdapat di suatu kawasan/destinasi wisata.	Jumlah pekerja asing yang bekerja di unit-unit usaha di luar jasa pariwisata namun masih terkait dengan sektor pariwisata (misalnya: usaha jual beli villa, ekspor-import souvenir, sekolah) yang terdapat di suatu kawasan/destinasi wisata.	S u r v e y / wawancara
	5. Adanya usaha jasa pariwisata yang membeli bahan baku untuk kebutuhan usahanya dengan mengimpor dari luar negeri.	Jumlah usaha jasa pariwisata yang membeli bahan baku untuk kebutuhan usahanya dengan mengimpor dari luar negeri.	S u r v e y / wawancara

4. Variabel Persaingan Antar Pelaku

VARIABEL	INDIKATOR	VARIABEL	TOOLS
Persaingan antar Pelaku • Praktik-praktik usaha yang tidak sehat yang dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan persaingan namun dengan cara-cara yang tidak sehat.	1. Terjadi perang tarif di antara pelaku usaha jasa pariwisata (hotel, restoran, travel agent, money changer, dll) yang berakibat pada ketidakpastian harga .	Jumlah kasus perang tarif di antara pelaku usaha jasa pariwisata (hotel, restoran, travel agent, money changer, dll) yang berakibat pada ketidakpastian harga .	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	2. Terjadi tindakan propaganda negative dari pelaku usaha yang bertujuan menjelek-jelekkan saingan usaha sejenis.	Jumlah kasus tindakan propaganda negative dari pelaku usaha yang bertujuan menjelek-jelekkan saingan usaha sejenis.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	3. Jumlah usaha yang berlebihan dalam satu jenis usaha tertentu yang menimbulkan kemubaziran.	Jumlah kasus usaha yang berlebihan dalam satu jenis usaha tertentu yang menimbulkan kemubaziran.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	4. Terjadi konflik antara pelaku usaha pariwisata akibat persaingan usaha yang tidak sehat yang dimuat di media massa.	Jumlah kasus konflik antara pelaku usaha pariwisata akibat persaingan usaha yang tidak sehat yang dimuat di media massa.	Wawancara Rekaman kasus di media massa
	5. Terjadi upaya sengaja untuk mengarahkan wisatawan untuk membeli produk usaha jasa kepada pelaku usaha tertentu secara terus-menerus yang melibatkan guide dan biro perjaanan wisata.	Jumlah kasus upaya sengaja untuk mengarahkan wisatawan untuk membeli produk usaha jasa kepada pelaku usaha tertentu secara terus-menerus yang melibatkan guide dan biro perjaanan wisata.	Wawancara Rekaman kasus di media massa

BAB IX

PENGELOLAAN WISATA ALAM BERBASIS DANAU

9.1 Pendahuluan

Danau merupakan ekosistem perairan alam yang umumnya berada di daerah pegunungan, berfungsi sebagai penyangga tata air di bagian bawahnya. Ratusan mata air yang mencul di lereng bawahnya, kemungkinan berasal dari danau tersebut. Melestarikan air danau dan lingkungan sekitarnya menjadi penting. Pemanfaatan air danau secara intensif, perlu diantisipasi dampak yang diakibatkannya, karena danau merupakan *equilibrium natural ecosystem* (Ergazaki dan Ampatzidis, 2012), yang sejak ribuan tahun telah mapan keseimbangannya.

Bali memiliki empat buah danau alam, yaitu: Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Ketiga danau yang disebutkan terakhir berada pada sebuah kawasan yang disebut Kawasan (kaldera) Bedugul. Dapat dianalogikan bahwa Bedugul merupakan “kepalanya”(ulu) Orang Bali, karena merupakan tempat sumber mata air yang disucikan. Pura Ulun Danu yang terletak di Danau Beratan, merupakan penanda budaya yang mengokohkan tafsir sakralitas Bedugul sebagai kawasan suci. Dengan ditetapkannya Bedugul sebagai kawasan pariwisata, menjadikan bertambahnya tafsir terhadap ketiga danau tersebut, sebagai lansekap tempat berlangsungnya aktivitas pariwisata yang cenderung sekuler.

Danau Beratan terletak di Kabupaten Tabanan, merupakan salah satu danau di Pulau Bali yang memiliki

luas genangan 3,85 km² , panjang danau sekitar 7,5 km, lebar 2,0 km, kedalaman maksimum sekitar 20 m serta berada di ketinggian 1231 m di atas permukaan laut. Volume tampung air Danau Beratan adalah sebesar 49,22 juta m³ dengan luas daerah tangkapan air seluas 13,40 km² (BPS Provinsi Bali, 2010). Danau Beratan tergolong danau kaldera dengan sistem perairan yang tertutup (*enclosed lake*) [Hehanussa dan Haryani, 2010]. Sedangkan Kabupaten Buleleng merupakan tempat dua danau lainnya berada, yaitu Danau Tamblingan di Kecamatan Banjar dengan luas 110 hektar dan Danau Buyan di Kecamatan Sukasada dengan luas 360 hektar.

Ketiga danau yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini (selanjutnya disebut *Tri ning Danu*) terletak di Kawasan Bedugul dan Pancasari. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, menetapkan Kawasan Bedugul dan Pancasari sebagai Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK). Ini artinya pengembangan pariwisata sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup, dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tulisan ini mencoba memetakan pola relasi antara *stakeholder* pariwisata dengan alam berbasis danau di Kawasan Wisata Bedugul. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi *stakeholder* pariwisata, pola relasi antara aktor dengan ketiga danau (*Tri ning Danu*) di Kaldera Bedugul (Buyan, Tamblingan, dan Beratan), serta implikasi yang muncul dari pola relasi tersebut. Pembahasan difokuskan untuk mengkaji permasalahan yang muncul dari kontestasi penafsiran tersebut, beserta dinamika yang ditimbulkannya. Basis penafsiran yang

berbeda dikhawatirkan memproduksi tata relasi antara sesama aktor, dan antara aktor dengan alam, secara kontraproduktif. Hasil kajian ini akan menjadi dasar dalam menemukan basis isu yang bisa menjadi bahan untuk model pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis sumber daya danau, sebagai titik temu aspirasi kepentingan, baik aktor maupun alam.

9.2 Identifikasi *Stakeholders* Pariwisata di Kawasan

Tipologi Aktor

Aktor merupakan merupakan pelaku konkrit dalam ruang dan waktu spesifik, bisa individual atau kolektif (kelembagaan) [Giddens: 1984,1995]. Terdapat dua cara dalam mengidentifikasi aktor, yaitu: (i) ditinjau dari pola menetap dan legitimasi yang dimiliki; serta (ii) aksesnya terhadap sumber daya pariwisata. Dari konteks kedudukannya empat tipologi aktor, yaitu: aktor internal, aktor eksternal, kuasi internal, dan kuasi eksternal.

Aktor internal adalah pelaku pariwisata yang tinggal dan menetap secara reguler di sekitar sumber daya pariwisata utama berdasarkan aspek historis dan kepentingan tertentu dengan ada ataupun tidak adanya praktik pariwisata. Sedangkan aktor eksternal adalah mereka yang berada di sekitar sumber daya pariwisata utama karena memiliki kepentingan spesifik terhadap pariwisata.

Pengertian kuasi aktor adalah pelaku pariwisata yang tidak sepenuhnya masuk kategori tipe eksternal maupun internal, akan tetapi mengalami proses internalisasi atau eksternalisasi. Proses internalisasi terjadi ketika aktor eksternal tinggal dan menetap di suatu destinasi dan memiliki akses serta kuasa atas sumber daya pariwisata. Sedangkan proses eksternalisasi berlangsung ketika aktor internal terkikis aksesnya terhadap sumber daya pariwisata yang dimiliki, karena kurangnya pengetahuan dan/atau rendahnya kepedulian.

Tipologi Aktor Berbasis Pola Menetap dan Kepentingan Pariwisata

AKTOR EKSTERNAL	KUASI EKSTERNAL
KUASI INTERNAL	AKTOR INTERNAL

Sedangkan terkait dengan akses yang dimiliki dan kuasa atas sumber daya pariwisata yang terdapat dalam suatu destinasi, terdapat dua jenis dari aktor, yaitu: aktor utama dan aktor umum. Aktor utama dan aktor umum bisa bersifat individual atau institusional. Aktor utama merupakan pelaku pariwisata yang mendominasi sumber daya pariwisata, sedangkan aktor umum merupakan pelaku pariwisata yang relatif terdominasi oleh aktor utama sehingga memiliki akses dan kuasa yang terbatas terhadap sumber daya pariwisata di suatu destinasi.

Komposisi Stakeholders Pariwisata Berdasarkan Tipologi Aktor

Dalam konteks tulisan ini, *stakeholder* pariwisata di *Tri ning Danu* diartikan sebagai kelompok aktor yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi isu berdasarkan kuasa serta kepentingan relatif mereka terhadap sumber daya pariwisata berbasis danau (Ramirez, 1999). Komposisi *stakeholder* merupakan pemetaan dari berbagai kelompok aktor berdasarkan tipologi aktor yang dimiliki.

1. Komposisi *Stakeholder* Pariwisata Danau Beratan

Komposisi *stakeholder* pariwisata yang berada di Danau Beratan terdiri dari empat komponen, yaitu: masyarakat lokal Desa Candi Kuning, Pemerintah Kabupaten Tabanan, investor, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Bali. Berikut komposisi aktor pariwisata Danau Beratan berdasarkan tipologinya:

Tipologi Aktor di *Danau Beratan*

Tipologi Aktor		
Pelaku	Akses	Pola Menetap dan Kepentingan
Masyarakat Lokal	Utama	Internal
Pemerintah Kabupaten	Umum	Kuasi Internal
Investor	Umum	Kuasi Internal
BKSDA	Umum	Kuasi Eksternal

Masyarakat lokal Candi Kuning memiliki tipologi aktor utama internal, yang artinya memiliki akses utama dalam pengelolaan pariwisata serta merupakan masyarakat lokal setempat. Kuasa masyarakat lokal terepresentasi oleh institusi pariwisata yang mereka bentuk yaitu Badan Pengelola Destinasi Danau Beratan. Lewat institusi ini, masyarakat lokal berpartisipasi aktif sehingga memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan strategis terkait isu pariwisata aktual Danau Beratan. Selain itu, mereka mendapatkan manfaat dari praktik pariwisata berupa keuntungan secara ekonomis.

2. *Stakeholders* Pariwisata Danau Buyan

Komposisi *stakeholder* pariwisata yang berada di Danau Buyan terdiri dari empat komponen, yaitu: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan masyarakat lokal Desa Pancasari. Berikut komposisi aktor pariwisata Danau Beratan berdasarkan tipologinya:

Tipologi Aktor Danau Buyan

Tipologi Aktor		
Pelaku	Akses	Pola Menetap dan Kepentingan
BKSDA	Utama	Internal
Pemerintah Kabupaten	Umum	Kuasi Internal
Masyarakat Lokal	Umum	Kuasi Eksternal
Investor	Umum	Eksternal

Pelaku utama pariwisata di Danau Buyan adalah BKSDA Bali dengan bingkai Danau Buyan dan Tamblingan sebagai Kawasan Wisata Alam Danau Buyan dan Tamblingan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2847/Menhut-VII/KUH/2014. BKSDA disebut sebagai aktor dengan tipologi utama-internal karena memiliki akses langsung ke danau dengan legitimasi formal dari negara, serta hadir dan menetap di ranah Buyan dan Tamblingan dengan kepentingan konservatif. Sementara *stakeholder* pariwisata lainnya terdominasi oleh BKSDA, dengan posisi masyarakat lokal sebagai aktor paling subordinat.

Posisi sub ordinat masyarakat lokal terjadi ketika mereka gagal dalam mengorganisir segenap komponen internal mereka untuk terlibat dalam pariwisata. Spirit untuk berpartisipasi dalam praktik pariwisata hanya terdapat pada segelintir tokoh, sehingga bersifat personal. Dalam hal ini masyarakat lokal memiliki tipologi umum-kuasi eksternal, yang artinya bergerak menjauh dari praktik pariwisata yang ada walaupun berada di wilayah tempat mereka tinggal.

3. *Stakeholder* Pariwisata Danau Tamblingan

Komposisi *stakeholder* pariwisata yang berada di Danau Buyan terdiri dari empat komponen, yaitu: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, masyarakat lokal Desa

Gobleg, investor, Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berikut komposisi aktor pariwisata Danau Beratan berdasarkan tipologinya:

Tipologi Aktor Danau Tamblingan

Tipologi Aktor		
Pelaku	Akses	Pola Menetap dan Kepentingan
BKSDA	Utama	Internal
Masyarakat Lokal	Umum	Kuasi Internal
Pemerintah Daerah	Umum	Kuasi Internal
Investor	Umum	Kuasi Internal

Pelaku utama pariwisata di Danau Tamblingan sama seperti di Danau Buyan yaitu BKSDA Bali. Hal ini wajar karena kedua danau disatukan konsepsi praktik pariwisatanya oleh institusi ini sebagai Kawasan Wisata Alam Danau Buyan dan Tamblingan. Temuan menariknya, masyarakat lokal berposisi sebagai aktor bertipologi kuasi internal, yang artinya mulai terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata. Mereka berhimpun dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Tamba Eling” yang difasilitasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan melakukan kerjasama dengan investor serta BKSDA.

Posisi masyarakat lokal di Danau Tamblingan dapat dikatakan lebih baik dari pada posisi masyarakat lokal di Danau Buyan (umum-eksternal), walaupun belum sebaik di Danau Beratan (utama-internal).

9.3 Pola Relasi antara Aktor dengan Ketiga Danau Berbasis Tiga Jenis Penafsiran

Jenis Penafsiran aktor merupakan cara pandang khas yang berada dalam *mindset* aktor utama dan menentukan pola relasi hubungan dengan sumber daya pariwisata yang dimiliki

sehingga memproduksi tindakan/praktik sosial spesifik (Berger, 2011). Dua variabel yang muncul terkait ideologi dalam konteks penelitian ini adalah aktor dan jenis tafsir. Aktor merupakan merupakan pelaku konkrit dalam ruang dan waktu spesifik, bisa individual atau kolektif (kelembagaan).

Terdapat tiga jenis penafsiran aktor terhadap lansekap Bedugul, yaitu secara ekologis, secara teologis, dan turistic. Mereka yang berangkat dari tafsir ekologis akan menyoroti degradasi kualitas dan kuantitas dari air di ketiga danau. Sementara yang berpijak dari tafsir teologis akan berfokus pada kualitas kesucian kawasan secara etis dan estetis. Tafsir turistic akan memandangnya sebagai ruang pragmatis, arena tempat berpraktik mencari suasana dan pengalaman baru yang diharapkan sepadan dengan sumber daya yang telah mereka keluarkan, yaitu waktu dan biaya. Tafsir dominan merupakan kerangka penafsiran utama aktor dalam memandang danau. Dalam bingkai penafsiran, ketiga jenis penafsiran terformulasi menjadi satu, dan adanya tafsir dominan tidak menghilangkan penafsiran lainnya. Artinya, dalam mempersepsi danau, para aktor memiliki ketiga komponen tafsir (teologis, turistic, ekologis). Urutan penyebutan akan menentukan jenis tafsir dominan aktor. Sedangkan, tafsir subordinat merupakan kerangka penafsiran yang terdominasi oleh tafsir utama dalam *mindset* aktor.

Pola Relasi Aktor dengan Tri ning Danu

Danau	Stakeholder Utama	Jenis Tafsir Dominan	Tafsir Subordinat
Beratan	Masyarakat Lokal-Investor	Teologis	Turistic-Ekologis
Buyan	BKSDA	Ekologis	Turistic-Teologis
Tamblingan	BKSDA-Masyarakat Lokal	Ekologis	Teologis-Turistic

9.4 Implikasi atas Pola Relasi Aktor-Danau

Implikasi Kerangka Tafsir terhadap Karakter Fisik Danau

Tinjauan tentang karakteristik danau mengkaji potensi danau dilihat dari kuantitas dan kualitas air danau. Keberadaan air danau di Bali sangat penting artinya bagi sungai-sungai serta cadangan air tanah yang ada di bawahnya. Karena semua danau terletak di daerah pegunungan, dan merupakan danau tertutup / tanpa *outlet*. Ketiga danau fokus kajian penelitian yang terletak di kaldera Bedugul juga merupakan danau tertutup. Danau Beratan meskipun mempunyai *outlet* hanya berfungsi pada saat intensitas hujan tinggi, sehingga berpotensi menggenangi Pura Ulun Danu Beratan. Jadi *outlet* itu hanya berfungsi saat intensitas hujan yang berpotensi menaikkan elevasi muka air danau. Sedangkan Danau Buyan dan Danau Tamblingan masih terlihat alami dibandingkan dengan Danau Beratan. Aktivitas pariwisata di air danau hampir dapat relatif tidak ada. Apalagi di Danau Tamblingan hanya digunakan untuk akses menuju Pura dengan menggunakan sampan. Berikut karakteristik fisik danau berdasarkan kuantitas dan kualitas air danau:

Kuantitas dan Kualitas Air Danau

Danau	Kuantitas	Kualitas	Tafsir Dominan
Beratan	62.960.000 m ³	Berat	Turistis
Buyan	96.733.443m ³	Sedang	Ekologis
Tamblingan	33.530.000m ³	Ringan	Ekologis

Kualitas air di ketiga danau terkait erat dengan jenis tafsir dominan *stakeholder* pariwisata. Kualitas air Danau Beratan tercemari dengan katagori berat dikarenakan aktivitas pariwisata yang ada lebih mengutamakan jumlah kunjungan

wisatawan sehingga relatif kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Variasi atraksi yang ditawarkan dengan mengkreasi *water tourism* berkarakter *mass*, berkontribusi dalam konteks pencemaran tersebut.

Implikasi terhadap Paradigma Praktik Pariwisata

Sejauh dapat diidentifikasi, terdapat perbedaan praktik/langgam penyelenggaraan pariwisata di ketiga danau. Untuk Danau Beratan telah berlangsung praktik pariwisata massal, di lansekap Danau Buyan terdapat aktivitas pariwisata alternatif dengan basis atraksi utama berupa kekayaan sumber daya alam (SDA) [formasi geologi, flora, dan fauna], dan di Danau Tamblingan atraksi berbasis pariwisata spiritual.

Paradigma Pariwisata Eksisting di *Tri ning Danu*

Danau	Langgam Pariwisata	Jenis Tafsir (urut berdasarkan dominasi)
Beratan	Massal	Teologis-Turistis-Ekologis
Buyan	Alternatif berbasis SDA	Ekologis-Turistis-Teologis
Tamblingan	Alternatif berbasis Spiritual	Ekologis-Teologis-Turistis

Implikasi terhadap Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Praktik Pariwisata

Tipologi partisipasi masyarakat lokal, merupakan jenis keterlibatan masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pariwisata di wilayahnya terkait dengan aspek keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan pariwisata (Tosun, 2000).

Tipologi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pariwisata *Tri ning Danu*

Danau	Tipologi Partisipasi Masyarakat Lokal		
	Spontan	Terdorong	Terpaksa
Beratan	√		
Buyan			√
Tamblingan		√	

Dalam konteks partisipasi masyarakat lokal, untuk masyarakat di Danau Beratan memiliki jenis partisipasi spontan. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal yang menetap di daya tarik wisata tersebut memiliki tipologi aktor utama-internal yang artinya menjadi pelaku utama sebagai penyelenggara praktik pariwisata. Sedangkan untuk masyarakat lokal di Danau Tamblingan memiliki jenis partisipasi terdorong dengan tipologi aktor umum-kuasi internal yang artinya telah memiliki kesadaran serta spirit keterlibatan dalam penyelenggaraan pariwisata di wilayah mereka tinggal. Untuk jenis partisipasi terpaksa dimiliki oleh masyarakat lokal di Danau Buyan. Tipologi sebagai aktor yang umum-kuasi eksternal menyebabkan keterlibatan mereka dalam pariwisata yang diselenggarakan di wilayahnya menjadi kurang intens.

9.5 Simpulan dan Saran

Kajian ini menyimpulkan beberapa poin penting, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan *stakeholder* pariwisata Bedugul terdiri dari masyarakat lokal, aparatus pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Tabanan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali) serta pengusaha pariwisata.
2. Masing-masing aktor memiliki tafsir khas yang menentukan pola relasi mereka dengan danau, yaitu:

- teologis, ekologis, dan turistic.
3. Masyarakat lokal memproduksi tafsir teologis, yaitu tata relasi dengan danau dalam bingkai spiritual dengan melakukan praktik berupa upacara ritual dan kerja produktif (perikanan, pariwisata). Aparatus pemerintah dan elemen birokrasi tertentu memiliki tafsir ekologis, yang memandang alam sebagai aset dengan kewajiban etis untuk melestarikannya dengan praktik administratif, saintifik, dan pariwisata. Pengusaha pariwisata memproduksi tafsir turistic, mendekati alam secara pragmatis yang menghasilkan praktik pariwisata ekonomistik.
 4. Implikasi dari beragam tafsir tersebut melahirkan kontestasi antar aktor dalam pemanfaatan *Tri ning Danu*, berupa konflik yang bersifat laten.

Saran

1. Ideal penyelenggaraan pariwisata di berbasis sumber daya pariwisata danau perlu memperhatikan komposisi tipologi aktor dan jenis tafsir yang dimiliki sehingga dapat diperoleh pemetaan kondisi eksisting dan aspirasi setiap komponen *stakeholder* pariwisata.
2. *Stakeholder* pariwisata *Tri ning Danu* perlu di dorong ke arah tipologi jenis aktor internal dan kuasi internal serta penguatan jenis tafsir dengan urutan komposisi teologis-ekologis-turistic.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai formulasi model yang mengintegrasikan ketiga danau di Kawasan Pariwisata Bedugul sehingga diperoleh pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, M., 2009, *Pariwisata dan Krisis Lingkungan Global* dalam buku *Pariwisata berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, Denpasar: Udayana Press.
- Berger, Peter. 2011. *Adventures of an Accidental Sociologist: How to Explain the World Without Becoming a Bore*. Amherst: Prometheus.
- Dewi, M.H.U., dkk, 2013, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali*, Jurnal Kawistara Vol. 3, Nomor 2, Agustus 2003, hlmn 129-139, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana.
- Ergazaki, M., & Ampatzidis, G. 2012. *Students' Reasoning about the Future of Disturbed or Protected Ecosystems & the Idea of the 'Balance of Nature'*. Research in Science Education, 42(3) 511-530.
- Fandeli, C. Raharjana, D.T. Kaharudin, 2003, *Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Obyek Wisata (Perencanaan Model Kelembagaan, Pasar dan Paket Wisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi)* Yogyakarta. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge : Polity (publisher).
- Giddens, Anthony. 1995. *Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought*. Cambridge : Polity
- Gunn, Clare A., (2002), *Tourism Planning Fourth Edition*, Routledge, New York.
- Ginting, Paham, (2005), *Pemasaran Pariwisata: Studi Empiris tentang Kepuasan dan Kunjungan Berkelanjutan Pariwisata Sumatera Utara*, USU Press, Medan.

- Hehanusa, P.E, Haryani Gadis S, and Ridwansyah Iwan. 2010. *An Excursion Guide to Lakes Tolire and Laguna, Ternate Island*. Jakarta: LIPI
- Held, David, *et al.*, (1999), *“Global Transformations”*, Polity Press, Cambridge.
- Hermawan, Ali, (2008). *Analisis kebijakan pariwisata Indonesia: Suatu Studi perbandingan kebijakan pariwisata Indonesia, dengan Singapura dan Malaysia*. Dimuat dalam Jurnal Kepariwisata Indonesia, Volume 3, No.1, Maret 2008.
- Inskeep, E., 1991, *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*, New York, Van Nostrand Reinhold.
- Kim, C. W., Mauborgne R., (2005). *Blue Ocean Strategy*, Penerbit Serambi, Jakarta
- Naisbitt, J., (1996), *“Megatrend ASIA”* Nicholas – Braley, London.
- Ohmae, Kenichi, (1995), *“Borderless World”*, New York.
- , (2005), *The Next Global Stage*, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Oppermann, M.&K.S.Chon, 1997, *Tourism in developing countries*, London: International
- Pearce, D, 1995, *Tourism a Community Approach*, 2nd, Harlow Longman. Rahman, Fadilal. 2009. 'Menimbang Prospek Desa Wisata', Harian Jogja, Kamis, 12 Maret 2009.
- Picard, michele, (2006). *Bali: Pariwisata Budaya dan budaya pariwisata*. KPG, Forum Jakarta-Paris.
- Ramirez, Ricardo. 1999. *“Stakeholder Analysis and Conflict Management”*. In *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*, ed. Daniel Buckles. Ottawa: International Development Research Centre
- Ritchie, Jr. Brent dan Geoffrey T. Crouch, (2003). *The Competitive destination: A sustainable tourism perspective*. CABI Publishing, USA.

- Soekadijo, R.G. 2000, *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Suardika, I Wayan. 2005. *Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Danau Buyan – Tamblingan*. Tesis Program Pasca Sarjana. Denpasar. Universitas Udayana.
- Sudarto, Gatot. 1998. *Ekowisata, Wahana Kegiatan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil Sektor Pariwisata*, MEI.
- Tapscot, D. (1996), *The Digital Economy*, Mc.Graw Hill, New York.
- Tashakkori, Abbas and Charles Taddlie. 2003. *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. USA: Sage Publication, Inc.
- Thomson Business Press. Page, S.J. & Getz, D, 1997, *The Business of rural tourism*, London: International Thomson Business Press.
- Tosun, Cevat. 2000. *Limits to community participation in the tourism development process in developing countries*. [Tourism Management Volume 21, Issue 6](#), December 2000, Pages 613–633
- Truong, Thanh. (1992). *Seks, Uang Dan Kekuasaan : Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*. Di-Indonesiakan oleh Ade Armando. Jakarta: LP3S
- United Nation-World Tourism Organization (2005), *Tourism Highlight 2005*, UN-WTO, Madrid.
- Wahab, S. 1988. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Witari, Made. 2005. *Studi Kearifan Ekologi Dalam Pengelolaan Kawasan Agrowisata Salak Sibetan di Kabupaten Karangasem Bali*. Tesis Program Pasca Sarjana. Denpasar. Universitas Udayana.
- Wood, M.E., 2002. *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*, UNEP

- Western, D. 1995. Memberi Batasan Tentang Ekoturisme, dalam Lindberg, K. dan Hawkins, D.E., *Ekoturisme : Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola*. Jakarta. PACT dan ALAMI.
- World Tourism Organization, (2004). *Indicator of sustainable development for tourism destination : A guidebook*, Madrid, Spain
- World Travel and Tourism Council (2003). *The Blueprint of New Tourism*, WTTC, London.
- Yoeti, O.A.2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Pt.Pertja.
- Yoga Atmaja, Ida Bagus. 2002. *Ekowisata Rakyat ; Lika-Liku Ekowisata di Tenganan, Pelaga, Sibetan dan Nusa Ceningan*. Kuta. Wisnu Press.

INDEKS

A

APBN 71
ASEAN 45
awig-awig 54, 90
azas-azas perencanaan 15

B

Badung 63, 72, 84, 85, 96, 98, 135
Balai Konservasi Sumber Daya
 Alam 150, 151, 152, 157
Bali ii, iii, 5, 7, 30, 32, 38, 53, 54,
 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
 67, 69, 70, 87, 88, 89, 93, 98,
 99, 108, 111, 120, 121, 123,
 124, 125, 127, 133, 134, 135,
 136, 160, 161
Bangli 72
Banten 23, 24
Bappenas 29, 39
Bedugul 147, 148, 154, 155, 157,
 158
Beeho 11
Belanda 87, 88, 120, 163
Bom Bali 98
Brazil 2

C

Cidaun 21
Code of Practice 10
created image 88
cultural tourism partnership 13

D

daerah tujuan wisata 11, 18, 19,
 40, 53, 88
dana punia 97, 119
Danau Batur 147
Danau Beratan 147, 148, 150,
 151, 153, 155, 156, 157

Danau Buyan 147, 148, 151, 152,
 153, 155, 156, 157, 161
Danau Tamblingan 147, 148, 152,
 153, 155, 156, 157
Deklarasi Johannesburg 2
Deklarasi Rio 2
Denpasar ii
Desa Baha 72
Desa Kala Patra 7
desa pakraman 58, 89, 90, 91, 96,
 98, 107, 108, 109, 110, 111,
 112, 114, 115, 116, 117, 118,
 120
Destination Management Orga-
 nization 40
Dislokasi kultural 5

E

economically viable 15
ecotourism 17, 37, 42, 47, 48, 49,
 50, 55
Empowerment of management
 73
enviromentally viable 15

F

Federation of Nature and Na-
 tional Parks 3
Focus Group Discussion 107

G

Gianyar 96, 98, 100, 102, 103,
 104, 119, 125, 128, 129, 133,
 134, 135, 136
Good Governance 35, 36
green tourism 42

H

hak asasi manusia 6, 12, 35

Hindu 60, 61, 63, 93, 94, 129

I

IMF 29

impact assessment 10

India 59, 60

Inggris 2

J

Jembrana 64, 66

K

Kawasan Daya Tarik Wisata
Khusus 148

Kementerian Pariwisata 71

Kemenuh 83, 84, 85

konflik sosial 4

Kuta 62, 66, 69, 124, 162

L

Lovina 68

M

Manuaba 5

mass tourism 5, 18, 37, 57, 88

masyarakat lokal 4, 5, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 30, 31, 42, 47, 51,
52, 53, 89, 92, 94, 95, 99,
100, 122

Milenium Development Goals
39

Moh Ali Fadillah 22

N

Nusantara 30, 88

Nyuh Kuning 105, 106, 107, 118

O

Orde Baru 25, 29

P

Palemahan 54

Parahyangan 54

pariwisata global 25

pariwisata Nasional 25, 37, 39,
43

Participatory learning 73

Pawongan 54

Pecatu 63, 64

Pembangunan berkelanjutan 1,
2, 137

pembangunan pariwisata 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20,
25, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 44, 47, 57, 58, 67,
68, 87, 137

Pemuteran 68

Pendapatan Asli Daerah 26

Penglipuran 72

Prentice 11

pro-rakyat 76

pulau Seribu Pura 87

Q

quality tourism 18

R

responsible tourism 17

S

Sanur 64, 69, 134

saujana 76

Sharpley 2

simbiosis mutualisme 42, 106

socially acceptable 15

Sriwijaya 59, 65

Sudarto 49, 50, 161

sumber daya pariwisata 10, 149,
150, 153, 158

Sungai Ayung 97, 164

Sungai Gangga 60

Sungai Godawari 60

Sungai Narmada 60

Sungai Saraswati 60

Sungai Sarayu 60

Sungai Sindhu 60

Sungai Yamuna 60
sustainable tourism 17, 25, 160

T

Tabanan 147, 150, 157, 159
Tanjung Laya 21
Tegalcangkring 66
tourism of culture 38
tourist culture 4
tradisi agraris 88
Tri Hita Karana 7, 54, 62
Tri ning Danu 148, 150, 154, 156,
158

U

Ubud 87, 89, 97, 99, 100, 105,
107, 109, 114, 115, 116, 118,
119, 120

W

water and sewer capacities 9
World Commissions for Envi-
ronmental and Develop-
ment 3

TENTANG PENULIS

Nyoman Sunarta menyelesaikan pendidikan S-1 di Gakultas Geografi UGM (1986) dan S-2 Ilmu Lingkungan, Fakultas Geografi UGM (1994). Merampungkan pendidikan S-3 di Kajian Pariwisata Universitas Udayana (2015). Ia aktif melakukan riset di bidang isu air dan dampak Pariwisata. Pernah mengikuti Short Course Integrated Coastal Zone Planning and Management di James Cook University Townsville, Australia tahun 1997.

Beberapa tulisannya di muat di berbagai jurnal nasional dan internasional. Ia juga aktif berbicara dan mempresentasikan pemikirannya dalam konferensi di dalam dan luar negeri. Pernah mengelola program double degree S-2 dan S-3 Pariwisata di Pascasarjana Universitas Udayana. Saat ini menjabat Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana periode 2017-2021.

Nyoman Sukma Arida lahir dan dibesarkan di Singapadu, Gianyar, Bali. Kini menjadi dosen di Jurusan Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Ia menyelesaikan pendidikan master di S2 Lingkungan Unud (2008) dan pendidikan doktoral Kajian Pariwisata di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2015.

Cukup lama berkecimpung di dunia NGO, khususnya yang terkait isu lingkungan, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal di Bali. Ia juga menjadi peneliti dan Ketua Pelaksana Yayasan Uluangkep, sebuah NGO di Gianyar Bali. Ayah dua orang putra dan putri telah menulis empat buah buku: 'Mengelola Konflik Batas Wilayah' (Uluangkep, 2004), Seks dan Kehamilan Pranikah (PSKK UGM, 2005), *Pandora Bali* (2012), dan *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri* (2016). Email: sukma.arida@gmail.com

Buku Pariwisata yang digunakan sebagai bahan perkuliahan, baik di Perguruan Tinggi di Bali maupun di perguruan tinggi di Indonesia tidak banyak kita jumpai. Kelangkaan ini karena memang ilmu pariwisata yang tergolong masih "muda" juga tidak banyak perguruan tinggi yang membuka program studi atau fakultas pariwisata. Pada titik terbatasnya ketersediaan buku pariwisata tersebut, maka buku ajar yang berjudul Pariwisata Berkelanjutan ini merupakan sebuah bentuk upaya penulis guna ikut memberikan sumbangan kecil terhadap khazanah ilmu kepariwisataan di tanah air.

ISBN 978-602-9320-76-3



9 786029 320763